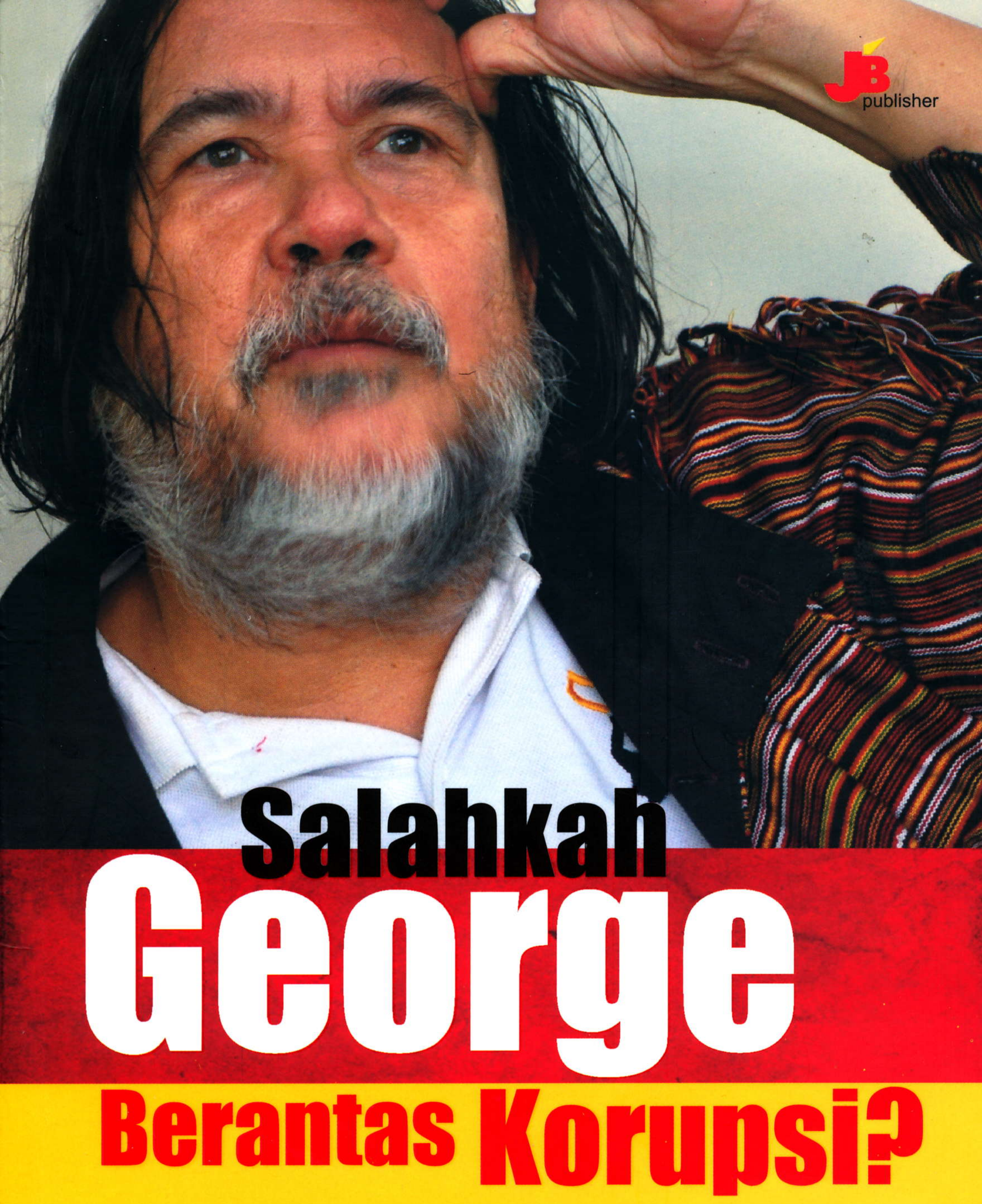


Salahkah George Berantas Korupsi?

Dilengkapi dengan **surat George untuk Presiden Soeharto** (1997), **surat George untuk aktivis '98**, **pidato George saat menolak PLTN Muria**, serta **bookografi karya George** tentang *Presidential Watch*.

Nurjannah Intan • Sigit Suryanto • Yuni Dasusiwi

— Editor buku kontroversial *Membongkar Gurita Cikeas*

Salahkah George Berantas Korupsi?

Salahkah George Berantas Korupsi?

Nurjannah Intan
Sigit Suryanto
Yuni Dasusiwi



Salahkah George Berantas Korupsi?

Penulis: Nurjannah Intan, Sigit Suryanto, Yuni Dasusiwi
Penyunting: JF Tualaka
Perancang Isi: Lintang Alit Amir Hendarsah
Perancang Sampul: Teguh Prastowo

Cetakan I, 2010

Penerbit **Jogja Bangkit Publisher** (Anggota Ikapi)
Jln. Mawar Tengah No. 72 Baciro Yogyakarta
Telp. (0274) 554985, 554986; Faks. (0274) 554985
email: jogjabangkit@gmail.com
www.galangpress.com

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Intan, Nurjannah, dkk.

Salahkah George Berantas Korupsi?
Yogyakarta; Penerbit Jogja Bangkit Publisher
Cet. I, 2010, 150 x 230; 160 hal.
ISBN: 978-602-95394-7-9

I. Politik
II. Judul
III. Tualaka, JF

Dicetak oleh:
Percetakan Galangpress
Jln. Mawar Tengah No. 72 Baciro Yogyakarta
Telp. (0274) 554985, 554986; Faks. (0274) 554985
email: percetakan@galangpress.com

Distributor tunggal:
PT Niaga Swadaya
Jln. Gunung Sahari III/7 Jakarta
Telp. (021) 4204402

Prakata

Bermula dari sebuah tulisan di *Suara Merdeka* (3/01/2010) bertajuk "Salahkah George Ikut Berantas Korupsi?" buku ini pun disusun. Triyanto Triwikromo, wartawan senior *Suara Merdeka*, dalam rubrik *Bincang-Bincang* mencoba menggali *Membongkar Gurita Cikeas* (MGC) menjadi sebuah berita yang tak melulu berbau kontroversi. Ia melakukan wawancara langsung dengan Julius Felicianus, Direktur Galangpress, dan mengolahnya menjadi sebuah tulisan yang menarik. Triyanto menyoroti semangat pemberantasan korupsi yang dimulai lewat menerbitkan sebuah buku, yang berperan dalam mendidik masyarakat Indonesia. Judul artikel tersebut cukup menggelitik kami. Sebuah kesadaran pun menyeruak di tengah-tengah tuduhan miring atas sikap George Junus Aditjondro yang berani menelisik kekayaan presiden. Salahkah dia, yang juga seorang warga negara yang peduli dan mencoba berkata jujur, ikut andil dalam melawan korupsi yang menggerogoti bangsa ini?

Fitnah dan ngawur. Dua kata yang kerap disematkan pada buku MGC. Politisi dan pengusaha yang namanya disebutkan dalam buku bersampul gurita itu ramai-ramai memprotes dan membantah. George tetap bergeming. Sekian diskusi dan wawancara yang memojokkannya ditanggapinya dengan tenang. Tak jarang ia melontarkan *joke* segar ketika menghadapi lawan bicaranya. Dalam suatu kesempatan, Ramadhan Pohan bahkan pernah menyebutnya anti Indonesia. George, yang juga aktivis lingkungan hidup, tetap tak ambil pusing. Ia yakin apa yang ditulisnya benar.

Hingga kini, tak banyak generasi muda dan masyarakat awam yang mengenal sosok George Junus Aditjondro. Namun, bagi aktivis gerakan pro demokrasi, nama George adalah ikon perlawanan. Ia bukan orang baru yang tiba-tiba muncul dan meneriakkan anti korupsi. Kiprahnya telah tertulis di berbagai media massa sejak tahun 1980. George pernah membuat geger pemerintah Indonesia gara-gara ceramahnya dalam seminar nasional yang menyinggung korupsi kepresidenan di tahun 1995. Padahal tema itu tabu dibicarakan di rezim orde baru.

"Dia seperti ditakdirkan untuk tak pernah berhenti melawan". Kutipan kalimat ini diambil dari pemberitaan mengenai George (tahun 1997) di *Suara Independen*, koran terbitan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) yang juga dikenal "galak" terhadap orde baru. George akan terus melawan semua hal yang mengakibatkan pelanggaran HAM. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berujar bahwa di balik pengumpulan kekayaan yang luar biasa pasti ada pelanggaran HAM di baliknya.

Prinsip itulah yang terus dipegangnya hingga berturut-turut menerbitkan buku mengenai korupsi kepresidenan. Buku MGC, yang ditulis berdasarkan penelitiannya selama lima tahun mendapat respon luar biasa. Tak heran, sebab dalam buku itu ia banyak menyebut politisi dan pengusaha yang namanya tengah bersinar saat ini.

Geger MGC ini membuat sosok George kembali dipertanyakan. Siapa dia sebenarnya? Apa motifnya menerbitkan buku yang begitu kontroversial? Buku ini akan menguraikan benang-benang kusut tersebut. Pada bagian pertama akan dipaparkan tentang perjalanan di balik buku MGC. Bagian kedua akan mengantarkan Anda untuk mengenal lebih dekat sosok George Junus Aditjondro. Dan di bagian ketiga, terangkum hasil penelitian George yang telah dipublikasikan ke dalam lima buku.

Penulis

Daftar Isi

George Junus Aditjondro

MEMBONGKAR
GURITA
CIKEAS

Di Balik Skandal Bank Century

"Bukankah SBY berkata akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi di negeri ini?"
— Abdurrahman Wahid, *Mantan Presiden Republik Indonesia*

Buku 'Membongkar Gurita Cikeas' karya George Junus Aditjondro

BAB I
KONTROVERSI
'GURITA CIKEAS'

Babak terbaru demokrasi di masa pemerintahan kedua SBY diawali dengan terbitnya buku *Membongkar Gurita Cikeas. Pre-launching* diadakan pada akhir tahun, tepatnya 23 Desember 2009, di kantor penerbit, Galangpress, Yogyakarta. Buku ini langsung menuai banyak komentar karena tercatutnya nama orang-orang penting di negeri ini. Sebutlah nama Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian empat yayasan yang ditengarai berafisiliasi dengan SBY-Ny. Ani Yudhoyono, Ramadhan Pohan, Jero Wacik, Hatta Rajasa, Edhie Baskoro, dan sederet nama para politikus lainnya.

Dalam peluncurannya yang dihadiri oleh beberapa wartawan dari media massa dan media cetak nasional, George Junus Aditjondro sang penulis, menyatakan tak khawatir jika bukunya nanti ditarik dari peredaran. Baginya, penarikan buku hanya akan memperkuat citra bahwa demokrasi di Indonesia hanya semu, karena faktanya kebebasan bermimbar atau berpendapat dibatasi.

Sebenarnya sangatlah manusiawi apabila George punya ke-khawatiran akan respon pemerintah. Bagaimana tidak? Pasalnya, meski bersubtitel, *Di Balik Skandal Bank Century*, buku setebal 183

halaman ini lebih banyak membeberkan indikasi kebusukan sistem oligarki atau mengguritanya persekongkolan kotor di dalam tubuh pemerintahan SBY. Dimulai dari penggalangan dana besar-besaran yang tidak wajar oleh tim sukses Partai Demokrat berikut SBY-Boediono dari pemilu legislatif maupun pilpres. Tak heran bila suara pemilih menggelembung menjadi 80%. Ditambah lagi, dugaan penyelewengan posisi-posisi strategis para pejabat teras yang kala itu merangkap tim sukses kampanye, serta gurita bisnis keluarga Cikeas yang seakan tak tercium rakyat yang kemudian dikaitkan dengan skandal Bank Century. Dugaan ini muncul lantaran Budi Sampoerna dan Siti Hartati Murdaya tercatat sebagai nasabah kakap bank tersebut. Menariknya, kedua pengusaha itu menjadi penyandang dana kampanye SBY dan Partai Demokrat.

Sementara itu mengenai sorotan terhadap yayasan-yayasan tersebut, George mencium dugaan penyalahgunaan anggaran negara sekaligus kepentingan yang menguntungkan yayasan-yayasan yang berafiliasi terhadap SBY dan Ny. Ani Yudhoyono. Potensi penyalahgunaan itu muncul karena adanya rangkap jabatan para pengurus yayasan. Artinya, para pengurus yayasan juga memiliki jabatan strategis di tingkat pemerintahan dan BUMN. Fenomena itu mengingatkan kita pada era Soeharto yang memiliki yayasan-yayasan di berbagai bidang. Pada akhirnya yayasan milik Soeharto dan Ibu Tien, terbukti menjadi sumber penyimpangan uang negara.

Tembok pertama yang harus dihadapi penulis dan penerbit adalah menghilangnya buku ini di pasaran. Adanya isu penarikan buku dari toko buku terbesar di Indonesia oleh Kejaksaan Tinggi segera dibantah pihak penerbit. Direktur Galangpress, Julius Felicianus, menjelaskan bahwa belum ada surat pembredelan buku dengan bubuhan tanda tangan Jaksa Tinggi yang dialamatkan ke Kantor Galangpress.

Memang, sejak pertengahan Desember empat ribu eksemplar buku tersebut sudah disebar di pasaran. Namun sejak diluncurkan hingga awal Januari 2010 banyak peminat kecewa karena tidak dapat menemukan buku tersebut di toko buku kesayangannya. Pihak toko

buku pun seperti memplester mulutnya rapat-rapat menghadapi komplain dari calon pembaca, penerbit, dan penulis. Tentu ini menjadi pertanyaan besar. Mengapa sampai buku 'biasa' ini seakan disembunyikan dari khalayak yang ingin tahu lebih dalam mengenai sisi lain para pemimpin?

Rintangan berikutnya yang tak kalah pelik adalah banyaknya pihak dan instansi yang menyatakan tidak terima dengan isi buku *Membongkar Gurita Cikeas*. Selain itu banyak pengamat yang menganggap bahwa buku ini hanya memancing di air keruh di tengah kisruhnya arus *Centurygate*. Padahal menurut George, dimunculkannya kasus Bank Century sebagai *subtitle* merupakan upaya untuk menggiring masyarakat, bahwa sebuah kasus korupsi bisa terjadi karena adanya sistem yang membentuknya. Pewacanaan kasus Bank Century diharapkan dapat membuka mata masyarakat, bahwa jabatan ganda dalam pemerintahan, parpol, maupun kerajaan bisnis sangat rentan praktik KKN.

Buku tersebut memang hanya memberikan porsi satu bab saja untuk membahas dugaan keterlibatan lingkaran keluarga Cikeas dalam kasus Century. Data yang disajikan pun hampir sama dengan informasi umum yang selama ini beredar di media masa. Tidak pelak judulnya dinilai banyak kalangan hanya sekadar mencari sensasi demi mendongkrak penjualan.

Meski banyak pertanyaan seputar penggunaan data-data sekunder dari internet oleh penulis, tetap saja materi buku ini sangat renyah bahkan terlampau gurih untuk dilewatkan begitu saja. George Junus Aditjondro, peneliti sosiologi korupsi yang rajin mengkritik korupsi kepresidenan ini, memiliki sumber terpercaya untuk meyakinkan bahwa semua data yang tersaji dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun nama narasumber atau informan tidak dicantumkan, namun ia menjamin semua data sanggup dipertanggungjawabkan, hingga ke meja hijau sekalipun.

Dari mana George memiliki nyali besar kalau bukan karena menggenggam bukti yang benar? Beberapa pihak telah melancarkan

somasi namun tak sedikit juga yang mendukung kiprahnya dalam mengupas sistem korupsi di negeri ini. Bapak satu orang anak ini memang *concern* membuka sisi hitam dari dinasti rezim yang berkuasa di Indonesia, tak terkecuali orang nomor satu di negeri ini. Kepekaannya dalam menelisik pemerintahan Soekarno, Soeharto, Habibie, Megawati, tak terkecuali SBY yang baru menginjak tahun ke enam, menjadi catatan tersendiri bagi perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia. Data-data valid dalam buku-buku yang diterbitkannya setelah Soeharto lengser, berkontribusi besar sebagai bahan referensi berbagai organisasi non pemerintah dalam menelusuri jejak kekayaan Soeharto yang diperoleh dari hasil korupsi.

Bagaimana kelanjutan perjalanan buku terbaru George Junus Aditjondro? Silakan simak catatan penting dari berbagai berita yang termuat dalam beragam media berikut ini.

A. DIMULAI DARI MENGHILANGNYA BUKU *MEMBONGKAR GURITA CIKEAS* DI PASARAN

Buku berharga Rp 36.000,00 ini mendadak hilang dari pasaran. Pihak toko buku Gramedia sebagai muara penjualan tidak mampu menjelaskan secara gamblang mengapa buku terbitan Galangpress ini tidak lagi terpampang di rak toko buku mereka. Sebelumnya, penerbit menyatakan mencetak buku ini sejumlah 4.000 eksemplar. Quota persebaran buku untuk wilayah Yogyakarta sendiri sebanyak 200 eksemplar. Sedang sisanya, yang tiga ribuan eksemplar, dipasarkan di wilayah Jabodetabek dan kota-kota besar di Jawa.

Sesudah pra peluncuran di Yogyakarta tanggal 23 Desember 2009, buku tersebut langsung beredar di sejumlah toko buku besar Yogyakarta. Sementara Kamis 24 Desember 2009, secara serentak di hampir seluruh toko besar di daerah Jabodetabek dan Surabaya, buku ini sudah ter-*display* dengan baik. Namun, pada hari yang sama, kurang lebih selang 3 jam sejak dipajang, buku MGC mendadak menghilang dari rak.



Suasana pre-launching buku MGC di kantor penerbit, Galangpress

Ada tiga versi yang beredar terkait menghilangnya buku *Membongkar Gurita Cikeas*. Versi pertama menyebutkan bahwa buku tersebut diborong hingga ludes. Namun, tidak ada penjelasan siapakah pemborongnya. Versi kedua, buku tersebut ditarik dari peredaran. George Junus Aditjondro, sang penulis, mengaku dirinya sama sekali tak kaget bukunya mengalami nasib demikian. Lima hari setelah buku tersebut diluncurkan, 27 Desember 2009, George mengemukakan alasan yang sangat menggelitik terkait menghilangnya MGC dari peredaran. Disebutkan bahwa ada oknum yang mengaku dari Kejagung (Kejaksaan Agung) mengintimidasi secara lembut ke toko-toko buku. Orang tersebut menyebutkan bahwa penarikan dilakukan atas perintah atasan. Versi terakhir memberitakan bahwa toko buku memang belum pernah menerima kiriman buku tersebut ke jaringan yang bersangkutan (*www.hariansumutpos.com, 28/12/2009*).

Seperti dilansir dalam *headline Harian Jogja*, (27/12/2009), Ratri, supervisor penjualan TB Gramedia membenarkan adanya penarikan buku tersebut. Dia mengatakan bahwa kebijakan tersebut berlaku secara jaringan. Namun alasannya tidak bisa dibeberkan lebih lanjut.

Dari segi yuridis, jika belum ada surat penarikan resmi dari Kejagung, maka buku masih sah beredar di pasaran. Hal ini pun ditegaskan kembali oleh Direktur Galangpress. Dirinya menyebutkan bahwa hingga tanggal 27 Desember 2009 pihaknya belum menerima selembar surat pun dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta yang intinya menarik buku tersebut. Bahkan Julius mengaku baru mendapat informasi mengenai penarikan buku di wilayah Jabodetabek dari para wartawan yang mengkonfirmasi.

Badai isu yang paling tidak bisa diabaikan adalah adanya pihak-pihak yang khawatir dengan peredaran buku tersebut. Padahal penulis dan penerbit meyakini bahwa data yang diungkap oleh buku tersebut memang valid. Selain karena memang 70% sumber materinya pernah diusung dalam pemberitaan media lain, buku ini telah mendapat endorsemen yang cukup bisa menjadi acuan lancarnya penerbitan. Para endorser bukanlah tokoh sembarangan, melainkan tokoh yang sudah dikenal masyarakat luas, seperti Syafii Ma'arif (mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah), Teten Masduki (Sekjen Transparency International Indonesia), Danang Widoyoko (Koordinator Indonesia Corruption Watch) dan Yosep Adi Prasetyo (Komisioner Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM).

Ide cemerlang penerbitan buku awalnya muncul dari inisiatif penulis. Namun, penerbit juga telah mengajukan syarat bahwa materi dalam buku ini tidak boleh mengandung hujatan, fitnah, apalagi mengambil data yang tidak jelas. Setelah seluruh naskah selesai ditulis, penerbit menilai bahwa materinya layak terbit. "Jadi seharusnya tidak masalah," ungkap Direktur Galangpress sekali lagi dalam sebuah kesempatan ketika dikonfirmasi mengenai validitas data dan isi buku *Membongkar Gurita Cikeas*.



Para tokoh endorser buku Membongkar Gurita Cikeas, (atas-dari kiri ke kanan) Ahmad Syafii Ma'arif, Teten Masduki, Danang Widoyoko, Yosep Adi Prasetyo.

Dalam pernyataannya di harian yang sama, Julius mengatakan bahwa niat penerbitan buku ini adalah demi memberi catatan seratus hari pemerintahan SBY. Buku ini diterbitkan sebagai media pengingat untuk SBY mengevaluasi keluarga, partai, sekaligus orang-orang terdekatnya. Sehingga, lembar tahun pemerintahannya yang kedua lebih bersih dan tidak ternodai oleh korupsi.

Meskipun diperkirakan iklim untuk penjualan buku jelas tidak kondusif, Penerbit Galangpress sebenarnya sudah mempersiapkan jalur distribusi alternatif. Harapannya agar masyarakat luas pun dapat mengakses buku tersebut. Ini dilakukan jika toko buku tetap tidak bersedia menjual *Membongkar Gurita Cikeas.*

Sementara itu, Presiden SBY melalui Jubirnya, Julian Aldrin Pasha, membantah adanya campur tangan pemerintah terkait menghilang-nya buku *Membongkar Gurita Cikeas; Di Balik Skandal Bank Century* di peredaran. "Kami klarifikasi tidak ada larangan dari pemerintah," kata Julian. Ia mengaku, tidak ada perintah untuk melarang peredaran buku itu. "Tidak ada arahan (melarang) dari presiden," katanya.

Setidaknya muncul pendapat dari beberapa kalangan terkait hilangnya buku ini dari peredaran di antaranya:

A. Sosiolog yang juga rohaniwan, Franz Magnis Suseno SJ menilai, pihak Cikeas seharusnya tidak perlu panik. Menurut Romo Magnis, munculnya buku itu bukan sebagai tindakan kriminal. "Kalau infonya benar, itu bagus, dan kalau bohong bawa saja ke pengadilan. Jadi, tak usah panik dengan buku itu," katanya (*www.harian-global.com*).

B. "Ini akan menjadi persoalan yang besar karena akan menimbulkan kecurigaan pada warga negara. Pencekalan buku ini juga mengindikasikan otoritarianisme, terutama jika ada intervensi langsung dari Cikeas," ujar Ridha Saleh, Wakil Ketua Komnas HAM. Menurutnya, pelarangan itu melanggar dua hal, yaitu melanggar hak orang untuk menyampaikan aspirasi dan melanggar hak orang untuk mendapatkan informasi yang benar (*www.hariansumutpos.com).*

C. "Justru penghilangan buku merupakan indikasi ada sesuatu yang ditutupi," ucap Bambang. Menurutnya, jika ada yang keberatan dengan buku tersebut, bisa membalasnya secara intelektual, bukan dengan kekuatan. "Seperti kata George, buku dibalas dengan buku. Ini kan adu intelektual," tutup Bambang Susetyo, anggota Pansus dari Golkar, kepada detikcom Senin 28 Desember 2009 *(www.hariansib.com).*

D. "Toko buku kecil menjual secara diam-diam, seperti jual narkoba," ujar Ketua Presidium Forum Kepemimpinan Pemuda Indonesia

yang juga panitia *launching* buku George di Doekoen Coffee, Haris Rusly. Aktivis 1998 ini mengungkap bahwa toko kecil tersebut menyimpan buku MGC di gudang. Ketika ada yang bertanya, baru akan diambilkan *(www.detiknews.com)*.

E. Distributor di wilayah Semarang dan Surabaya mengaku sudah kehabisan buku dan berencana memesan ulang. "Kita punya 300 buku dan hari ini sudah habis. Kalau melihat pembelian, ini namanya *best seller*," ujar Rudi, Kepala Distributor buku Galangpress di wilayah Jawa Tengah kepada detikcom, Senin 28 Desember 2009. Ketika pembeli tidak bisa mendapatkan buku tersebut di toko buku, mereka bisa langsung membeli di kantor distributor. Dikatakan 100 buku langsung habis dalam hari pertama penjualan.

Berikut ini salah satu kliping pemberitaan media *online* pada 28 Desember 2009 mengenai hilangnya buku *Membongkar Gurita Cikeas*.

Buku Gurita Cikeas Hilang

11:31 | Senin, 28 Desember 2009

Intelektual Harus Dijawab Intelektual

JAKARTA-Buku kontroversial berjudul "Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century" hilang dari peredaran. George Junus Aditjondro, penulis buku tersebut serta Galangpress sebagai penerbit, mengaku tetap memasarkan bukunya lewat jalur lain.

Pembeli, kata George, bisa langsung menghubungi pihak distributor Galangpress di Yogyakarta, atau bisa juga mendatangi sejumlah toko buku yang menjualnya di tempat-tempat tertentu. "Ada orang yang mengaku dari Kejagung mengintimidasi secara lembut ke toko-toko buku. Orang itu menyebutkan penarikan dilakukan atas perintah atasan," ujar George saat dihubungi wartawan, Minggu (27/12). Dosen Universitas Sanata Dharma Yogyakarta itu menegaskan selama belum ada surat penarikan resmi dari Kejagung, maka bukunya masih sah beredar di pasaran.

"Selama belum ada surat dari Kejaksaan Agung kalau buku saya dilarang, maka distributor akan tetap melayani pemesanan," ujarnya. George bahkan mengaku pada Rabu (30/12), akan menggelar acara bedah buku "*Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century*" di Doekoen Coffee, Graha Permata Pancoran Blok A, Pancoran, Jakarta Selatan.

Terbit dan beredarnya buku tersebut membuat gerah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebagian isinya pembahasan oligarki kekuasaan yang terbangun di seputar lingkaran kekuasaan SBY. Karena itu, tak heran buku ini memantik kontroversi dan menghilang dari peredaran. "Gurita Cikeas maksudnya oligarki kekuasaan yang terbangun di lingkaran kekuasaan SBY," terangnya.

George menjelaskan, lingkaran kekuasaan yang dimaksud adalah tiga komponen penyokong kekuasaan SBY. Yakni para menteri atau pejabat, pengusaha, dan keluarga. Tiga komponen ini, lanjut George, memiliki kontribusi besar dalam kemenangan SBY pada Pemilu 2009. Sedangkan skandal kasus Bank Century yang dipakai sebagai sub judul, hanya sebagai salah satu contoh kasus kecil pengguliran dana kampanye untuk SBY. "Isi buku juga mengulas kemenangan Pemilu yang penuh pelanggaran hukum. Parpol tak semuanya bersih, kemenangan didukung *money politic* dan dana asing," ungkap dia.

Terpisah, Wakil Ketua Komnas HAM, Ridha Saleh menyayangkan adanya pelarangan beredarnya buku "*Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century*". Menurutnya, pelarangan itu melanggar dua hal, yaitu melanggar hak orang untuk menyampaikan aspirasi dan melanggar hak orang untuk mendapatkan informasi yang benar.

Ridha sendiri mendengar bahwa buku *Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century* yang ditulis George Junus Aditjondro ditarik dari peredaran atas sebuah instruksi dari pusat. Buku yang sudah bertengger di rak toko buku di Jabodetabek dan Surabaya tiba-tiba menghilang. "Ini akan menjadi persoalan yang besar karena akan menimbulkan kecurigaan pada warga negara. Pencekalan buku ini juga mengindikasikan otoritarianisme, terutama jika ada intervensi langsung dari Cikeas," ujar Ridha.

Direktur penerbitan Galangpress, Julius Felicianus meyakini bahwa buku yang baru saja diterbitkan perusahaannya: Membongkar Gurita Cikeas, tak ada masalah.

Julius yang dikonfirmasi Minggu (27/12) pagi, mengaku baru tahu bahwa bukunya ditarik dari peredaran oleh toko buku di Jabodetabek. Ini terkait dengan isu bahwa ada pihak-pihak yang khawatir dengan peredaran buku itu.

Julius mengatakan, Galangpress sudah membuat distribusi alternatif jika toko buku tidak bersedia menjualnya. "Galangpress akan mencari alternatif jalur distribusi yang lain. Karena, kami tidak ingin menghambat saluran informasi masyarakat," kata Julius.

"Sebetulnya bukan saya yang dirugikan, malah pemerintah. Seakan-akan apa yang tertulis itu benar. Akibat penarikan itu bisa jadi bukunya malah tambah dicari orang," katanya.

Ketika ditanya apakah pihak penerbit sudah yakin bahwa data yang diungkap di buku itu valid, Julius menjawab:"Yakin. Apalagi, buku itu sudah ada yang memberi endorsement. Dan mereka adalah tokoh-tokoh terkenal, seperti Syafii Ma'arif, Teten Masduki, Danang Widoyoko dari ICW dan Yosep Adi Prasetyo." Julius mengungkapkan, inisiatif penerbitan buku ini berasal dari George Aditjondro. Waktu itu, Galangpress sudah memberikan ketentuan terhadap George. Bahwa, buku itu tidak boleh berisi hujatan, fitnah apalagi mengambil data yang tidak jelas.

"Jadi, kami yakin dong. Isi bukunya juga 70 persen sudah ditulis di media lain. Buku ini juga sudah diberi komentar baik oleh para tokoh," katanya lagi. Sementara itu Presiden menyatakan prihatin atas terbitnya buku yang isinya menuding sejumlah yayasan milik keluarga Cikeas sebagai pengumpul dana bagi kegiatan kampanye SBY pada Pilpres lalu.

Lagi pula, Galangpress menerbitkan buku itu dengan niatan untuk memberi catatan 100 hari Pemerintahan SBY. "Buku ini diterbitkan agar SBY mengevaluasi keluarganya, partainya, dan orang-orang terdekatnya. Sehingga pemerintahan dia lima tahun ke depan bersih tidak ternodai oleh korupsi," kata Julius.

Tentang reaksi dari pendukung SBY yang tidak terima dengan data di buku itu, Julius menyarankan agar mereka membuat buku tandingan. "Intelektual harus dibalas dengan intelektual. Kalau setiap buku disensor, hak rakyat akan terbatas," katanya.

Juru Bicara Presiden SBY Julian Aldrin Pasha mengatakan, dalam buku tersebut terdapat fakta yang tidak akurat. Namun pihak SBY belum menentukan langkah hukum terkait peredaran buku "*Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century*".

George Junus Aditjondro selama ini dikenal sebagai penulis kontroversi yang mengungkap skandal korupsi di lingkaran kepresidenan. Pada tahun 2006, dia menulis buku "*Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga: Istana, Tangsi dan Partai Penguasa*". Ia sempat dicekal oleh rezim Soeharto kala itu. Pria brewokan berkacamata ini pernah menulis buku berjudul "Guru Kencing Berdiri Murid Kencing Berlari" yang mengkritik praktik korupsi zaman Soeharto dan Habibie.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari mengaku kaget ketika mendengar buku Membongkar Gurita Cikeas ditarik dari peredaran.

Untungnya, tutur anak buah Megawati itu, dirinya memborong 40 buku. Selain untuk koleksi pribadi, buku tersebut juga dibagikannya kepada anggota PDIP lainnya. "Saya kenal penerbitnya, jadi saat teman-teman di PDIP tahu saya punya buku itu mereka langsung minta dibelikan juga. Saya beli 40 buku," ujar anggota Eva yang juga anggota Pansus Angket Century dan mengaku mengirimkan buku tersebut kepada mantan Calon Presiden Megawati Soekarno Putri.

Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, membantah adanya campur tangan pemerintah dalam mulai menghilangnya buku *Membongkar Gurita Cikeas, Di Balik Skandal Bank Century* di peredaran. "Kami klarifikasi tidak ada larangan dari pemerintah," kata Julian. Ia mengaku, tidak ada perintah untuk melarang peredaran buku itu. "Tidak ada arahan (melarang) presiden," katanya.

Sebelumnya, buku yang diterbitkan Galangpress Yogyakarta, dalam salah satu bab yang ditulis peneliti dan pengamat sosial George Junus Aditjondro itu menyebutkan keterlibatan Yudhoyono dan keluarganya dalam kasus Century.

Selain itu, ia juga menyoroti yayasan-yayasan yang bernaung di bawah keluarga Cikeas, yakni Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian (YKDK), Yayasan Puri Cikeas, dan Yayasan Mutu Manikam. Menurut Aditjondro, yayasan-yayasan itu dijadikan motor pendulang dana dan dukungan politik bagi Demokrat dan Yudhoyono.

Namun, menurut Julian, terhadap tudingan Aditjondro, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum mengambil sikap. Bahkan, presiden belum membaca secara detil buku itu. Staf khusus presiden yang diminta membaca kemudian melaporkan ke presiden. "Presiden hanya merasa prihatin, di iklim demokrasi ini banyak tudingan yang mengarah fitnah," katanya.

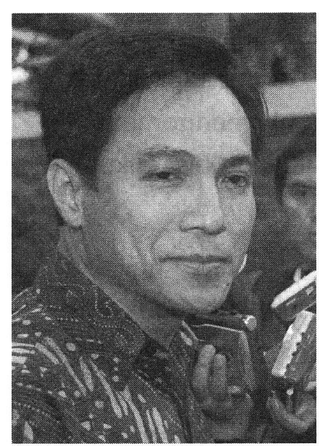
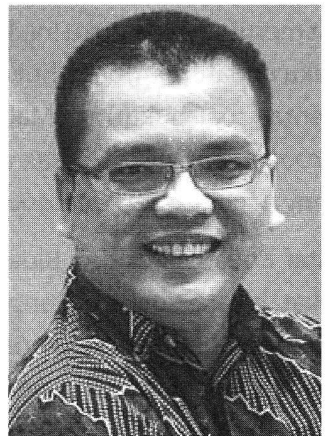
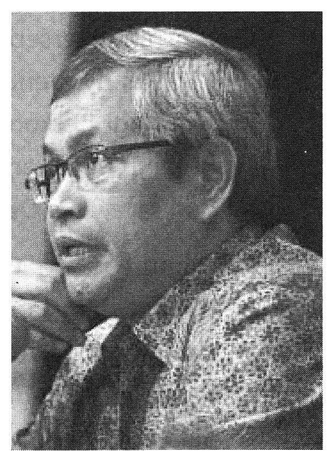
Pihaknya, kata dia, masih terus mempelajari isi buku itu. Dia melanjutkan, sejumlah fakta dalam buku itu tidak benar. Soal tindak lanjut dari buku itu dengan menggugat secara hukum atau pun menerbitkan buku tandingan, Julian mengatakan, presiden belum memutuskan.

(www.hariansumutpos.com)

B. ISU PELARANGAN BUKU

Pada hari Minggu, 27 Desember 2009, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Didik Darmanto, mengklarifikasi isu pelarangan buku MGC. Ia mengatakan bahwa pihaknya belum ada yang memerintahkan penarikan buku berjudul *Membongkar Gurita Cikeas*. "Belum ada itu. Belum ada laporan dan pengkajian soal buku itu," kata Didik kepada *Media Indonesia* di Jakarta, Minggu 27 Desember 2009.

Hingga 10 Januari 2010, belum ada surat resmi dari Kejaksaan Agung kepada penerbit untuk melarang beredarnya buku terbaru karya George Junus Aditjondro. Namun sejak diadakan konferensi pers dan peluncuran buku di Gedung Galangpress Center, guliran informasi adanya pelarangan buku sudah menuai banyak pro dan kontra dari masyarakat.

Pihak-pihak yang pro kontra atas terbitnya buku MGC, (ki-ka) Julian Aldrin Pasha, Denny Indrayana, Pramono Anung.

Berikut ini beberapa tanggapan pro kontra atas informasi dalam buku *Membongkar Gurita Cikeas* berikut:

1. **Patrialis Akbar**. Menkum HAM, Patrialis Akbar, setuju kalau buku karya George Junus Aditjondro itu dilarang beredar. "Saya setuju buku itu dilarang beredar," kata Menkum HAM, Patrialis Akbar,

dalam acara Refleksi Akhir Tahun di Depkum HAM, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (30/12). Buku yang menurutnya memojokkan Presiden SBY itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara metodologi ilmiah. "Penulis tidak melakukan cek dan ricek data yang disampaikan sehingga isinya lebih banyak prasangka dan fitnah," jelas Patrialis. "Saya berharap masyarakat lebih selektif dalam mengkonsumsi tanggapan pengamat tertentu," pungkasnya *(www.hariansib.com Selasa, 5/01/2010).*

2. **Denny Indrayana.** Staf Khusus Presiden, Denny Indrayana, sempat menulis di jejaring sosial *facebook* "Buku sampah. Informasi sampah. Gosip sampah. Kalaupun didapat, ya langsung masuk tempat sampah, tidak usah pula terlalu ditanggapi atas nama kebebasan berpendapat pula, *ah ora pantes je*. Keep fighting for the better Indonesia. Just Doa and Do the best*." Bisa jadi ungkapan tersebut merujuk pada buku ini. Tapi pada kesempatan lain Denny mengaku sudah membaca buku George tapi dia tak mau lagi berkomentar soal buku itu. "Malas ah mengomentari buku itu. Biarkan *cooling down* saja. Tidak ada yang bisa dikutip dari saya," ujar Denny *(www.ekstra.kompasiana.com).*

   Namun, sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, KKN, dan HAM, Denny angkat bicara soal pelarangan buku. "Tidak ada pelarangan buku George. Buku George justru dipersilakan beredar," kata, Denny Indrayana dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (29/12). Ia melanjutkan "Tidak ada untungnya, justru rugi melarang-larang buku George." Denny sepakat bila publik diberi kesempatan membaca buku yang diterbitkan Galangpress itu dengan tujuan membuka wacana masyarakat supaya mengetahui kualitas isi buku tersebut. "Dengan publik membaca sendiri, mereka akan dapat menilai bahwa buku itu kualitasnya rendah, tidak akurat, logikanya melompat-lompat, tendensius. Publik kita sudah dewasa kok," katanya *(www.detiknews.com 29/12/2009).*

3. **Inu Kencana.** Mantan dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Inu Kencana sempat kepergok berburu buku MGC di Toko Buku Gunung Agung, Jakarta Pusat. Namun, dia tidak menemukan buku bersampul warna putih itu. "Tidak boleh dilarang. Ini kan demokrasi. Buku porno saja bisa beredar, masa buku seperti ini malah dilarang," tanggapan Inu ketika ditanya soal pelarangan buku. "Sangat menyesal kalau buku itu dilarang. Kalau tidak sepakat, yang melarang bikin buku lagi. Jangan ada larang-larang," cetus mantan Caleg DPR RI itu *(www.hariansib.com, 5/01/2010).*

4. **Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas.** Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengaku tidak mendapat buku tersebut serta menyatakan ketidaksetujuannya atas pelarangan buku tersebut. "Bagi saya, jangan membelenggu ide-ide seseorang. Mereka berhak, tinggal lihat-lihat faktanya," ujarnya. Buku tersebut tidak perlu disanggah. "Kalau buku disanggah akan keluar lagi lebih banyak yang mengatakan perkara itu benar atau tidak. Masyarakat bisa tahu sendiri," kata Hemas *(www.detik.com, 29/12/2009).*

5. **Pramono Anung.** "Buku itu karya seseorang. Saya tidak setuju dicabut peredarannya. Tidak baik untuk pendidikan masyarakat," kata Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/12). Pramono mengusulkan bantahan atas buku George itu sebaiknya dilakukan oleh kubu SBY dengan tulisan pula, sehingga terjadi diskusi ilmiah di publik. Pramono mengaku sudah membaca buku. "Bahwa ada yang benar iya, soal keberadaan yayasan. Tetapi, bahwa keseluruhan buku itu apakah benar, saya termasuk yang belum mempercayai," ujar politisi PDIP ini. "Buku ini banyak dicari karena reaksi berlebihan SBY dan pendukungnya sehingga semakin seksi dan dicari masyarakat," kata Pramono *(www.hariansib.com, 5/01/2010).*

6. **Priyo Budi Santoso.** "Melarang buku itu adalah tindakan blunder yang tidak tepat di era demokrasi," kata Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/12). Priyo mengungkapkan keraguannya terhadap kebenaran buku karya George tersebut. "Saya sempat baca selintas dan tidak yakin kebenaran buku itu," katanya. Politikus ini menyatakan buku tersebut lebih banyak sisi sensasionalnya. George telah mempertaruhkan reputasinya sebagai akademisi dengan membuat buku *Membongkar Gurita Cikeas*. Sebelumnya, di tempat yang sama ia berharap bahwa setiap pihak dapat menahan diri termasuk SBY yang dianggapnya sedang diuji. "Saya berpandangan pada sistem politik akhir-akhir ini. Pelarangan justru akan menimbulkan kegaduhan baru," jelas Priyo. "Hemat saya, biarkan ini menjadi warna-warni demokrasi kita," lanjutnya Senin (28/12). Ketika disinggung apakah isi buku ini akan terbukti benar seperti halnya buku di zaman Soeharto yang mengungkap korupsi yang terjadi, Priyo tidak dapat berbicara banyak. "Biar hari-hari ke depan yang menguji," pungkasnya.

   Menanggapi adanya usulan diterbitkannya buku putih sebagai tandingan fakta dan klarifikasi oleh SBY atau Partai Demokrat dianggapnya sebagai ide bagus. Saat ini, menurut Priyo, yang paling tepat menjawab isi buku tersebut adalah Presiden SBY. "Yang paling sah bilang itu beliau (SBY), kami tidak dalam posisi untuk itu," katanya. Di lain pihak, Priyo meminta agar penulis menjaga situasi. "Kalau memang buku tersebut belum patut dikeluarkan karena data masih sumir seperti yang diucapkan teman saya dari Demokrat, dia punya tanggung jawab mempertahankan nama besarnya," kata politisi Golkar ini *(www.hariansib.com).*

7. **Irman Gusman.** Meski agak kecewa karena buku ini dianggap kurang menjaga hak orang lain, Ketua DPD RI Irman Gusman mengungkapkan bahwa buku ini tidak perlu dilarang beredar

karena kita ada di negara demokrasi. "Dalam demokrasi, selain ada kebebasan, ada hak orang lain yang harus kita jaga, apalagi menyangkut nama kepala negara," tuturnya. Menurutnya klarifikasi terhadap isi buku juga perlu dilakukan. Meskipun demikian, jika memang harus ada pelarangan itu pun merupakan hak aparat pemerintah. Namun, akan lebih baik kalau mereka yang berwenang terlebih dahulu melihat isi buku ini dan mempertimbangkan kontroversi yang ditimbulkan *(www.hariansib.com, 5/01/2010).*

8. **Yudi Latief.** Lain Denny, lain pula dengan Yudi Latief. "Mudah-mudahan ini tidak terjadi, adanya pemerintah melakukan penarikan buku. Kalau ini terjadi jelas suatu preseden buruk," ujar pengamat politik ini saat ditemui di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Minggu (27/12) malam. Menurut Yudi, apabila memang benar buku *'Membongkar Gurita Cikeas'* ditarik, hal tersebut dianggap sebagai sebuah kemunduran dari reformasi yang berjalan lebih dari sudah sepuluh tahun. "Sensor terhadap buku betul-betul bersifat antitesis terhadap demokrasi. Penarikan buku itu ciri pemerintahan otoritarian," jelasnya.

   Menurut Yudi kalaupun terdapat fakta-fakta yang dianggap salah, seharusnya tidak diatasi dengan penarikan buku. Mekanisme hukum bisa dijalankan. Jika ada data penulis yang salah, si penulis buku harus bisa bertanggung jawab atas hal tersebut atau meminta maaf. Lebih dari itu, pelarangan dalam bentuk apapun justru bisa membuat asumsi seolah membenarkan ada fakta yang terkandung di dalamnya. "Kalau kesalahan itu bisa ditunjukkan, sebenarnya membuat nilai buku itu merosot jadi sampah. Tapi kalau buku itu belum apa-apa, tidak jelas salahnya, ditarik begitu saja, justru menimbulkan pertanyaan besar," pungkas Yudi *(www.hariansib.com, 5/01/2010).*

9. **Lukman Hakiem.** "Jangan sedikit-sedikit gugat. Biarkan ini buku beredar. Buku itu *kan* karya ilmiah, hasil kerja otak. Kalau tidak setuju, jawab dengan kerja otak pula. Jangan kayak *infotainment* lah. Lagian, kalau memang benar, tidak ada masalah, kenapa takut?" kata Lukman Hakiem, politikus PPP, kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/12). "Itu terlalu defensif dan reaktif, kayak *infotainment* dalam kasus Luna Maya. Cara paling sehat ya tulis buku. Di mana kesalahannya? Yang tidak akurat mana? Data bohongnya mana? Ungkap semua, semacam buku putih," usulnya.

   Lukman menilai, jika Presiden SBY dan pendukungnya terus bersikap reaktif, justru akan memancing opini publik bahwa apa yang ditulis George memang benar adanya. Karena itu, ia menyarankan agar SBY dan pendukungnya menyikapi kasus buku ini secara dingin dan jernih. "Pokoknya jangan defensif dan reaktif yang berlebihan. Kalau itu terus dilakukan, jangan-jangan memang ada sesuatu. Itu nanti pikiran publik yang berkembang. SBY itu didukung rakyat sampai 60 persen. Kalau dia benar, nggak ada masalah, kenapa takut? Buktikan data-data dalam buku Gurita Cikeas salah," pungkasnya *(www. hariansib.com, 5/01/2010).*

10. **Burhanuddin Muhtadi.** Senada dengan Lukman Hakiem, Burhanuddin Muhtadi dari Lembaga Survei Indonesia menyayangkan respon Istana yang berlebihan. "Reaksi istana, SBY terlalu melankolis, terlalu berlebihan. Ini malah berbalik menjadi iklan gratis bagi buku George. Masyarakat yang tidak terlalu peduli, menjadi penasaran untuk mendapatkannya," kata pengamat politik ini Senin (28/12). Menurut Burhanuddin, buku tersebut sebenarnya tidak terlalu kuat secara akademis karena hanya mengumpulkan informasi dari sejumlah media, internet, dan sumber lainnya yang tidak bisa diverifikasi. Tetapi, Istana justru menanggapi buku itu dengan cara-cara yang non akademik, misalnya menyebut tidak mengandung kebenaran dan hindari

fitnah. "Kalau buku harus dilawan dengan buku, ditunjukkan kekurangan, kelemahan metodologinya," ujarnya. Dalam *Perayaan Natal Bersama Tingkat Nasional* Presiden SBY menyerukan agar bangsa Indonesia menjauhkan sikap dan perilaku fitnah, berita bohong, dan melampaui kepatutan. "Meski tidak ditujukan secara rinci. Saya kira pesan itu mengarah pada buku George Aditjondro. Apalagi itu kemudian ditegaskan oleh Jubir Kepresidenan yang mengatakan buku itu tidak mengandung kebenaran," ujarnya *(www.detik.com, 28/12/2009).*

Berikut ini adalah tanggapan menarik dari Prof. Dr. Djoko Suryo, Guru Besar Sejarah Universitas Gadjah Mada yang berhasil dipaparkan dalam *website* Republika.

Pelarangan Tak Selesaikan Masalah,
Buat Buku Tandingan Gurita Cikeas
By Republika *Newsroom*
Rabu, 30 Desember 2009 pukul 17:08:00

YOGYAKARTA--Guru Besar Sejarah UGM, Prof Dr Djoko Suryo, menyampaikan ketidaksetujuannya apabila buku "Gurita Cikeas" karya Dr George Junus Aditjondro dilarang beredar.

Menurut Djoko, pelarangan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang yang sudah semakin kritis dan cerdas dengan adanya keterbukaan informasi. Sebaliknya, ia menyarankan pihak-pihak yang merasa dirugikan, lebih baik menulis buku tandingan.

"Pelarangan saya kira tidak menyelesaikan masalah, dijawab dengan penulisan buku yang lain sebagai *counter*, sehingga masyarakat semakin menjadi cerdas," kata Djoko Suryo menjawab pertanyaan wartawan terkait polemik buku Gurita Cikeas, Rabu (30/12), di Gedung Pertemuan Universirty Club (UC)-UGM.

Hari ini acara disana digelar untuk perayaan ulang tahunnya yang ke-70. Saat itu juga dilakukan peluncuran bukunya "Transformasi Masyarakat Indonesia: Dalam Historiografi Indonesia Modern".

Prof Djoko mengatakan dengan adanya penulisan buku tandingan "Gurita Cikeas", maka masyarakat dapat memperoleh informasi secara menyeluruh dan tidak sepihak. "Ilmu sejarah saja tidak mutlak. Kita bisa

melakukan argumentasi, konstruksi, karena sejarah itu sangat dinamis, bisa diinterpretasi, tidak terpaku pada satu sisi. Harus diimbangi sisi yang lain. Sehingga orang bisa melihat secara utuh," kata Djoko.

Menjawab pertanyaan terkait harapannya setelah memasuki usia 70 tahun, Djoko mengaku ia masih memiliki keinginan untuk menjadi guru bagi anak bangsa.

Dia ingin terus mengabdi sebagai akademisi untuk mengajar dan mendidik muridnya menjadi intelektual yang cerdas, arif serta bisa jadi pemimpin dan panutan masyarakat. "Senang kalau anak murid bisa jadi apa sebetulnya saya harapkan, karena banyak murid saya yang tersebar dimana-mana," katanya

Ia juga ingin terus menulis buku sejarah visioner. Menurutnya sejarah itu memiliki proyeksi masa depan dan membawa pencerahan yang ingin dicapai bangsa Indonesia. "Sejarah ditulis untuk memprediksi masa depan, membuat proyeksi kebijakan bagi pemegang kebijkan agar terhindar dari pengalaman yang tidak baik di masa lampau," jelasnya.

(www.republika.co.id)

Dalam berbagai kesempatan, KOMNAS HAM menyatakan dukungannya terhadap penyebarluasan informasi apapun yang melambangkan terpenuhinya hak dasar masyarakat. Secara khusus Komnas HAM mendatangi toko buku Gramedia dan Gunung Agung untuk mengecek peredaran buku *'Membongkar Gurita Cikeas; Di Balik Skandal Bank Century'.* Komisioner Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Yoseph Adi Prasetyo yang akrab disapa Stanley menjelaskan, jika tidak ada ancaman seharusnya toko buku tersebut tidak perlu takut mengedarkan buku itu. "Kalau tidak ada ancaman, alasannya jadi apa?" katanya.

Selasa 28 Desember 2009, Stanley menyatakan akan mengecek apakah ada ancaman dari institusi negara terhadap manajemen dua jaringan toko buku di atas. Ia dan anggota KOMNAS HAM lainnya berencana mengunjungi Gramedia Matraman, Gramedia Grand Indonesia, dan Gunung Agung Kwitang. Dalam kesempatan yang sama, Stanley juga memaparkan rencana penulis, George Junus Aditjondro, untuk datang juga ke Gramedia Matraman. Meski

kemudian penulis membatalkan rencana menemani KOMNAS HAM melakukan perjalanan ke toko-toko buku tersebut.

Toko buku Gunung Agung yang berlokasi di depan kantor Mako Marinir, Kwitang, Jakarta Pusat menyatakan sempat menjual 50 eksemplar buku '*Membongkar Gurita Cikeas; Di Balik Skandal Bank Century*' pada hari Sabtu (26/12) seharga @ Rp 36 ribu. Namun, tidak sampai dua jam, buku langsung ludes terjual. Menurut Saiful, staf toko Gunung Agung, buku itu dipasok ke toko buku pada Sabtu (26/12) sekitar pukul 13.00 WIB. Belum sampai pukul 15.00 WIB, buku-buku tersebut sudah habis terjual. Ia menambahkan bahwa orang yang membeli buku itu sebelumnya menanyakan terlebih dulu ketersediaan buku ke Gunung Agung. Setelah tahu bahwa buku datang, mereka langsung membelinya *(www.detiknews.com, 29/12/2009).*

Sementara itu banyak pembeli yang mencari buku serupa di Toko Buku Gunung Agung Jalan Kwitang 6, Jakarta. Sayangnya mereka harus kecewa, karena buku tersebut tidak ditemukan. Menurut Anun, supervisor Toko Buku Gunung Agung, buku yang mengupas dugaan korupsi di lingkaran Istana tersebut belum sempat masuk toko. "Buku itu belum sempat sampai ke Kwitang 6 padahal di sini pusatnya. Tapi masuk dulu ke Kwitang 38, padahal seharusnya ke Kwitang 6 dulu," tegasnya *(www.okezone.com, Minggu 27/12/2009).*

KOMNAS HAM akhirnya menanggapi sikap jaringan toko buku Gramedia yang dinilai tidak berani menjual buku Membongkar Gurita Cikeas.

1. Secara khusus Komnas HAM menyesalkan sikap jaringan Toko Buku Gramedia yang tidak berani menjual buku karangan George Junus Aditjondro meskipun belum ada instruksi "tarik" dari kejaksaan. "Jika hal itu dilakukan, berarti merupakan bentuk penghalangan terhadap masyarakat untuk mendapatkan informasi," kata Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim. Menurut Ifdhal, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi diatur oleh konstitusi. "Kalau semua toko buku melakukan hal yang sama, akan menghalangi kemajuan

dan menciptakan kebuntuan suatu peradaban," tegasnya. Sikap tidak menjual buku tersebut juga dianggap merugikan George sebagai penulis buku. Menurut Ifdhal, pelarangan peredarannya bukanlah jalan yang terbaik. Ia mengusulkan agar pihak-pihak terkait bisa membuat buku tandingan (www.jakartapress.com).

2. Selasa 29 Desember 2009, Komisioner Komnas HAM Yoseph Adi Prasetyo (Stanley) tidak menemukan buku tersebut di Gramedia Matraman dan Grand Indonesia. Menurut Stanley, pengelola Gramedia menyatakan bahwa pihaknya menarik dan mengembalikan buku tersebut ke distributor karena buku tersebut menimbulkan kontroversi sehingga perlu dipelajari *(www.jakartapress.com).*

Berikut ini adalah kutipan pemberitaan terkait sikap KOMNAS HAM terhadap gonjang-ganjing instruksi pusat jaringan Gramedia kepada toko bukunya untuk tidak mengedarkan buku MGC.

Komnas HAM Datangi Gramedia, Klarifikasi Terhambatnya Peredaran Buku

Anggota Komnas HAM Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan Yosep Adi Prasetyo (Stanley) mendatangi toko buku Gramedia, Jl Matraman Raya, Jakarta Timur. Dia ingin mengklarifikasi atas terhambatnya peredaran buku 'Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century' karya George Junus Aditjondro. Dalam sidak, Yosep berjalan dan melihat-melihat ke setiap sudut toko buku raksasa itu untuk mencari buku tersebut. Namun buku seharga Rp 36.000 (red) itu tidak juga didapatnya. "Kami dapat laporan dari penerbit, mereka katakan minggu lalu ada hambatan distribusi karena toko besar seperti Gramedia batal memesan. Ada juga yang menarik buku tersebut karena berhubungan dengan Cikeas," ujar Yosep, Selasa (29/12). Yosep berharap, buku setebal 183 halaman itu tidak dilarang beredar. Dia juga berharap masyarakat diberi kebebasan untuk menilai dan membaca buku itu. "Kami ingin ruang publik diberikan. Jangan sampai buku seperti ini dilarang. Ini sama saja mundur seperti Orba," kata dia. Yosep mengatakan, dari info yang diperolehnya, buku itu belum didistribusikan ke Gramedia. Dia mengaku, ada kebijakan agar buku itu tidak diedarkan terlebih dulu. "Memang buku ini belum didistribusi. Ada kebijakan dari pusat untuk di Gramedia Matraman buku ini tidak diedarkan dulu," ujar Yosep. Rencananya setelah ke Gramedia Matraman, Yosep akan mendatangi Toko Gunung

Agung di Kwitang, Jakarta Pusat. Dari Kwitang, Yosep akan bertandang ke Gramedia Grand Indonesia. Kunjungan Yosep kali ini sempat membuat pengunjung bertanya-tanya. Sebab meski seorang diri, Yosep didampingi 20-an wartawan, termasuk kamera yang menyorot terang. Yosep mengitari toko tanpa didampingi pejabat toko buku Gramedia Matraman.

(www.detiknews.com, 29/12/2009)

C. REAKSI SEPUTAR PENERBITAN BUKU *MEMBONGKAR GURITA CIKEAS*

1. PRESIDEN PRIHATIN ATAS TERBITNYA BUKU *MEMBONGKAR GURITA CIKEAS*

Dalam kesempatan wawancara tanggal 26 Desember 2009 Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha di kediaman SBY di Cikeas menyatakan bahwa presiden belum bereaksi dengan kemunculan buku tersebut. Namun dijelaskan lebih lanjut bahwa di dalam buku disebutkan fakta-fakta yang sepertinya tidak akurat dan tidak mengandung kebenaran hakiki. "Ini yang diprihatinkan Presiden," jelasnya.

Presiden masih mempelajari dan mendalami isi buku tersebut yang memang menuding keterlibatannya dan keluarga dalam kasus Bank Century. Selain itu penulis, George Junus Aditjondro, juga membeberkan bahwa yayasan-yayasan yang dikelola oleh keluarga Cikeas disebutkan sebagai penggalang dana kampanye baik untuk pemilu legislatif maupun ketika pemilihan presiden. Yayasan-yayasan tersebut adalah Majelis Dzikir Nurussalam, Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian, Yayasan Puri Cikeas, dan Yayasan Mutu Manikam.

Julian menambahkan bahwa belum ada rencana Presiden untuk menempuh jalur hukum karena tidak ada kekhawatiran mengenai isi buku tersebut. Namun ia menegaskan "Karena buku itu telah dirilis dan dipublikasikan di publik, maka yang akan diminta nanti pertanggungjawabannya adalah sejauh mana keotentikan, validitas data, dan kalau perlu sampai proses apa metodologi yang digunakan sehingga Pak Aditjondro sampai pada kesimpulan yang disampaikan di buku tersebut" *(www.tvone.co.id, 27/12/2009)*.

Berikut ini adalah salah satu pemberitaan media *online* yang sempat terangkum mengenai pendapat Presiden SBY ketika ia menghadiri perayaan natal nasional bersama umat Kristiani di Plenary Hall, Jakarta Convention Center, Minggu 27 Desember 2009. Banyak yang menganggap bahwa sambutan ini secara implisit juga mengarah dan menanggapi pemberitaan yang muncul terkait isi buku *Membongkar Gurita Cikeas* yang dinilai memojokkan SBY dan keluarganya:

Presiden Prihatin Munculnya Perilaku Fitnah

Selasa, 29 Desember 2009

Jakarta, (APIndonesia.Com). Dalam sambutan pada Perayaan Natal Bersama umat Kristiani tingkat nasional di Plenary Hall, Jakarta Convention Centre, Minggu (27/12) malam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku prihatin atas sejumlah fenomena sosial dan politik yang muncul akhir-akhir ini, yang dinilai tidak sehat dan dapat merusak sendi-sendi kehidupan.

"Munculnya sejumlah tabiat dan perilaku baru yang didasarkan pada fitnah, kebohongan dan fiksi daripada fakta dan kebenaran," kata SBY. Di sejumlah tempat di tanah air juga muncul perilaku kasar dan bernuansa kekerasan yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat dalam mengekspresikan hak dan kebebasannya. "Apa yang saya prihatinkan adalah semua tabiat itu telah melampaui batas kepatutan yang dapat diterima oleh dasar-dasar moral, etika, dan budi pekerti yang semuanya menjadi ajaran utama semua agama. Jika hal demikian kita biarkan, tentu akan mengganggu dan melemahkan pilar-pilar penting dari tata kehidupan masyarakat yang baik (*good society*) dan peradaban bangsa yang unggul dan mulia (*great civilization*)," terang SBY. "Sebaliknya, kehidupan sosial dan politik kita akan digantikan nilai dan tabiat buruk yang penuh prasangka, kebencian dan permusuhan. Lebih lanjut, jika hal-hal negatif begini terus berkembang, kehidupan masyarakat kita akan menjadi tidak tentram. Kehidupan bangsa akan penuh dengan konflik dan kegaduhan, dan demokrasi serta politik pun akan tercoreng karena akan tercabut dari etika dan nilai-nilai luhur bangsa kita," ujar SBY.

Presiden mengajak seluruh bangsa bersama-sama menghentikan tabiat tidak terpuji ini dengan menerapkan tata krama yang mencerminkan kehidupan bermasyarakat yang baik dan peradaban unggul yang sekaligus selaras dengan anjuran dan ajaran mulia semua agama. "Mari kita jauhkan sikap dan perilaku yang bertentangan dengan ajaran universal agama-agama yang pada hakekatnya menjunjung tinggi kebenaran, keadilan

dan kebertanggung-jawaban. Bersama-sama mari kita serukan penolakan terhadap fitnah, kebohongan dan perilaku kasar yang melampaui kepatutannya," ajak SBY.

Dalam kaitan ini semua, selaku Kepala Negara, Presiden SBY mendorong agar para pemuka agama senantiasa mengambil peran yang konstruktif. Para pemuka agama juga sungguh diharapkan tetap dekat dengan umat seraya terus membimbing dan mengarahkan agar nilai-nilai luhur agama dan moral tetap dipedomani dan dijalankan. "Pemuka agama adalah sosok yang tepat untuk memberikan tauladan kemuliaan dan keagungan dalam berpikir, bertutur, bersikap dan bertindak," lanjutnya. Presiden juga mengedepankan hal penting dan mendasar, yaitu tentang etika, akhlak, dan budi pekerti sebagai umat manusia, tentang karakter dan moral sebagai masyarakat, serta tentang peradaban sebagai bangsa. "Di berbagai kesempatan dan forum telah sering saya sampaikan pentingnya kita membangun tata kehidupan masyarakat yang baik (*good society*) dan peradaban bangsa yang unggul dan mulia (*great civilization*)," kata Presiden SBY.

(www.apindonesia.com)

2. PANSUS JADIKAN KARYA GEORGE JUNUS ADITJONDRO SEBAGAI REFERENSI PENGUNGKAPAN DANA TALANGAN KE CENTURY

Buku yang dinilai banyak kalangan sebatas usaha marketing untuk mendongkrak penjualan ternyata malah mendapat respon positif di kalangan wakil rakyat yang bekerja keras mengungkap skandal korupsi. Mereka yang sedang mencari pintu untuk menguak rahasia dalam tubuh Century seperti mendapat pencerahan dan makin tergerak untuk segera menuntaskan skandal yang melibatkan beberapa petinggi negara ini.

"Jadi bahan referensi," ujar Bambang Soesatyo, Anggota Pansus Hak Angket Century DPR. Anggota Pansus Century ini sempat menyatakan bahwa sejak awal nama-nama yang disebutkan dalam buku Gurita Cikeas memang sudah menjadi bidikan Pansus untuk dimintai keterangan. Menurutnya apa yang telah ditulis oleh George Junus Aditjondro memang sudah sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Meskipun analisis George tidak seluruhnya benar, namun tidak bisa dikatakan bahwa seluruhnya salah. "Untuk ukuran peneliti, itu sudah sangat akurat dan berdasarkan fakta lapangan yang ada,"

ujarnya lagi. Bahkan Bambang Soesatyo menyarankan agar pihak-pihak yang disebutkan dalam buku mengklarifikasi data yang ada.

Pansus Hak Angket Century DPR memang telah memborong 40 eksemplar dari koleganya yang ada di Yogyakarta pada Jumat 25 Desember 2009 dan menjadikan buku ini sebagai salah satu referensi dalam mengungkap skandal Century (*www.detiknews.com*).

3. PERTANYAAN SEPUTAR METODOLOGI PENELITIAN DAN PENGAMBILAN KESIMPULAN



(http://suaramerdeka.com)

Prof. Tjipta Lesmana, salah satu pengkritik metodologi penelitian MGC

Geger pemberitaan buku bersampul gurita bermahkota ini sampai juga di kalangan akademisi. Prof. Tjipta Lesmana merupakan salah satu peneliti yang sering muncul di televisi nasional. Ia mengkritik metodologi yang dipakai penulis dalam buku ini ketika mengambil kesimpulan yang dinilai menyudutkan nama-nama besar termasuk di antaranya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Versi Tjipta: Sebuah hasil karya ilmiah yang dibuat oleh seorang/sekelompok akademisi haruslah sesuai dengan prosedur penelitian standar keilmuan,berupa metodologi penelitian,sumber data,validitas asumsi, dsb.

Versi George Junus: Penelitian yang dilakukannya adalah bersifat kualitatif,dengan penelitian kepustakaan dan sumber-sumber yang tersedia lewat berita surat kabar, internet, dan wawancara. Lebih jauh dijelaskan oleh George bahwa fokus penelitiannya adalah melihat sistem oligarki SBY.

(seperti dikutip dalam wawancara di berbagai stasiun televisi swasta dan dituliskan kembali dalam http://www.mail-archive.com/forum-pembaca-kompas@yahoogroups.com)

Kedua pendapat yang berseberangan ini akhirnya mencapai titik didih ketika dalam satu kesempatan wawancara yang disiarkan secara nasional, Prof Tjipta Lesmana mengeluarkan dompet dengan maksud sebagai taruhan bahwa pendapatnyalah yang benar. Tindakan yang dianggap tidak mencerminkan seorang intelektual inilah yang kemudian mengusik para doktor dari UI untuk memfasilitasi acara debat dan bedah kasus metodologi.

Di bawah ini bisa Anda temukan berita selengkapnya mengenai perseteruan metodologi dalam buku *Membongkar Gurita Cikeas.*

Kelompok Dosen Nilai Buku George Ilmiah

Pertentangan tentang buku *'Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century'* karya George Aditjondro mulai memasuki ranah akademis. Setelah sebelumnya, ada sejumlah peneliti yang menilai buku itu tidak ilmiah, kini kalangan dosen berpendapat sebaliknya. "Unsur ilmiah itu kalau dia tidak mencantumkan sumber lain. Ini dia masukkan referensinya semua," kata pengajar Ilmu Politik UI, Boni Hargens. Hal tersebut disampaikan bersama 'kelompok dosen progresif Indonesia untuk pengungkapan skandal Century' di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Rabu (31/12). Boni datang bersama dosen Fisip Unair Airlangga Pribadi, dosen Fisip Unas Rinjani, dan dosen Fisip Universitas Moestopo, Usmar Ismail. Keempatnya mewakili 16 anggota dosen lain yang tersebar di universitas di seluruh Indonesia. Boni menjelaskan, segala sesuatu yang ditulis George sudah memenuhi unsur ilmiah meski memakai data sekunder. Dalam setiap kalimatnya didukung fakta dan data secara objektif. "Kalau ada pelarangan, itu hanya kegerahan dari penguasa saja. Bukan karena tidak ilmiah," lanjutnya. Airlangga menambahkan, data sekunder juga termasuk sumber ilmiah. Lagipula, bukan kali ini saja George menulis kritikan terhadap penguasa.

"Jadi kalau ada tudingan ada yang menggerakkan dia tidak mungkin. Karena selama 3 kali periode presiden semuanya dikritik. Berati objektif," ucapnya. *(www.hariansib.com)*

Rabu, 30/12/2009 17:59 WIB

Membongkar Gurita Cikeas
Para Doktor Tantang Tjipta Lesmana Debat di UI

Laurencius Simanjuntak - detikNews

Jakarta - Para akademisi yang bergelar doktor menantang pengamat komunikasi politik Prof. Tjipta Lesmana untuk berdebat soal metodologi penelitian. Hal ini merespon sikap Tjipta dalam talkshow mengenai buku 'Membongkar Gurita Cikeas' di sebuah stasiun TV swasta semalam.

"Kita akan bedah kasus, metodologi. Kita akan undang para doktor, kita akan berdebat," kata sosilog dari Universitas Indonesia (UI), Thamrin Amal Tamagola.

Hal ini dikatakan Thamrin usai acara peluncuran buku 'Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century' karya George Junus Aditjondro di Doekoen Coffee, Jl Raya Pasar Minggu, Jaksel, Rabu (30/12/2009)

Sebelumnya, dalam acara talkshow, Tjipta Lesmana menantang para doktor dihadirkan untuk membuktikan metodologi yang dipakai George dalam menulis buku tersebut sangat lemah. Tanpa maksud yang jelas, Tjipta juga sempat mempertaruhkan dengan membanting dompetnya di atas meja.

Menurut Thamrin, sikap Tjipta tersebut telah menyudutkan George di depan publik. Oleh karenanya, kata Thamrin, program Komunikasi Politik UI yang dipimpin Effendi Ghazali akan memfasilitasi debat metodologi tersebut.

Keluarkan Dompet

Di tempat yang sama, Effendi Ghazali menyesalkan sikap Tjipta Lesmana yang mengeluarkan dompet tanpa maksud yang jelas. Ia mengaku terkejut seorang intelektual seperti Tjipta bisa melakukan tindakan seperti itu.

"Intelektual nggak biasa banting-banting dompet. Semua intelektual nggak pernah banting dompet. Bandar-bandar, toke-toke, dan pemilik yayasan yang banting dompet," sesal Effendi yang menyatakan belum memastikan kapan debat akan digelar.

(www.detiknews.com)

4. GUGATAN DAN SOMASI

Seperti tergambar dalam bahasan sebelumnya munculnya buku *Membongkar Gurita Cikeas* menghadiahkan pro kontra terhadap

tulisan penulis. Kontra terhadap penulis tidak hanya berupa serangan di ranah *facebook*, demo di jalanan, teror, penyadapan, atau debat. Gugatan dan somasi datang sebagai bentuk lain perlawanan terhadap isi buku di ranah hukum.

Terlihat dalam berbagai kesempatan wawancara dan tatap muka di media televisi, George Junus Aditjondro dan 'lawan-lawannya' bersitegang soal materi buku. Di antara nama-nama yang tercantum dalam buku bersampul gambar gurita ini, muncul nama Ramadhan Pohan sebagai mantan Kepala Jurnal Nasional. Disebutkan bahwa dari group Sampoerna, yang merupakan nasabah terbesar di Bank Century, terdapat kepingan dana Rp 90 miliar yang dilemparkan kepada harian Jurnal Nasional. Jurnal Nasional inilah yang kemudian menjadi kepanjangan lidah politik Presiden SBY.

Bantah Terima Dana Century, Pimred Jurnas Tuding George Cari Sensasi

Fitraya Ramadhanny - detikNews

Jakarta - Buku 'Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century' mengungkap adanya aliran dana Bank Century ke harian Jurnal Nasional lewat group Sampoerna. Pemimpin Redaksi (Pemred) Jurnal Nasional Ramadhan Pohan membantah dan menilai sang penulis, George Junus Aditjondro, mencari sensasi belaka.

"Tidak ada satu rupiah pun dana talangan Bank Century yang masuk ke Jurnas. George hanya cari sensasi," kata Ramadhan kepada detikcom, Senin (28/12/2009).

Menurut Ramadhan, George sama sekali tidak melakukan konfirmasi kepada Jurnas soal tudingan yang dilancarkannya. Bahkan, tambah Ramadhan, tidak ada komunikasi apapun dari George terhadap nama-nama dari pihak Jurnas yang disebut di dalam buku bersampul gambar gurita itu.

"Dulu dia kritis dan percaya metodologi, sekarang dia langsung kutip yang penting cocok dengan pikiran dia," imbuh anggota Komisi I DPR ini.

Ramadhan tidak menyalahkan George yang menggunakan data sekunder dari surat kabar. Namun dia mempermasalahkan bagaimana George mengolah data yang ada. "Kalau dirangkai menjadi sesuatu yang tidak berhubungan, itu permasalahannya," kata dia.

Ramadhan tidak ingin menjawab soal Group Sampoerna yang menjadi penyandang dana Jurnas. Menurut dia yang harus diluruskan adalah tudingan dana Bank Century yang disebutkan George dan merugikan imej Ramadhan dan kawan-kawan.

"Sudah banyak respons dari Partai Demokrat, LKBN Antara dan ini juga cara saya merespons. Banyak dorongan teman-teman ke arah tuntutan hukum, tapi itu masih wacana. Yang jelas saya tidak mau pakai UU ITE buat George," kata Ramadhan.

George dalam bukunya menyebutkan group Sampoerna adalah nasabah terbesar di Bank Century. Dari Sampoerna, ada dana Rp 90 miliar yang disuntikkan untuk harian Jurnal Nasional yang kemudian menjadi corong politik Presiden SBY.

(www.detiknews.com)

Instansi yang juga disebutkan dalam buku George adalah PERUM LKBN ANTARA. Kantor berita nasional ini dituding mengalihkan sebagian dana PSO ANTARA untuk Bravo Media Centre. Aditjondro menyebutkan dalam bukunya, halaman 29-31, bahwa separuh dana PSO LKBN ANTARA sejumlah Rp 40,6 miliar mengalir ke Bravo Media Center (BMC). BMC merupakan salah satu tim kampanye SBY-Boediono. Perum LKBN ANTARA akhirnya menyiapkan langkah hukum somasi kepada penulis George Aditjondro terkait informasi yang mereka nilai merupakan kebohongan dan menyesatkan. Dirut Perum LKBN ANTARA, Dr Ahmad Mukhlis Yusuf, meminta penulis segera merevisi buku tersebut dan meminta maaf.

Berikut ini adalah pembelaan George mengenai sumber dan validitas informasi terkait aliran dana ANTARA untuk BMC yang disampaikan dalam buku *Membongkar Gurita Cikeas* saat dihubungi Minggu 27 Desember 2009.

George Aditjondro Siap Hadapi Gugatan

Minggu, 27 Desember 2009 | 20:30 WIB

TEMPO *Interaktif*, Jakarta - Penulis buku *Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century*, George Junus Aditjondro, menyatakan siap menghadapi rencana gugatan Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional Antara Mukhlis Yusuf.

Ia memiliki sumber dari kalangan internal Antara yang tak dapat disebutkan. "Saya harus melindungi sumber saya, saya siap dipenjara," kata George saat dihubungi, Ahad (27/12).

Menurut dia, rencana gugatan tersebut justru akan memperkeruh situasi internal di LKBN Antara terkait anggaran *Public Service Obligation* (PSO) ke Bravo Media Center. Sebab, pengalihan PSO tersebut sudah menimbulkan keresahan di internal.

Dalam bukunya, George menyebut PSO LKBN Antara mengalir ke Bravo Media Center salah satu tim kampanye SBY-Boediono senilai Rp 20,3 miliar. Menurut George, seharusnya pihak Antara yang keberatan adalah Direktur Komersial dan IT Rully Ch Iswahyudi.

Rully selain menjabat sebagai Direktur Antara juga merupakan tim sukses yang ikut mengelola Bravo Media Center. Dari Rully kemungkinan dana tersebut dapat mengalir.

George menambahkan, ia sudah menduga akan adanya respons gugatan kepadanya sebelum meluncurkan buku tersebut. Pihaknya siap menghadapi gugatan termasuk dari Cikeas. Gugatan itu justru memungkinkan pihak Cikeas membuktikan aliran dana siluman yang dipertanyakan dalam pemilihan umum presiden.

Ia mencontohkan, Bank BTPN mayoritas sahamnya dimiliki oleh asing tetapi menyalurkan Rp 3 miliar kepada tim sukses SBY-Boediono. Hal itu jelas melanggar aturan demikian halnya para pejabat BUMN yang merangkap dalam tim sukses. "Kemenangan Demokrat harus dipertanyakan, kok bisa mengajukan calon presiden," katanya.

Dalam perkembangannya, pihak ANTARA akhirnya mensomasi George melalui pengacaranya, Dedy Kurniadi & Co., seperti tertulis dalam rilis yang diterima detikcom, Selasa 29 Desember 2009. Berikut petikan bunyi somasi tersebut:

"Saudara George dalam waktu 3x24 jam sejak diterimanya surat ini, pertama, mencabut dan menghapus seluruh pernyataan dan informasi tentang klien kami tersebut. Kedua, meminta maaf kepada klien kami yang diumumkan pada berbagai media cetak dan elektronik secara nasional."

Sebelumnya, Dirut Perum LKBI ANTARA sempat mengatakan pada media bahwa George telah mengakui adanya kekeliruan pada tuduhan pengalihan PSO ANTARA ke BMC. Mereka pun menyambut baik niat penulis untuk meluruskan bukunya.

Namun Mukhlis Yusuf juga tetap memberlakukan somasi demi memastikan revisi buku tersebut benar-benar dilakukan. "Langkah hukum masih terbuka. Hanya jika Aditjondro telah merevisi buku itu, mengaku keliru, dan meminta maaf, maka kami akan cabut kembali somasi tersebut" *(www.sripoku.com, 30/12/2009).*

Terkait rencana somasi ANTARA terhadap George, media online TVOne (28/12) sempat memberitakannya sebagai berikut.

LKBN ANTARA segera Somasi Penulis Buku "Gurita Cikeas"

Senin, 28 Desember 2009 14:09 WIB

Jakarta, (tvOne)

Perum LKBN Antara menyiapkan langkah hukum somasi kepada George Aditjondro yang dalam buku "Membongkar Gurita Cikeas di Balik Kasus Bank Century" menuding kantor berita nasional itu mengalihkan sebagian dana PSO Antara untuk Bravo Media Centre. "Itu sama sekali tidak benar, karena secara substansi dan teknis tidak mungkin pengalihan dana itu dilakukan. Kami minta Aditjondro merevisi buku itu dan meminta maaf karena telah menyebarkan informasi bohong dan menyesatkan. Kalau tidak, kami akan ambil langkah hukum somasi," kata Dirut Perum LKBN Antara Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (28/12).

Direksi LKBN Antara sudah membaca dan membahas substansi buku tersebut, khususnya yang terkait dalam tuduhan pemanfaatan PSO LKBN Antara untuk Bravo Media Center. Aditjondro menulis bahwa separuh dari dana PSO LKBN Antara yang berjumlah Rp 40,6 miliar mengalir ke Bravo Media Center, salah satu tim kampanye SBY-Boediono.

Direksi berkesimpulan informasi tiga halaman (hal 29-31) tersebut tidak ada kebenarannya alias fitnah belaka. "Tidak ada uang satu sen pun yang dialihkan ke Bravo Media Center. Kalau uang miliaran rupiah itu betul dialihkan, wartawan dan karyawan Antara tidak gajian," katanya.

Untuk itu, katanya, bagian hukum BUMN itu sedang menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan termasuk langkah hukum somasi. Antara menuntut Aditjondro minta maaf dan merevisi bukunya yang akan diluncurkan (*launching*) pada akhir tahun ini.

Mukhlis menjelaskan, mekanisme pencairan dana PSO ANTARA dilakukan sebagai pergantian biaya (*reimbursement*) atas sebagian dana operasianal ANTARA terhadap tema-tema liputan yang disepakati dengan penyelenggara negara setiap tahun. "Jadi, penggunaan dana PSO ANTARA tidak mungkin dialihkan," katanya.

Menurut Mukhlis, pada tahun 2008, LKBN ANTARA menyepakati delapan tema pemberitaan dengan Depkominfo untuk diliput dan disiarkan ANTARA, yakni; seratus tahun kebangkitan nasional, pengembangan potensi ekonomi dan budaya, Program MDGs, sosialisasi kegiatan kenegaraan, pemanasan global, *civil journalism*, dan sosialisasi kebijakan publik.

Selain delapan tema PSO tersebut, ANTARA juga melakukan liputan untuk tujuan komersial yang disiarkan melalui satelit untuk pelanggan media, portal berita gratis untuk publik dan beberapa platform lain seperti pesan singkat melalui telepon genggam (sms), TV *display* dan portal berita daerah lainnya untuk kepentingan komersial.

Menurutnya, prosedur pencairan anggaran PSO di BUMN, termasuk di LKBN ANTARA sangat ketat. Proses pergantian dana tersebut baru bisa dilakukan setelah kesesuaian antara isi dengan tema berita yang disepakati dan prosedur keuangan diverifikasi secara ketat oleh Depkominfo yang mengacu pada aturan Keuangan Negara. "Jadi, pengalihan tersebut tidak terjadi, dan tidak mungkin dilakukan," demikian Mukhlis menegaskan.

Sudah mengundurkan diri

Mukhlis juga menjelaskan bahwa Direktur Komersial dan IT Rully Ch. Iswahyudi tidak pernah terlibat dalam pengelolaan Bravo Media Center. Sedangkan dalam keterkaitannya sebagai Tim Sukses SBY-Boediono, Rully sudah mengundurkan diri sebelum pelaksanaan kampanye Pilpres 2009. Hal itu sebagaimana tertuang dalam notulen Rapat Direksi pada 9 Juni 2009.

Dalam notulen tersebut dijelaskan bahwa rapat mendengar penjelasan Direktur Komersial dan IT yang sedang cuti, dan secara khusus dipanggil mengikuti rapat guna diberitahukan hasil rapat dengan Dewan Pengawas yang meminta direksi menindaklanjuti status Direktur Komersial dan IT dalam tim sukses calon Presiden SBY-Boediono.

Direktur Komersial dan TI menyampaikan, belum mengetahui statusnya secara resmi di tim Kampanye SBY-Boediono, dan akan menanyakannya kepada Ketua Tim, Bapak Hatta Rajasa, setelah itu akan menentukan sikap, apakah mundur dari Tim Kampanye SBY-Boediono atau mundur dari Direktur Komersial dan TI Perum LKBN Antara.

Setelah menghubungi Bapak Hatta Rajasa, Direktur Komersial dan TI memastikan bahwa ia terdaftar di tim kampanye SBY-Boediono, dan memutuskan akan mundur dari Tim Kampanye SBY-Boediono tersebut. Surat pengunduran dirinya akan dibuat segera, ditujukan kepada Ketua Tim Kampanye SBY-Boediono.

> Ketua Serikat Pekerja ANTARA, Theo Yusuf, yang juga wartawan senior ANTARA menjelaskan bahwa tidak benar ada keresahan di kalangan wartawan seperti dinyatakan George Aditjondro dalam bukunya."Karyawan dan wartawan mendukung langkah pembenahan manajemen yang sedang dilakukan Direksi sejak tahun 2007, dalam penataan SDM, penguatan sistem dan pembenahan bisnis perusahaaan," Theo menambahkan. Theo juga menyatakan, Serikat Pekerja ANTARA bersama Direksi telah menyepakati Peraturan Kerja Bersama (PKB) yang telah ditandatangani Direksi dan serikat pekarja pada 10 November 2008. Penandatanganan PKB ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari kedua belah pihak untuk menumbuhkan hubungan kerja industrial yang baik.
>
> *(www.tvone.co.id, 28/12/2009)*

Adalah Jero Wacik yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Dua, yang namanya juga tercantum dalam buku, meminta George segera merevisi isi buku dan memberikan pernyataan maaf. Ia menyatakan kekecewaan atas pemuatan namanya tanpa klarifikasi terlebih dahulu dalam buku *Membongkar Gurita Cikeas*, "Saya baru kenal Bapak (Aditjondro), sekarang saya kecewa (karena) begitu cepat memberi *image* seperti itu. Di kampung saya semua marah itu. Anda (George Aditjondro_red) *kan* sudah menyebutkan berkali-kali menteri pariwisata. *You* harus terbuka dan minta maaf. Saya *clear* orangnya, tapi kalau mau berhadap-hadapan ya silahkan," ujarnya dalam sebuah *talkshow* bersama penulis, di salah satu televisi swasta, Selasa, 29 Desember 2009 malam.



(http://media.vivanews.com)

Jero Wacik, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Dalam buku karya terbaru George Junus Aditjondro ini, Jero Wacik memang dikaitkan dengan penggalangan dana ke tim pemenangan Presiden SBY. Dana tersebut diduga mengalir dari Yayasan Puri Cikeas yang dipimpinnya serta Yayasan Sulam milik istrinya. Ia membantah semua tuduhan tersebut dengan menjelaskan bahwa penggagas Yayasan Puri Cikeas bukanlah SBY melainkan Soerato, pemilik Puri Cikeas Indah. Yayasan ini bergerak di bidang sosial untuk membantu kaum fakir miskin dan korban bencana alam. Sementara itu, penjelasan lain ia ungkapkan terkait Yayasan Sulam, "Kebetulan saja Ibu Ani dan Ibu Yusuf Kalla yang meresmikan yayasan tersebut."

Nama Yayasan Majelis Dzikir Nurussalam SBY juga dimunculkan sebagai bagian dari gurita cikeas 'dalam buku karangan George. Pada halaman 37 buku yang menyentuh keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini, penulis memancing pembaca dengan mempertanyakan biaya yang begitu besar untuk memberangkatkan lima rombongan ulama umroh sejumlah 50 orang setiap kloternya. Disinyalir ada sponsor khusus yang terlibat dalam kegiatan pendanaan umroh melalui kedua bendahara yayasan yang juga merupakan pengusaha kelas kakap (Hartanto dan Aziz Mochdar).

Selain itu, penulis juga membuka memori para pembacanya akan kemungkinan penggunaan anggaran negara (yang merupakan uang rakyat) ke dalam kegiatan Yayasan Majelis Dzikir Nurussalam. Misalnya untuk acara dzikir dan doa di Masjid Baiturrahim di Kompleks Istana Negara plus makan malam gratis ribuan jemaat dzikir pada akhir tahun 2007 dan 2008.

Sementara itu Menko Perekonomian Hatta Rajasa saat dikonfirmasi mengenai hal ini di kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (30/12/2009) membantah jika Majelis Dzikir Nurussalam SBY digunakan sebagai salah satu "kantong amal" dalam kampanye Pemilihan Presiden 2009 silam. Bahkan, pelaksanaan umroh para ulama tersebut juga atas inisiatif para ulama dan tidak ada permintaan dari Majelis Dzikir SBY. "Dosa kalau kita mencurigai. Orang itu kyai semua," ujar Hatta.

Pengacara Majelis Dzikir SBY, Yan Juanda Saputra, menjelaskan bahwa sebenarnya pihaknya tidak menutup diri untuk data yang diperlukan untuk karya-karya ilmiah. Namun tuduhan George tersebut dianggapnya sudah masuk ranah pidana karena tanpa dasar dan tanpa *recheck* terlebih dahulu. Untuk mencari kebenaran, Yan bahkan siap berdebat dengan Aditjondro. "Ini semua agar persoalan menjadi jelas dan tidak menjadi isu murahan dan menyesatkan umat," jelasnya *(Pos Kota, 1 Januari 2010).*

Di bawah ini adalah potret tanggapan Yayasan Majelis Dzikir Nurussalam hasil penelusuran tim media www. rakyatmerdeka.com.

WAWANCARA

Jumat, 01 Januari 2010, 00:07:30 WIB

Kami Akan Ajukan Somasi Karena Jamaah Tak Terima

Di dalam buku "Gurita Cikeas" karya George Junus Aditjondro, Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam disebut sebagai salah satu yayasan yang berperan dalam memasok dana untuk keperluan kampanye di pilpres lalu.

Selain Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam, Yayasan Puri Cikeas, Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian, Yayasan Mutu Manikam Nusantara,

Yayasan Batik Indonesia, dan Yayasan Sulam Indonesia juga ikut disebut dalam buku tersebut.

Majelis Dzikir SBY Nurussalam (MDSBYN) juga disebut-sebut mensponsori biaya ibadah umrah bagi lima rombongan ulama di mana setiap orang menghabiskan biaya 1.000 real (setara dengan Rp 625 juta dengan kurs Rp 2.500 per real) guna memobilisir dukungan para ulama untuk SBY.

Benarkah Majelis Dzikir SBY itu turut menggalang dana dan dukungan kepada SBY agar menang di pilpres? Bagaimana reaksi pengurus majelis ini mengenai isi buku George Aditjondro? Apakah mereka akan menggugat? Berikut wawancara Rakyat Merdeka dengan Ketua Umum Majelis Dzikir SBY Nurussalam, Harris Thahir.

Dalam buku "Gurita Cikeas, Majelis Dzikir SBY Nurussalam (MDSBYN) disebut-sebut sebagai yayasan yang ikut menyumbang dana kampanye bagi SBY di Pilpres 2009 lalu. Tanggapan Anda? Memang, nama Majelis Dzikir SBY Nurussalam ini disebut-sebut dalam buku itu. Tapi setelah saya baca ternyata hanya judulnya saja, tidak ada isinya. Secara umum, buku ini sih nggak berdasar dan hanya berisi klipingan media massa saja. Tapi saya tegaskan, semua yang ditulis dalam buku ini telah menjelekkan nama dan citra Majelis Dzikir ini.

Benarkah ada dana yang mengalir dari Majelis Dzikir untuk keperluan kampanye SBY pada saat pilpres? Nggak ada, kita tidak kasih dana apa-apa. Sebaliknya juga sama, SBY juga nggak pernah memberikan apa-apa pada kita.

Lalu, dari mana sumber dana yayasan ini? Dana Majelis Dzikir SBY Nurussalam adalah dana tersendiri yang kita pergunakan untuk umat. Yayasan kerap menggelar kegiatan sosial keagamaan di 33 provinsi, seperti menyantuni anak yatim, memberi beasiswa, menyantuni korban bencana alam, dan memberi bantuan ke sejumlah pondok pesantren.

Benarkah Majelis Dzikir ini menfasilitasi lima rombongan ulama yang semuanya berjumlah 250 orang untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah dimana setiap orang mendapat dana 1.000 real? Dalam buku George dana untuk keperluan itu diduga berasal dari APBN. Benarkah? Sejak tahun 1998, kami rutin setiap tahun memberangkatkan ulama untuk pergi umrah dengan uang kami sendiri. Jadi itu nggak dadakan hanya untuk mencari dukungan pada saat pemilu. Biaya umrah itu ditanggung sejumlah anggota. Sedangkan ulama yang berkecukupan harus menanggung sendiri biayanya walaupun dia berangkat bersama ulama yang mendapat fasilitas. Jadi, kesimpulan yang ada dalam buku George tidak benar.

Siapa saja ulama yang bergabung dengan Majelis Dzikir SBY Nurussalam? Kiai, ulama, ustadz, ustadzah dan habib yang bergabung di Majelis Dzikir berasal dari semua golongan dan dari partai manapun. Masing-masing tidak meninggalkan identitas organisasinya. Tapi jika ada acara Majelis Dzikir, mereka bergabung dan setelah itu kembali ke organisasinya masing-masing.

Namun harap diingat, kehadiran mereka dalam kegiatan Majelis Dzikir SBY adalah atas nama pribadi. Jika akhirnya mereka membawa jamaahnya itu adalah urusan mereka. Tapi yang terjadi adalah seperti itu.

Lalu apa peran Majelis Dzikir SBY bagi SBY. Sebab, majelis ini memakai namanya? Kami mendampingi SBY. Kami tidak lupa memberi kritik apabila beliau berbuat salah, serta mendukung apabila benar demi kemajuan rakyat, bangsa dan negara.

Apakah Anda kecewa terhadap George yang mencoba mengait-kaitkan Majelis Dzikir SBY dengan upaya penggalangan dana dan dukungan untuk memenangkan pilpres? Saya akan kejar dia ke manapun, karena dia sudah bawa-bawa nama Majelis. Saya ingatkan, jangan masuk-masukkan Majelis Dzikir ini dalam urusan politik. Majelis Dzikir SBY Nurussalam ini bukan sebuah lembaga yang sengaja dibentuk guna memenangkan SBY. Kehadiran Majelis Dzikir ini sebenarnya adalah bentuk representasi keislaman SBY, jauh sebelum dirinya menjadi presiden.

Perlu diketahui, keberpihakan dan kepedulian SBY terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan semisal zikir bukan hanya pada saat ini. Tapi sudah ada sejak beliau masih muda. Tapi, waktu itu sifatnya belum berbentuk kelembagaan. Majelis Dzikir ini dibentuk dari pengajian di Cikeas yang dimulai dengan 15 orang termasuk saya, Pak Kurdi (Kurdi Mustofa) dan Haji Ma'mun.' Dan secara resmi baru dilembagakan pada 2004.

Apakah Majelis Dzikir SBY akan mengajukan gugatan terhadap George? Kami akan mengajukan somasi terhadap George karena telah melakukan pencemaran nama baik. Kenapa kita mengajukan hal itu? Sebab kalau kita tidak mengajukan somasi, umat dan jamaah Majelis Dzikir tidak akan terima. Seolah-olah kami memang benar menerima dana. Ini penting dan harus diingatkan.

(www.rakyatmerdeka.co.id, 1/01/2010)

Sebenarnya sebelum buku diluncurkan, penulis buku *Membongkar Gurita Cikeas* dalam *pre-launching* di markas Galangpress (23/12) menyatakan dirinya siap digugat oleh siapapun. "Saya siap hadapi,

sudah ada *lawyer* dari Galangpress (penerbit buku)," tegas George (www.detik.com, 27/12/2009).

Menanggapi langkah sejumlah pihak yang bersiap menggugat, ia memiliki pandangan bahwa langkah tersebut kurang tepat. Menurut George, buku seharusnya dilawan dengan rel yang sama, yakni dengan buku. George pun siap beradu argumentasi, informasi, dan data apabila ada pihak-pihak yang ingin menantangnya menyoal beberapa pelanggaran dalam pemilihan presiden, yang akhirnya memenangkan Susilo Bambang Yudhoyono dengan angka pemilih fantastis.

D. WARNA-WARNI PERJALANAN GURITA CIKEAS

1. BUKU BAJAKAN, HARGA MELANGIT, HINGGA BUKU ASLI TURUN KE JALAN



(http://surabaya.detik.com)

Buku MGC 'turun' ke jalan-jalan.

Bukan Indonesia jika tidak ada bajak-membajak. Sepertinya sudah merupakan pemandangan yang lazim terjadi di negeri ini setiap barang yang laku keras, dalam kurun waktu singkat bukan hanya di-atm (amati, tiru, dan modifikasi) namun dijiplak alias dibajak. Fenomena inipun melanda buku *Membongkar Gurita Cikeas.*

Mengutip informasi yang berhasil dihimpun oleh rekan-rekan penulis dan penerbit yang ada di Jakarta, buku kontroversial ini sudah memiliki versi bajakannya. "Ini yang saya prihatinkan karena sangat berbahaya, mengingat isinya jauh bertolak belakang. Ini beredar di sekitar Tugu Tani Jakarta sebagaimana informasi yang diterima," kata Direktur Galangpress, Julius Felicianus, Selasa (29/12/2009). Dalam kesempatan yang sama, Direktur Galangpress juga menyatakan siap mencetak ulang buku MGC.

Cetakan pertama yang hanya sebanyak empat ribu ekslemplar memungkinkan sekali untuk dibajak karena memang belum bisa mencukupi rasa penasaran masyarakat luas. Di lain sisi, memang hanya sedikit dari oplah pertama yang bisa terserap oleh pasar mengingat terjadi retur buku oleh jaringan toko buku Gramedia. Untuk lengkapnya Anda bisa simak ringkasan berita yang berhasil kami catat berikut ini.

Galangpress: Buku Membongkar Gurita Cikeas Sudah Dibajak

Buku *'Membongkar Gurita Cikeas'* yang beredar di berbagai kota diduga sudah dibajak. Karena itu, masyarakat diimbau untuk berhati-hati jika ingin membeli buku terbitan Galangpress tersebut.

"Saya sudah mendapatkan informasi dari beberapa teman di Jakarta semalam kalau buku tersebut sudah ada versi bajakan," ungkap Direktur Galangpress, Julius Felicianus, kepada wartawan di Yogyakarta, Selasa (29/12). Julius mengaku tidak tahu pelaku dan pengedar buku *'Membongkar Gurita Cikeas'* bajakan tersebut. Yang jelas, sambung dia, penerbit hanya mencetak 4 ribu eksemplar dan sudah didistribusikan melalui jaringan distributor buku.

Julius mengatakan, pemerintah seharusnya segera menarik buku bajakan itu dari peredaran. Bila buku cetakan pertama sudah habis, penerbit siap mencetak kembali buku tersebut. "Berdasarkan laporan dari distributor banyak pihak yang telah memesan di antaranya dari parpol dan perguruan tinggi," katanya.

Salah seorang editor buku di Galangpress, AA Kunto menambahkan, pembajakan buku terbitan Galangpres bukan hanya sekali ini saja. Sebelum nya buku berjudul *"Prabowo Titisan Soeharto"* karya Femi Adi Sumpeno juga pernah dibajak. Buku tersebut ditemukan di Jakarta dan Bandung saat pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) 2009. "Hebatnya buku resmi dari kami hanya dijual di bawah Rp 30 ribu per eksemplar, sedangkan versi bajakan dijual dengan harga Rp 50 ribu per eksemplar, ya laku," kata Kunto. *(www.rri.co.id)*

HARGA MGC MELANGIT

Menghilangnya buku kontroversial seharga Rp 36.000 ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang ingin juga mengambil keuntungan. Bukti yang paling logis dari kondisi ini adalah adanya praktik penjualan buku *Membongkar Gurita Cikeas* hingga mencapai angka ratusan ribu. Angka tersebut mungkin hanyalah satu atau dua cerita khusus, namun yang disayangkan adalah terjadinya jual beli buku asli melebihi harga yang ditetapkan oleh penerbit.

Karena menghilang di pasaran, buku *'Membongkar Gurita Cikeas'* menjadi incaran pemburu buku. Harganya pun ikut melonjak naik. Bahkan, di Gedung DPR, buku kontroversial ini laku dijual hingga Rp 90 ribu dari harga normal yang hanya sebesar Rp 36 ribu. "Saya menjualnya Rp 90 ribu," kata Maulana, penjual buku dan koran yang biasa mangkal di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta. Buku tersebut diperolehnya dari seseorang yang menawarkan langsung kepadanya. Orang tersebut bahkan berjanji akan mencarikan buku itu lagi *(www.detik.com, Rabu 30/12/2009).*

Lain lagi kisah dari seorang teman yang membeberkan uniknya buku yang mencapai titik jual Rp 400 ribu. Teman ini pun lalu menceritakan pada Direktur Galangpress yang akhirnya hanya menanggapi dengan senyuman. Ada pembaca buku yang memang sudah memiliki MGC dan juga telah selesai membacanya. Lalu datang seorang lain yang begitu ingin membaca buku ini. Karena sulit mendapatkannya, lantas ia menanyakan kepada orang tersebut apakah ia sudah selesai membaca. Lalu pembaca pertama mengatakan sudah. Pemburu buku ini lantas menanyakan sekali lagi bisakah buku yang

sudah dibaca itu dibelinya dengan harga 400 ribu. Setuju saja rupanya orang pertama ini dan akhirnya terjadilah transaksi jual beli buku MGC seharga empat ratus ribu rupiah, tunai. Seharga buku import *full color* yang tebalnya mungkin lebih dari 183 halaman. Inilah pernak-pernik seputar langkanya buku *Membongkar Gurita Cikeas.*

Berikut ini pernik menarik di antara lingkaran berita buku *Membongkar Gurita Cikeas* yang makin memanas.

Berburu "Gurita Cikeas"

Submitted by admin on Tue, 12/29/2009 - 00:00

MENGHILANGNYA dari peredaran buku "Membongkar Gurita Cikeas di Balik Skandal Bank Century" tulisan George Junus Aditjondro membuat banyak orang semakin mencari buku tersebut. Meski belum ada pelarangan buku itu untuk diedarkan, menghilangnya buku itu menjadi iklan gratis bagi buku itu sehingga semakin orang penasaran.

Sejak pagi hari banyak kenalan yang menelepon Pelita menanyakan apa sudah mempunyai buku itu. Bahkan di antara kenalan itu minta tolong untuk dicarikan. Pelita yang mendatangi sebuah toko buku di lantai dua Kramatjati Indah, di Kramatjati. Jakarta Timur tidak menemukan buku yang menurut rencana akan resmi dipasarkan akhir bulan ini.

"Belum ada Pak." kata karyawan toko buku itu. Pelita kemudian menuju ke Toko Buku Gramedia di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Di toko buku yang sangat besar itu juga belum ada persediaan buku tersebut. Seorang petugas sekuriti di lantai dua menjawab dengan ramah "belum ada kiriman Pak".

Perburuan". Pelita lanjutkan ke kawasan Senen dan Kwitang di Jakarta Pusat yang dulu terkenal dengan toko-toko bukunya. Belum lagi bertanya lebih lanjut, seorang pria di sebuah kios buku di Jalan Senen Raya bertanya "Mencari buku Cikeas" ya pak? Nggak ada. Pak. Banyak sih yang nyari," ucapnya.

Lantas Pelita menyusun kawasan yang dulu merupakan areal bursa buku bekas dan buku-buku baru di Jalan Kwitang itu. Di sebuah toko buku yang terlihat lebih banyak dan lengkap buku bukunya dibanding kios sebelumnya, kembali Pelita menanyakan tentang buku "Gurita Cikeas" itu.

"Ada Pak. Tapi harganya tinggi," kata pria yang tampil supel dan berlogat dari Sumatera Itu. Ketika Pelita menanyakan keberadaan buku yang dibilang

ada, dan mengenai harganya, pria itu menyatakan bahwa buku tersebut ada di tempat penyimpanannya. Kalau harganya cocok, baru diambil. "Berapa harganya," tanya Pelita. Pria itu menyebutkan Rp 300.000. "Memang mahal pak. Banyak yang nyari dari kemarin." jelasnya.

"Boleh kurang kan?" tanya Pelita. Pria itu menggeleng. Di depan Toko Buku Gunung Agung Kwitang seorang penjual buku-buku secara asongan juga sedang ditanya seseorang pria yang mencari buku serupa. Nggak ada Bang. Dari kemarin juga banyak yang nyari. Malah kemarin ada yang berani bayar sampai Rp 500.000-Red). Padahal harganya paling hanya Rp 55.000," ujarnya.

Ketika Pelita mengemukakan bahwa di kios buku tak jauh dari tempat itu ada yang mengaku punya buku itu dan dipasang harga Rp 300.000. penjual buku itu menyergah "Iya. tapi bukunya nggak ada kan? Pasti bukunya nggak ada!" katanya.

Ternyata, berburu "gurita" di darat, sama sulitnya dengan berburu gurita di jalan.

(www.bataviase.co.id/node/30994)

MGC DIJAJAKAN DI JALAN

Perkembangan yang berhasil kami liput dari berbagai sumber menyebutkan bahwa sejak Minggu 3 Januri 2010 sudah banyak pedagang yang menawarkan buku Membongkar Gurita Cikeas karangan George Junus Aditjondro di jalan-jalan raya. Meskipun itu sah-sah saja, namun menjajakan buku di luar toko buku memang bukanlah jalur distribusi yang normal.

Di kawasan Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta, buku tersebut bisa diperoleh dengan harga Rp 50 ribu padahal harga dari penerbit dibandrol Rp 36 ribu saja. Sedangkan di kota asal penerbit, Yogyakarta, penjaja buku tersebut di jalan bisa ditemukan di seputaran Tugu, Jalan Diponegoro, Yogyakarta dengan rata-rata harga jual variatif dan cenderung lebih dari harga aslinya. Mungkin fenomena menjajakan buku di jalanan disebabkan kurang beraninya toko buku menjual secara terang-terangan walaupun tidak ada larangan apapun terhadap peredaran buku kontroversial ini.

Berikut ini detail pemberitaan turunnya buku *Membongkar Gurita Cikeas*, ke jalan-jalan.

"Gurita Cikeas" Beredar di Pinggir Jalan

***By Budi, okezone.com,* Updated: 1/4/2010 5:21 AM**

Buku *Membongkar Gurita Cikeas: di Balik Kasus Bank Century* yang menuai kontroversi dikabarkan menghilang dari peredaran. Tapi siapa sangka, kini buku tulisan George Junus Aditjondro itu malah bisa ditemui di pinggir-pinggir jalan raya.

JAKARTA - Buku *Membongkar Gurita Cikeas: di Balik Kasus Bank Century* yang menuai kontroversi dikabarkan menghilang dari peredaran. Tapi siapa sangka, kini buku tulisan George Junus Aditjondro itu malah bisa ditemui di pinggir-pinggir jalan raya.

Apakah ini strategi dari pihak penerbit PT Galangpress dan George, agar bukunya eksis di masyarakat?

Okezone yang memantau langsung penjualan buku di salah satu sudut Jalan Gatot Subroto, menemukan penjualan buku ini tak ada hubungannya dengan kedua pihak tersebut, atau bermain mata. Para penjual buku ini bukanlah para penjaja koran atau majalah, mereka mengaku aktivis dari Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera).

Tujuan mereka, hanya ingin memfasilitasi rasa ingin tahu masyarakat terhadap buku kontroversial ini. "Karena buku ini langka di pasaran. Kami hanya memfasilitasi pasar," ujarnya, Senin (4/1/2010).

Salah seorang aktivis, Bayu Agung, ketika berbincang dengan okezone, mengaku berjualan buku ini sejak tanggal 3 Desember kemarin. Namun Bendera, baru bisa menjualnya di dua titik. Yakni, di dekat markas Bendera, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Serta di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, tepatnya di seberang DPR.

Bagi masyarakat yang kebetulan melalui di kedua jalan tersebut, buku yang berisi tulisan George ini, bisa membelinya dengan sedikit mahal. Pasalnya, pihak Bendera menjualnya dengan harga Rp50.000. Padahal, harga yang tertera di buku senilai Rp 35.000.

Bayu mengatakan, pihaknya memang sengaja menjual dengan sedikit mahal. Alasannya, Rp 10.000 untuk mengganti ongkos pembelian ke Yogyakarta, dan Rp 5.000 untuk logistik di posko penjualan buku di Jalan Gatot Subroto.

Buku ini, lanjutnya, diperoleh Bendera dari penerbitnya langsung, namun hanya terbatas. Bendera untuk sementara baru membeli sebanyak 200

eksemplar. Dengan jumlah tersebut, Bendera membaginya untuk dua posko penjualan. Posko di Jalan Diponegoro dan Jalan Gatot Subroto.

Saat ini saja, di posko Jalan Gatot Subroto, buku yang membuat pro dan kontra ini tinggal 50 eksemplar. Dan Bendera akan menjualnya hingga habis.

Jika habis nanti, menurut Bayu, Bendera akan kembali memesan kepada penerbit untuk dijual kembali di Jakarta. Namun berapa banyak jumlahnya, Bayu belum dapat menyebutkan.

"Kami evaluasi dulu," ujarnya.

"Kalau ada yang mau beli banyak hubungan saya saja," ujarnya menawarkan.

2. PENGGALANGAN DUKUNGAN UNTUK GEORGE J. ADITJONDRO MELALUI *FACEBOOK*

Derasnya arus informasi dan pemberitaan tentang Gurita Cikeas dari isu pelarangan, menghilangnya buku, ditambah pro-kontra seputar materi buku, mengundang berbagai komentar dari banyak pengguna internet. Tak cukup hanya *comment*, gelombang dukungan untuk George Junus Aditjondro datang dari para *facebooker*.

Mungkin masih segar di ingatan Anda ketika para *facebooker* dan *blogger* berhasil menggerakkan massa di dunia *cyber* bahkan di dunia nyata (dalam bentuk pengumpulan koin) untuk mendukung Prita Mulyasari dalam kasusnya dengan RS OMNI Internasional. Meskipun tidak diketahui siapa pembuatnya, namun jumlah pendukung George, yang tercatat memberi *vote,* mencapai 2.943 orang hingga Selasa 29 Desember 2009 pukul 03.30 WIB. Sedangkan grup *facebooker* lainnya tak kalah seru mengumpulkan penentang buku kontroversial ini. Hingga jam yang sama, dukungan terhadap grup ini tercatat baru sebanyak 188 orang.

Berikut ini penjelasan selengkapnya.

Selasa, 29/12/2009 03:31 WIB

Pendukung dan Penolak George Aditjondro 'Perang' di FB

Anwar Khumaini - detikNews

Jakarta - Dukungan demi dukungan akhir-akhir ini muncul di facebook. Setelah dukungan terhadap Luna Maya melawan *infotainment* muncul, kini muncul lagi dukungan di *facebook* mendukung George Junus Aditjondro megungkap bisnis 'Gurita Cikeas'.

Hingga Selasa (29/12/2009) pukul 03.30 WIB, jumlah pendukung grup tersebut telah mencapai 2.943 orang. Namun dalam grup tersebut tidak disebutkan siapa pembuatnya. Di sana cuma ditulis si pembuat grup berasal dari Makassar dan memiliki email *dukung_kami@gmail.com.*

"Setelah cicak VS buaya, sekarang muncul Gurita. Setelah ini, apalagi ya? Apakah kita harus menunggu seluruh penduduk kebun binatang disebutkan sehingga krisis kepercayaan publik ini selesai?" kata salah satu pendukung George, Lukman Hakim Arifin seperti ditulis dalam *wall* Gerakan Mendukung George Junus Aditjondro Mengungkap Bisnis 'Gurita Cikeas'.

"Seandainya yang di buku ini memang terbukti kebenaranya, bangsa ini mundur 20 tahun. Reformasi hanya jadi slogan. Bangkitnya kembali Orde Baru. Uang rakyat kok dibuat kepentingan golongan. UUD yang dibuat para *founding father* hanya menjdi sebuah omong kosong," kata Alid Setiawan di wall yang sama.

Tak cuma ada grup yang mendukung George Aditjondro di FB, grup penentang buku yang laris manis tersebut juga muncul. Seperti halnya grup pendukung George, grup penentang George juga gencar mencari dukungan di dunia maya.

Grup yang digawangi oleh Alba Albar tersebut bernama '1.000.001 Tolak Buku George Aditjondro'. Hingga Selasa (29/12/2009) pukul 03.30 WIB, Jumlah pendukungnya masih sebanyak 188 orang.

(www.detiknews.com)

3. INSIDEN PENEPISAN BUKU OLEH GEORGE KEPADA RAMADHAN POHAN

Di samping menggulirkan banyak komentar dari masyarakat luas, buku *Membongkar Gurita Cikeas* menimbulkan percikan-percikan situasi yang makin memanas di kalangan politisi Indonesia. Tatap muka dan wawancara George dengan berbagai pihak yang namanya

ia kategorikan sebagai mesin kampanye SBY mencapai puncaknya di Doekoen Coffee.

Insiden ini dimulai dari kedatangan Ramadhan Pohan, tanpa undangan, ke acara peluncuran buku yang diadakan oleh Petisi 28 di Doekoen Coffee. "Ketika datang, dia mengaku sebagai utusan Andi Arif (Staf Khusus Presiden SBY-red). Tapi ketika giliran bicara ternyata atas nama pribadi," ujar Boni Hargens, salah seorang panitia acara. Hadir pula di acara tersebut, artis Ray Sahetapi dan Sys NS, sejarahwan Asvi Warman Adam, dan Wakil Ketua DPD Laode Ida. Sejumlah tamu lainnya adalah paranormal Ki Gendeng Pamungkas dan anggota DPR Bambang Soesatyo.

Detiknews mencatat "Saya ke sini diajak teman-teman. Tidak ada undangan. Mau lihat George mau menyatakan apalagi. Jika menyatakan kekeliruan lagi tentang Jurnas, PD (Partai Demokrat-red) dan SBY kita beri pelajaran di tempat," kata Ramadhan sebelum acara diskusi buku di Doekoen Coffee, Rabu (30/12/2009).

Ketika sampai di tempat tersebut, Ramadhan memang diberikan waktu khusus untuk berbicara selama lima menit oleh Haris Rusli. Ia terus berceloteh bahwa dia dihina di kampung halamannya karena dianggap menerima aliran dana Bank Century. Atmosfir diskusi buku yang kian memanas, plus karena dijualbeli ratusan orang yang terdiri dari wartawan dan berbagai kalangan masyarakat, membuat kesabaran George habis. Begitu Ramadhan Pohan duduk dan Permadi mendapat giliran bicara, penulis melayangkan buku karyanya ke arah muka Ramadhan, melewati dua narasumber, termasuk Boni Hargens, yang duduk di antara Pohan dan George.

Ramadhan serta merta keluar ruangan. Sejumlah panitia sempat meminta Ramadhan agar kembali ke ruangan namun ia menolak dan memilih pergi. Sebelum menuju Polda untuk melaporkan aksi George, Ramadhan sempat menyorongkan mukanya ke wartawan yang mengikutinya ke luar Doekoen Coffee. "Itu persoalan kekerasan fisik biasa. Yang kita kecewakan itu, kita khawatir setiap perbedaan pendapat itu diatasi dengan kekerasan, itu saja. Yang lebih teraniaya

itu adalah demokrasi," ungkap Ramadhan sebelum bergegas ke Polda. Usai melapor ke Polda, Ramadhan berencana menjalani visum di Rumah Sakit Jakarta.

Ditanya mengenai aksinya menepiskan buku ke Ramadhan Pohan, George menyatakan keheranannya kenapa dalam tiga kali kesempatan berturut-turut harus berhadapan dengan Ramadhan Pohan. "Kenapa tiga kali ia dihadapkan dengan saya? Jangan-jangan ini diskenariokan untuk memancing emosi saya, supaya isu isi buku ini dialihkan ke isu pemukulan," ujar George. "Yang dia katakan halusinasi saya itu halusinasi dia," ujar George. Ramadhan memang terus menyebut George berhalusinasi mengenai aliran dana kepada dirinya. George merasa ada kesengajaan karena dirinya berhadapan dengan Ramadhan Pohan sampai tiga kali dalam forum diskusi. "Yang pertama dan kedua di forum TV One, kemudian orang yang sama dihadapkan kepada saya sekarang. Kalau saya mendengar *tape* yang sama, kalau diulang tidak enak," tuturnya.

Kontras Sesalkan George Pukul Ramadhan

Tindakan George Yunus Aditjondro yang memukul Ramadhan Pohan dengan menggunakan buku disayangkan. Dalam demokrasi harus siap mendengar dan menerima kritik, bukan menggunakan kekerasan.

"Kita menyesalkan tindakan itu, kekerasan tidak dibenarkan. George harus siap mendengar pendapat orang meski menyakitkan. Di situ tantangan buat George," kata Koordinator Kontras Usman Hamid melalui telepon, Rabu (30/12).

Bagaimanapun, dalam diskusi, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Emosi jangan terpancing, dan cara kekerasan jangan menjadi pilihan.

"Kita menolak cara-cara kekerasan. Apalagi dalam diskusi, kalau gebrak meja itu tidak masalah. Tapi meski menggunakan buku, itu sangat kita sayangkan," terangnya.

Apalagi insiden seperti ini dilakukan seorang penulis buku yang dikenal karena pemikirannya. "George mungkin khilaf. Cara kekerasan harus dihindari," imbuhnya.

Kronologi kejadian penepisan buku oleh George ke Ramadhan Pohan seperti diceritakan oleh **bataviase.co.id** dapat Anda simak di bawah ini.

Madu dan Racun Buku Cikeas

Submitted by admin on Sun, 01/03/2010 - 00:00

Di balik sabetan buku oleh George kepada Ramadhan. George menganggap para penudingnya tidak paham metode penelitian. Hanya dalam hitungan detik, tangan kiri George Junus Aditjondro yang memegang buku dan di dalamnya penuh lembaran kertas lepas, refleks mengayun ke kiri. Berjarak kira-kira sedepa, Ramadhan Pohan yang duduk di sebelah kiri George terperanjat dengan ayunan itu. Sebagian dari ujung buku itu dan juga beberapa kertas yang terselip di dalamnya mengenai bagian atas mukanya. "Kau diam saja dulu," suara George meninggi kepada Pemimpin Redaksi Harian Jurnal Nasional itu.

Rabu pekan lalu itu peluncuran buku Membongkar Gurita Cikeas, di Balik Skandal Century yang berlangsung di Doekoen Coffee, Pancoran, Jakarta Selatan, memang berlangsung kisruh. Ramadhan yang semula mengaku datang ke acara itu sebagai utusan Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Andi Arief, sejak awal acara terus memprovokasi dan mengatakan buku karangan George itu sebagai halusinasi. Belakangan, Ramadhan mengaku mewakili diri sendiri. "Kau bohong, sudah tiga kali kau bohong," kata George memotong omongan Ramadhan, tangan kirinya menunjuk muka Ramadhan.

Haris Rusly yang menjadi moderator acara peluncuran buku dan duduk di sebelah kanan George mencoba menenangkan George. Suasana panas sempat mereda hingga Permadi, dari Gerindra mendapat giliran bicara.

"Kalau ada yang mempermasalahkan metode penulisan buku George, orang itu ingin mengalihkan perhatian. Padahal yang penting, substansi buku ini bukan metodenya..." Namun belum selesai Permadi bicara, Ramadhan terus menimpali seperti orang menggerutu dan plak...terjadilah ayunan buku itu oleh George. Ramadhan berdiri. "Anda telah memukul saya, saya akan laporkan ini," kata dia. Nadanya tinggi. Mukanya memerah. Sambil melenggang keluar ruangan, Ramadhan yang mengenal George di Amerika, terus mencecar George sebagai pembohong. Usaha dari Boni Hargens yang duduk di antara George, Kastorius Sinaga, dan Ramadhan yang mencegah Ramadhan agar tidak keluar ruangan, sia-sia belaka. Ramadhan bergeming. Dia menyibak kerumunan orang-orang. Kepada juru foto dan juru kamera televisi di luar kafe, Ramadhan menyorongkan mukanya yang diakuinya telah dipukul oleh George, untuk disorot.

Tanda-tanda bahwa acara peluncuran buku George bakal menimbulkan kericuhan, sebetulnya sudah terasa sejak awal acara yang dimulai sekitar pukul 12 siang itu. Seribuan orang datang memadati acara itu. Sebagian kecil tertampung masuk ke dalam kafe yang hanya seukuran garasi mobil itu tapi itu pun sudah membuat sumpek. Dua buah penyejuk ruangan dan sebuah kipas angin seolah tak ada gunanya.

Panitia sebetulnya sudah menyediakan tenda dan kursi di luar kafe tapi jumlah orang semakin banyak. Tempat parkir penuh dengan sepeda motor dan mobil, termasuk dua mobil pemancar dari dua stasiun televisi. Di luar pagar halaman kafe, sekitar 50-an orang yang sebagian besar anak-anak dan remaja berdemonstrasi. Mereka membawa poster yang menghujat George dan meneriakkan yel-yel berbau SARA. "(Demo) itu tidak relevan," kata George.

Benar, George dan bukunya hari itu memang diserang. Dan serangan itu bukan hanya terjadi di Doekoen Coffee. Beberapa hari sebelumnya, sebagian fungsionaris Partai Demokrat dan orang-orang yang merasa terganggu dengan buku George bahkan menganggap buku itu sebagai sampah. Antara lain Amir Syamsudin, Sekjen Demokrat.

Tak terlalu jelas memang, mengapa sebuah buku kemudian dianggap sebagai sampah. Namun menurut Amir, buku George memang bombastis. "Saya kebetulan baca buku itu. Kalau dilihat, buku itu seperti lompat-lompat, ke sana ke mari, seperti hanya mengutip," kata Amir.

Awalnya adalah Denny Indrayana, Staf Khusus Presiden, yang menulis di status Facebook soal buku sampah. Kata Denny, "Buku sampah. Informasi sampah. Gosip sampah. Kalaupun didapat, ya langsung masuk tempat sampah, tidak usah pula terlalu ditanggapi atas nama kebebasan berpendapat pula, ah ora pantes je*. Keep fighting for the better Indonesia. Just Do and Do the best."

Denny mengaku sudah membaca buku George tapi dia mengaku tak mau lagi berkomentar soal buku itu. "Males ah mengomentari buku itu. Biarkan *cooling down* saja. Tidak ada yang bisa dikutip dari saya," kata Denny.

Namun seorang staf yang dekat dengan Yudhoyono menerangkan, pada saat Denny menulis tentang buku itu sampah, Denny tidak hanya membayangkan buku George. "Dia sedang membayangkan. gosip, dia sedang membayangkan fitnah ke Boediono dan Sri Mulyani," kata staf itu.

Staf itu lalu menerangkan, dirinya sudah mengontak George dan menanyakan perihal sumber penulisannya. "Saya tanya Dari mana Anda tahu ada rekening Hartati Moerdaya? Dia jawab, Dari blog-nya Marisa Haque. Anda *cross check* tidak? Dia jawab, buat apa saya *cross check* jika

Marisa Haque menuliskan seperti itu. Dia itu sumber saya. Lalu saya tanya lagi, Anda cek tidak ke instansi terkait? Bank Century, PPATK? Dia jawab, Tidak perlu," kata dia.

Intinya kata orang itu, banyak kesimpulan di buku George yang loncat dan informasinya sangat kacau. "Coba Anda tanya ke George, dia menulis buku itu berapa lama? Dia bilang, sebulan. Artinya, dia sedang mencari momentum. Lihat judulnya, Membongkar Gurita Cikeas dalam kurung di Balik Skandal Bank Century. Anda cari itu berapa halaman tentang Bank Century," kata staf khusus itu.

Amir menolak untuk melawan buku George dengan buku tandingan. Alasannya, buku George bukan buku hebat karena sumber-sumbernya perlu dipertanyakan. "Biarkan saja beredar, biar masyarakat memberikan penilaian," kata Amir.

(penggalan dari berita dalam www.bataviase.co.id)

Buntut aksi penepisan George kepada Mantan Pemimpin Redaksi Jurnal Nasional adalah pelaporan Ramadhan ke Polda Metro Jaya. Sementara itu George sendiri bisa bernafas lega karena ada pernyataan dukungan dari tim pengacara yang terdiri dari 28 pengacara muda untuk membelanya. Selain itu Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) juga siap membela penulis *Membongkar Gurita Cikeas* ini.

Aditjondro hingga 4 Januari 2010 belum ditetapkan sebagai tersangka atas pemukulan terhadap anggota DPR Ramadhan Pohan. Seperti diberitakan oleh Koran Tempo, 31 Desember 2010, Aditjondro sendiri membantah tuduhan tersebut, "Tangan dan buku saya tidak sampai menyentuhnya."

George Dijerat Pasal Penganiayaan & Terancam 2 Tahun Bui

Anggota DPR Ramadhan Pohan resmi melaporkan George Junus Aditjondro ke Polda Metro Jaya. Penulis 'Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century' yang telah memukul Ramadhan dengan buku itu dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

"Jadi yang dilaporkan George Junus Aditjondro. Tempat kejadiannya di Doekoen Coffee 30 Desember 2009. Saya mengalami luka memar di mata bagian kiri," kata Ramadhan.

Laporan Ramadhan mendapatkan nomor LP: 3757/K/XII/2009 SPK Unit 1 pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

Dalam KUHP, Pasal 351 ancaman hukumannya dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Haris Akui Ramadhan Berniat Provokasi George

Rabu, 06 Januari 2010, 13:42:09 WIB

Laporan: Wahyu Sabda Kuncahyo

Jakarta, RMOL. Saksi insiden keributan antara penulis buku *Membongkar Gurita Cikeas* George Junus Aditjondro dan pemimpin redaksi Jurnal Nasional Ramadhan Pohan, Haris Rusly telah usai diperiksa oleh penyidik Polres Jakarta Selatan.

Haris Rusly diperiksa sejak pukul 10.30 WIB hingga 13.00 WIB oleh penyidik Polres Jakarta Selatan (Rabu, 6/1). Menurut kuasa hukum Petisi 28, Royke Barce Bagalatu, Haris dicecar 21 pertanyaan oleh kepolisian seputar penyelenggaraan acara dan peristiwa penepisan kertas oleh George Aditjondro.

"Kami menilai ada tindakan berlebihan dari kepolisian dalam menerapkan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan tidak jelas ayat yang mana. Apakah menepis kertas masuk dalam penganiayaan berat atau tidak? Karena dilihat dari bukti rekaman, tidak ada penganiayaan berat maka pasal 351 tidak bisa dibuktikan," jelas Royke.

Haris Rusly sendiri kepada wartawan mengatakan semestinya kepolisian lebih sensitif melihat buku karya George Junus Aditjondro sebagai indikator dan bukti permulaan untuk mengusut lebih jauh kejahatan korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan Cikeas.

"Itu lebih prioritas ketimbang kasus yang menurut saya hanya romantika forum biasa. Dalam berita acara perkara (BAP-red) saya katakan, ada niat dari Ramadhan Pohan untuk memprovokasi emosi George dan mengacaukan jalannya forum," jelasnya.

(www.rakyatmerdeka.co.id, 06 /01/2010)

4. DEMO PENDUKUNG SBY BERBAU SARA

Di samping diwarnai kericuhan George-Ramadhan Pohan, acara peluncuran buku di Doekoen Coffee juga dibarengi demo pendukung SBY di lokasi yang sama. Sayangnya aksi puluhan orang yang banyak

diikuti oleh remaja tanggung tersebut membawa kertas bertuliskan frase-frase berbau SARA (Suku, Agama, dan Ras).

Unjuk rasa pun dibalas dengan aksi serupa oleh para pendukung George Aditjondro. Pendukung penulis melambaikan lembaran uang kertas dari Rp 2000 hingga Rp 100 ribu kepada para pemrotes, sebagai sindiran kepada pengunjuk rasa bayaran.

Berikut beberapa komentar dari para peserta *launching* yang terdata oleh redaksional online harian Sinar Indonesia Baru:

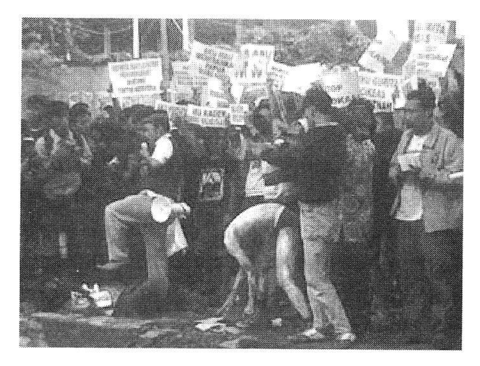
1. "Berkarya kok dibilang sampah. Baca dulu dan ralat dengan buku juga. Jangan pakai pernyataan emosional," kata Ray Sahetapi.
2. Sejarawan Asvi Warman Adam yang belum membaca turut berkomentar tentang buku *'Membongkar Gurita Cikeas'.* Menurutnya, sebuah buku tidak boleh dilarang untuk terbit, "Kalau tidak setuju, boleh bikin buku lagi."

Gambaran demo bisa Anda lihat pada laporan wartawan KOMPAS berikut ini.

Aksi "Dukung SBY" Warnai Pra-"Launching" "Gurita Cikeas"

Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary

Rabu, 30 Desember 2009 | 12:45 WIB



Aksi puluhan orang menyatakan dukungan kepada SBY, di depan lokasi pra launching buku 'Membongkar Gurita Cikeas', di Doekoen Coffee, Jakarta Selatan, Rabu (30/12/2009)

diikuti oleh remaja tanggung tersebut membawa kertas bertuliskan frase-frase berbau SARA (Suku, Agama, dan Ras).

Unjuk rasa pun dibalas dengan aksi serupa oleh para pendukung George Aditjondro. Pendukung penulis melambaikan lembaran uang kertas dari Rp 2000 hingga Rp 100 ribu kepada para pemrotes, sebagai sindiran kepada pengunjuk rasa bayaran.

Berikut beberapa komentar dari para peserta *launching* yang terdata oleh redaksional online harian Sinar Indonesia Baru:

1. "Berkarya kok dibilang sampah. Baca dulu dan ralat dengan buku juga. Jangan pakai pernyataan emosional," kata Ray Sahetapi.

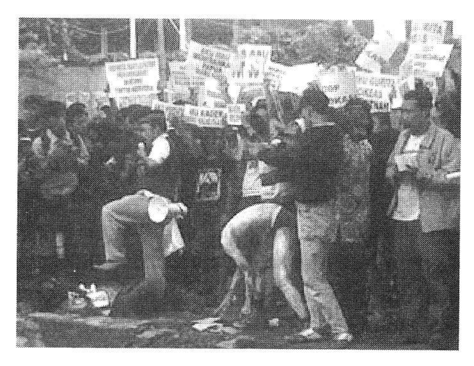
2. Sejarawan Asvi Warman Adam yang belum membaca turut berkomentar tentang buku *'Membongkar Gurita Cikeas'.* Menurutnya, sebuah buku tidak boleh dilarang untuk terbit, "Kalau tidak setuju, boleh bikin buku lagi."

Gambaran demo bisa Anda lihat pada laporan wartawan KOMPAS berikut ini.

Aksi "Dukung SBY" Warnai Pra-"Launching" "Gurita Cikeas"

Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary

Rabu, 30 Desember 2009 | 12:45 WIB



Aksi puluhan orang menyatakan dukungan kepada SBY, di depan lokasi pra launching buku 'Membongkar Gurita Cikeas', di Doekoen Coffee, Jakarta Selatan, Rabu (30/12/2009)

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekitar 20 orang yang mengaku datang dari Bogor, Jawa Barat, melakukan aksi tepat di depan lokasi pra-*launching* buku *Membongkar Gurita Cikeas*, di Doekoen Coffee, Jakarta Selatan, Rabu (30/12/2009). Kedatangan mereka praktis menarik perhatian ratusan orang yang hadir dalam pembahasan buku karya George Junus Aditjondro tersebut. Berbagai kertas bertuliskan dukungan kepada SBY menjadi perangkat aksi.

Kertas-kertas tersebut bertuliskan "Hidup SBY", "Kami Ingin Hidup Tenang Bersama SBY", dan lain-lain. Beberapa peserta aksi yang menggunakan penutup wajah bergambar George membawa tulisan "Aku Provokator" dan tulisan lainnya seperti "George Aditjondro Pengkhianat". Selain berorasi, mereka juga melakukan aksi teatrikal pembakaran buku *Gurita Cikeas*.

Para peserta aksi melakukan orasi di trotoar Jalan Raya Pasar Minggu yang berada di depan kafe. Dari dalam tempat pelaksanaan, penanggung jawab pra-*launching*, Haris Rusli mengatakan, pihaknya mengundang perwakilan staf khusus Presiden, Andi Arief. Namun, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum hadir di lokasi acara.

Aksi puluhan orang ini menimbulkan kemacetan di kawasan Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan

(www.nasional.kompas.com)

Ditantang Masuk, Massa Pro SBY Malah Pulang

Para pendukung SBY dari Koalisi Solidaritas Rakyat Indonesia yang mendemo peluncuran buku 'Membongkar Gurita Cikeas:

Di Balik Skandal Bank Century' ditantang masuk ke tengah acara. Namun mereka akhirnya malah membubarkan diri. Dalam aksi di Doekoen Coffee, Jl Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (30/12), sekitar 25 remaja pendemo meneriakkan yel-yel dan berorasi dari luar tempat acara.

"Usir George, dia antek asing!" teriak koordinator Koalisi Solidaritas Rakyat Indonesia, Abdul Fatah, dalam orasinya. Mendengar orasi itu, para peserta acara menantang para demonstran yang masih remaja ini untuk masuk. Bahkan mereka melambai-lambaikan uang kertas pecahan Rp 50.000 sampai Rp 1.000 kepada para demonstran. "Ayo masuk saja kalau mau!" kata mereka. Sedangkan para demonstran tetap berteriak, "Usir George! Usir George!" Mendapat tantangan itu, para demonstran ini tidak masuk ke dalam acara. Mereka malah mulai membubarkan diri. "Jadi malah malu-maluin SBY!" pekik para peserta acara. Seorang peserta aksi yang tidak mau disebut namanya mengatakan mereka datang dari Gunung Putri, Bogor. Mereka bahkan tidak tahu nama organisasi mereka yaitu Koalisi Solidaritas Rakyat Indonesia, saat berdemo hari ini. Massa bubar pukul 13.20 WIB dengan sebuah bus Miniarta Kampung Rambutan-Bogor.

(www.hariansib.com)

5. PEMBUATAN BUKU PUTIH

Usulan mengenai pembuatan buku putih dari Kepresidenan ditanggapi banyak pihak secara positif. Bahkan beberapa orang menganggap baik untuk mengklarifikasi tudingan miring buku *Membongkar Gurita Cikeas* terhadap kecurangan partai Demokrat dalam Pilpres lalu dan yayasan-yayasan yang dianggap berafiliasi dengan keluarga Cikeas dan jadi kantong amal kampanye. Buku putih ini sekaligus diharapkan bisa merupakan *counter* tuduhan bahwa Presiden terlibat dalam *Centurygate*."Tidak menutup kemungkinan akan ada buku yang dibuat oleh yayasan-yayasan yang disebutkan. Presiden sama sekali tidak ikut campur," kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Adrian Pasha di Istana Negara Jakarta (Kedaulatan Rakyat, hal 23, Selasa 29 Desember 2009).

Selasa, 29/12/2009 07:00 WIB

Membongkar Gurita Cikeas

Buku Putih Bagus Dibuat Asal Jelaskan Juga Sumber Dana Demokrat

Anwar Khumaini - detikNews

Jakarta - Pihak Istana Presiden menyebutkan kemungkinan akan dibuat buku putih untuk melawan buku karya George Junus Aditjondro. Langkah tersebut dianggap baik, asalkan dalam buku putih tersebut juga dijelaskan dari mana saja sumber dana Partai Demokrat dalam Pemilu Legislatif serta Pilpres 2009 lalu.

"Bagus membikin buku putih, di sana nanti harus dijelaskan sumber dana Partai Demokrat dari mana saja. Yayasan-yayasannya juga dijelaskan sumber dananya," ujar pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit kepada detikcom, Selasa (29/12/2009).

Dalam buku putih tersebut menurut Arbi juga harus disebutkan secara gamblang bantahan-bantahan terhadap isi buku karangan George Aditjondro. Juga harus dijelaskan secara ilmiah agar bisa efektif untuk menandingi buku 'Membongkar Gurita Cikeas'.

Arbi menganggap, penerbitan buku putih tersebut merupakan langkah terbaik daripada membawa kasus ini ke jalur hukum ataupun menarik buku dari peredaran. "Ini adalah langkah yang paling demokratis," kata pria yang kerap menguncir rambutnya itu.

Namun langkah hukum bisa saja dilakukan jika memang terdapat perbedaan pandangan yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. "Bisa saja masuk jalur hukum jika ada pendapat yang berbeda," pungkasnya.

Dalam buku 'Membongkar Gurita Cikeas' disebutkan beberapa yayasan di sekitar SBY diduga dialiri dana untuk kepentingan Pemilu 2009 lalu. Yayasan tersebut yakni, Yayasan Puri Cikeas, Yayasan Mutu Manikam Nusantara, Majelis Dzikir SBY, dan Yayasan Kepedulian dan Kesetiakawanan.

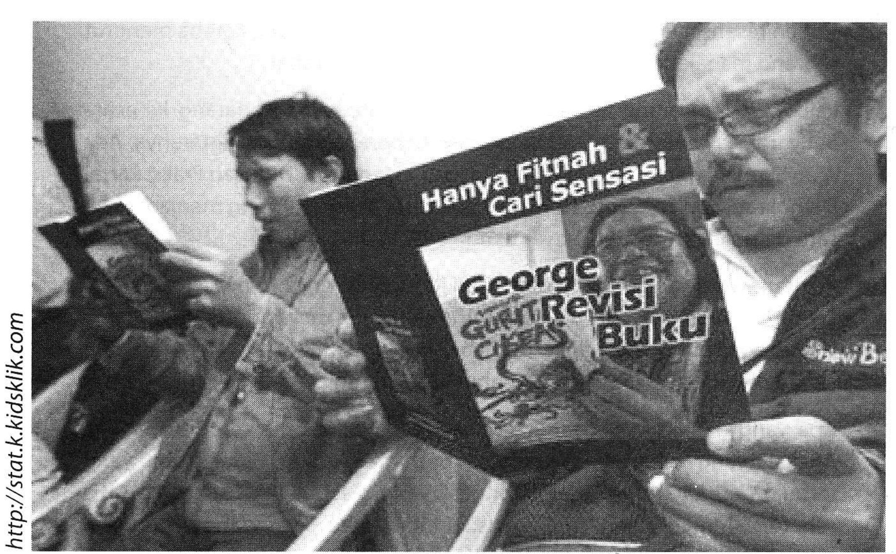
Juru Bicara Kepresidenan Julian Adrian Pasha menyebutkan, kemungkinan buku yang diterbitkan oleh Galangpress Yogyakarta tersebut akan mendapat tandingan. Yayasan SBY akan membuat buku putih untuk melawan buku George Aditjondro itu.

(www.detiknews.com)

6. BUKU TANDINGAN MEMBONGKAR GURITA CIKEAS

Tanggal 6 Januari 2010, buku yang dikatakan sebagai tandingan *Membongkar Gurita Cikeas* beredar. Buku tersebut berjudul *'Hanya Fitnah & Cari Sensasi, George Revisi Buku'*. Penulisnya, Setiyardi yang juga mantan wartawan Tempo seperti George, mengatakan bahwa buku George hanyalah kliping berbagai pemberitaan miring tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Dia menggunakan data sekunder. Semua data yang ditampilkan dalam bukunya selalu disertai kata dugaan dan tidak pasti. Data sekunder itu juga tidak pernah dikonfirmasikan kepada sumber primer. Jadi secara metodologi dan konten sangat lemah. Dalam menulis buku itu George hanya berbekal teori konspirasi," ungkapnya.

Ia pun membantah adanya suntikan dana dari sponsor tertentu untuk menulis buku ini. Ia mengaku bahwa motivasinya murni bisnis karena menganggap bahwa penerbitan buku tandingan ini akan menarik dan bakal direspon tinggi oleh masyarakat.



http://stat.k.kidsklik.com

Tulisan setebal 31 hal. karya Setyardi, mantan wartawan Tempo, berjudul "Hanya Fitnah & Cari Sensasi-George Revisi Buku" diakuinya sebagai resensi "Membongkar Gurita Cikeas" yang dibukukan.

Berikut ini adalah sebuah tulisan dari sudut pandang seorang Rusdi Mathari, wartawan, mengenai isi buku Setyardi yang sudah diluncurkan Rabu, 6 Januari 2010.

Abal-Abal Membantah Buku George

George Junus Aditjondro penulis buku *Membongkar Gurita Cikeas, di Balik Skandal Century* oleh Setiyardi dituding sebagai mantan wartawan yang tidak kritis dan tak bersikap skeptis. George juga dinilai gegabah menarik kesimpulan. Bagaimana dengan "buku" Setiyardi yang juga mantan wartawan itu?

oleh **Rusdi Mathari** BARU kali ini saya tahu, hanya untuk memublikasikan sebuah tulisan resensi buku dibutuhkan acara khusus di sebuah hotel. Itulah resensi buku *Membongkar Gurita Cikeas, di Balik Skandal Bank Century* karangan George Junus Aditjondro yang ditulis oleh Setiyardi. Acaranya dilangsungkan di Ruang Cemara, Lantai 5, Hotel Cemara, Jakarta Pusat, Rabu kemarin.

Tarif normal menyewa ruangan itu untuk minimal 100 orang selama 4 jam adalah Rp 130 ribu per orang termasuk untuk membayar kudapan, minuman kopi dan teh hangat. Setiyardi atau panitia acara peluncuran

tulisan resensinya, entahlah mengeluarkan ongkos berapa karena menurut seorang manajer di hotel itu, tarif acara itu sudah dirabat.

Lalu seratusan orang termasuk para wartawan, kemarin datang ke acara Setiyardi. Saya bertemu atau mengenali beberapa orang di antaranya. Ada Aam Sapulete (Komisaris PTPN III), Roy Suryo (anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat), dan Soeyanto (asisten Staf Khusus Presiden) yang menjadi salah satu pembicara. Meriah. Setiyardi menjadi bintang.

Mantan wartawan *Tempo* itu memberi judul tulisannya *Hanya Fitnah & Cari Sensasi, George Merevisi Buku* dan sama sekali tak menganggap tulisannya itu sebagai buku. "Ini hanya resensi, buku abal-abal Cak," kata Setiyardi kepada saya, sekitar 15 menit sebelum acara dimulai.

Apa yang dimaksud Setiyardi sebagai abal-abal, saya tak begitu paham. Apakah yang dimaksudnya adalah peti mati orang Batak Toba yang terbuat dari kayu utuh (gelondongan) yang disebut *haus sada,* atau dia sebetulnya ingin mengatakan palsu, imitasi, atau pecundang seperti arti abal-abal menurut *melayuonline.com.* Saya hanya mencoba mengerti, dengan ucapannya itu, Setiyardi sebetulnya ingin "rendah hati." Maksudnya, entahlah apa.

Namanya juga resensi, memang tak banyak yang diharapkan dari tulisan Setiyardi terutama jika itu adalah fakta baru. Dan dari banyaknya salah ketik dan salah ejaan, terbaca "buku" itu memang ditulis dengan gegas. Setiyardi membagi tulisannya menjadi enam judul.

Diawali dengan kata pengantar yang lumayan provokatif, misalnya dengan kata-kata, "*Hanya Fitnah & Cari Sensasi, George Merevisi Buku* yang kini ada di tangan Anda ini sejatinya perspektif baru" Setiyardi menyerang George sebagai mantan wartawan yang tidak kritis dan tak bersikap skeptis. George dinilainya juga gegabah menarik kesimpulan. Setiyardi menulis kata pengantar itu dalam lima paragraf, dirancang ke dalam dua halaman buku berukuran 14,5X20 cm.

Di tiga halaman berikutnya, Setiyardi menuliskan pendapat Amien Rais, Arbi Sanit, Irman Gusman dan Andrik Purwasito. Semua pendapat orang-orang itu niscaya menolak atau meragukan isi buku George. Tak ada penjelasan, apakah pendapat dari orang-orang itu dikumpulkan sendiri oleh Setiyardi misalnya lewat wawancara atau hanya mengutip dari kliping berita internet seperti yang dilakukan George dan karena itu dikritik oleh Setiyardi sebagai data sekunder dan tidak akurat itu tapi sebagai mantan wartawan, Setiyardi sama sekali juga tak mencantumkan asal-usul tulisannya yang dia beri judul *Prolog* itu.

Sekunder, Sekali Lagi

"Isi" tulisan Setiyardi ada pada halaman 11 hingga 23 dengan judul *Meninjau Isi*. Semua halaman disertai dengan gambar-gambar, kecuali halaman 12, dan 20. Di bagian inilah, Setiyardi mencoba membangun argumen untuk membantah buku George meski terlalu dipaksakan. Setiyardi misalnya menyoal kalimat terakhir alinea kedua halaman 36 buku George "Mereka tidak perlu lagi bingung memikirkan penggalangan dana (*fund raising*) bagi yayasan ini, yang telah mendapat kucuran dana sebesar US$ 1 juta dari Djoko Soegiarto Tjandra, pemilik Bank Bali dan buron kelas kakap BLBI..."

Kalimat itu berhubungan dengan kalimat pertama di alinea kedua buku George di halaman yang sama tentang Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian. Itu yayasan yang didirikan oleh antara lain Djoko Suyanto (Menko Polkam). Setiyardi menanggapi pernyataan kalimat itu dengan tiga kalimat.

Pertama dia menganggap data George bersifat sekunder. Kedua dia menyarankan, bila George ingin bukunya dijadikan referensi, maka George seharusnya melakukan verifikasi kepada pengurus dan yayasan yang dimaksud. Ketiga, dengan demikian menurut Setiyardi, informasi yang disajikan George akan memiliki tingkat validitas yang baik.

Bagaimana soal kesahihan sumbangan dari Djoko Tjandra itu? Tak ada bantahan dari Setiyardi. Dalam tulisan itu, George sebetulnya melampirkan kutipan sumbernya berasal dari *Vivanews* 2 Oktober 2009, dan majalah *Mimbar Politik* edisi 7-14 Oktober 2009 halaman 10-11). Majalah *Tempo* edisi 10 Januari 2010 halaman 28 menyebutkan, kepada KPK Djoko Tjandra mengaku menyerahkan US$ 1 juta langsung ke tangan Djoko Suyanto, 4 Maret 2008 meski keterangan itu dibantah oleh Djoko Suyanto.

Benar, George tidak melakukan verifikasi lanjutan atas sumber yang dikutipnya. Namun dengan asumsi, *Vivanews* adalah situs berita yang dikelola wartawan profesional (sebagian adalah mantan wartawan *Tempo*), data yang dikutip George juga bukan berasal dari sumber yang tidak jelas.

Mengutip pengacara Bibit Samad Riyanto, Ahmad Rifai, situs berita itu menulis, "Joker (Joko Tjandra) memberikan uang kepada Dirut PT Mulia Viadi Sutoyo dan Enang (kurir). Uang senilai US$ 1 juta itu, kemudian diserahkan lagi ke pihak lain dalam hal ini ke Djoko Suyanto dari Yayasan K." Di tulisan itu juga disertakan bantahan Djoko Suyanto (lihat "Yayasan KDK Tak Ada Urusan Dengan Politik" *Vivanews*, 2 Oktober 2009).

Nama Negara

Setiyardi juga mempertanyakan sumber referensi buku George yang menyoal promosi batik Allure di halaman 56-57 terutama di kalimat "... Adanya potensi konflik kepentingan antara Ny. Ani Yudhoyono sebagai pembina yayasan itu, dan perusahaan batik baru yang telah mengorbitkan anak dan cucunya sebagai ikon, belum banyak disorot orang..." Setiyardi menganggap, pernyataan itu sepenuhnya merupakan spekulasi George sebagai penulis buku karena sekali lagi, menurutnya tidak ada sumber referensi.

Tak lalu Setiyardi memerinci, pernyataan kalimat George yang mana yang dianggap sebagai spekulasi: Soal "konflik kepentingan" itu atau soal "anak cucu Ani Yudhoyono yang menjadi ikon Allure?" Dari majalah *Gatra*, Annisa Larasati Pohan faktanya mengakui, dirinya didaulat menjadi ikon batik oleh produsen batik Allure (lihat "Annisa Pohan, Duta Batik Annisa Pohan," *Gatra* Nomor 42, 30 Agustus 2007).

Isi selebihnya sama saja: Setiyardi hanya membantah isi buku George dan tak menunjukkan fakta baru, satu hal yang dia gembar-gemborkan dalam kata pengantar. Di judul terakhir tulisannya, Setiyardi menampilkan delapan kliping berita yang diambil dari *Vivanews*, *AntaraNews*, dan *detikcom*. Hanya itu.

Dia juga tak bersedia menyebutkan motif "peluncuran" resensinya dan siapa yang mendanai, kecuali katanya sekadar motif bisnis. "Kebiasaan orang Indonesia seperti sampean selalu percaya dengan teori konspirasi Cak," kata Setiyardi yang siang itu mengenakan batik, entah apa mereknya.

Soalnya sekarang, benarkah dengan menerbitkan resensinya itu Setiyardi hanya bermotif bisnis? Usai acaranya, saya tak sempat bertanya kepada Setiyardi soal motif itu lagi. Dia sudah dikerubungi banyak orang terutama para wartawan. Dari jauh saya melihat Setiyardi banyak menebar tersenyum disorot lampu kamera.

Beberapa jam sebelum menulis artikel ini, saya akan tetapi mendapati fakta baru dalam "buku" Setiyardi. Bukan soal data pembanding untuk menjawab buku George, tak pula soal foto Setiyardi sedang mejeng dengan latar belakang Gedung Putih, di Washington, Amerika Serikat, melainkan karena dari "buku" itu saya baru tahu, di belakang nama Setiyardi, sekarang ada embel-embel Negara. Setiyardi Negara.

(dikutip tanpa perubahan dari www.politikana.com yang juga dipublikasikan dalam www.rusdimathari.wordpress.com)

E. GEORGE SIAPKAN BUKU GURITA CIKEAS JILID II

George siap membuat Membongkar Gurita Cikeas Jilid II yang berisi penambahan dan revisi data yang diperlukan. Demi keakuratan isi, George mengumpulkan tambahan kajian yang saat ini ia peroleh dari beragam sumber. Sumber-sumber informasi baru ini muncul seiring dengan mengguritanya pemberitaan buku *Membongkar Gurita Cikeas.* Hal ini memang sesuai dengan motivasi George menerbitkan buku, yakni untuk mendapatkan *feedback* sehingga data yang sudah ada semakin dipertajam dengan mengucurnya arus data baru.

George Siap Terbitkan Edisi Revisi 'Gurita Cikeas'

Selasa, 29 Desember 2009 09:58

JAKARTA (SuaraMedia News) - Penulis buku berjudul "Membongkar Gurita Cikeas" George Junus Aditjondro segera melakukan revisi terkait protes sejumlah pihak yang dirugikan oleh penulis buku tersebut.

"Memang akan ada yang direvisi untuk diperbaiki, dan termasuk juga soal Antara," kata George Junus Aditjondro saat bincang-bincang dengan tvone, Selasa 29 Desember 2009.

Menurutnya, dalam edisi revisi yang kedua ini memang sudah dibicarakan sebelum oleh pihak penerbit Galangpress. "Semuanya akan disisir kembali dan semua file yang ada akan dilihat lagi, dan ini akan jadi edisi revisi," ujarnya.

Terkait hal itu, sebelumnya LKBN ANTARA meminta George segera melakukan revisi terkait tuduhan tuduhan yang tertulis dalam buku tersebut tidak mendasar.

Pemimpin Redaksi LKBN ANTARA, Ahmad Muklis Yusuf menyatakan, apa yang ditulis dalam buku karangan George Aditjondro adalah fitnah dan sangat tidak berdasar. Apalagi disebut-sebut mengalihkan dana PSO ke Bravo Media Centre tim sukses SBY-Boediono.

"Anda perlu tahu sumber dana Antara berasal dari dua sumber, pertama komersial 70 persen, kedua PSO 30 persen," ujar Ahmad Muklis Yusuf melalui pesan singkat yang diterima, Rabu 29 Desember 2009.

Selain itu, lanjut dia, pendapatan yang berasal dari PSO tidak mungkin dialihkan, karena mekanismenya diverifikasi keuangan negara secara ketat dan diaudit BPK.

"Karena itu saya akan mengajukan somasi kepada penulis langsung siang ini juga dan saya mohon 2X24 jam segera direvisi buku tersebut," tuturnya.

Sebelumnya, Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menanggapi beredarnya buku berjudul "Membongkar Gurita Cikeas" karangan George Junus Aditjondro dinilai ekonom dan mantan Sekjen DPP PAN, Faisal Basri, adalah sesuatu yang berlebihan. Menurutnya, sikap presiden SBY over reactive dan sensitive terhadap sesuatu hal, apalagi bila menyentuh diri pribadi dan keluarganya.

"Kalau masalah Bank Century lama banget. Anak buahnya nggak pernah dibela sama dia, dibelanya lama. Kalau urusan pribadinya sangat over sensitive," kata Faisal Basri di Solo, Senin, 28 Desember 2009.

Hal itu, lanjut Faisal, dapat diindikasikan ada proses yang tidak sehat. "Buku ya dibalas dengan buku atau direspon dengan baik," ujarnya.

Faisal menambahkan, apabila isi buku tersebut memang berisi fitnah, diajukan ke proses peradilan. Dia mencontohkan, di Singapura banyak yang memfitnah pemerintah.

Karena tidak terbukti, maka pihak tersebut harus mengganti rugi kepada pemerintah. Sehingga, yang memfitnah tersebut bangkrut karena harus membayar ganti rugi kepada pemerintah.

"Majalah Economist, Wall Street Journal pernah terbukti kalau pemberitaannya salah. Dulu pemimpin oposisi yang merupakan orang India itu juga pernah bahwa isi bukunya salah. Dia sampai bangkrut dan berjualan buku. Jadi pemerintah dapat uang banyak," terang Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

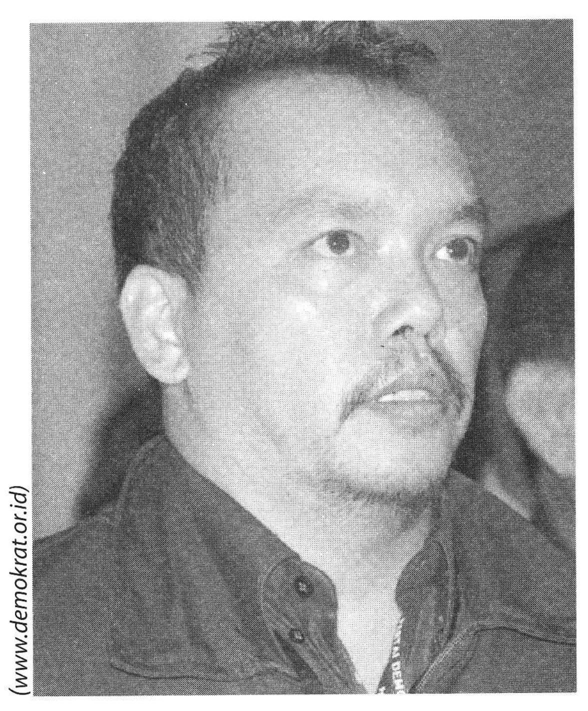
Dengan demikian, dia berharap, proses yang terjadi di dalam negeri seharusnya meniru apa yang dilakukan pemerintah Singapura melalui proses hukum. "Bisa bangkrut orang kalau sembarangan ngomong. Kalau bisa minta ganti ruginya dalam jumlah besar," tuturnya.

Pengumpetan buku yang terjadi sekarang ini, menurut dia sangat bodoh. Karena, judul buku dengan isinya lebih berat judulnya. "Gurita kayaknya kan wah, padahal bisnisnya baru sedikit. Jadi, bodoh sekali rezim kalau mau dipancing sama yang begini-begini. Proses hukumnya yang nggak jalan deh, jalan lepas," ujar dia.

Sekali lagi Faisal menyatakan bahwa cara yang paling canggih adalah pemeritah Singapura. Orang yang memfitnah bisa dibuat miskin kalau

benar-benar memfitnah. "Ini semua melalui proses peradilan. Dan lewat buku ini George mengingatkan dari awal supaya SBY tidak kebablasan," ujarnya.

(*www.suaramedia.com*)



(*www.demokrat.or.id*)

Ramadhan Pohan, Mantan Pimpinan Redaksi Jurnal Nasional yang berniat memperkarakan George.

BAB II
PRESIDENTIAL WATCH, ITU SPESIALISASI SAYA!

Nama George Junus Aditjondro lalu lalang menghiasi berbagai stasiun televisi dan lembaran media massa. Sejak menerbitkan buku kontroversial, Membongkar Gurita Cikeas, 23 Desember 2009 lalu sorotan media tak pernah lepas. Banyak yang bertanya-tanya siapa George sebenarnya. Sementara kalangan aktivis semasa orde baru menyambut kemunculannya kembali.

George bukan orang baru yang tiba-tiba muncul dan lantang meneriakkan korupsi. Aktivis kelahiran Pekalongan, Jawa Tengah, 27 Mei 1946 ini dikenal sebagai aktivis lingkungan yang cukup berpengaruh. Ia pun pernah berkarir sebagai wartawan Tempo selama satu dekade (1969-1979). Naluri wartawan inilah yang membuat George memiliki kepekaan tajam dalam penelusuran data. Ia kerap menghimpun data-data yang terserak di berbagai media dan menjalinnya menjadi sebuah peristiwa yang berkesinambungan.

Sejak September 1981-Juni 1982, George mempelajari Sosiologi Pedesaan di Cornell University, New York, Amerika Serikat. Di tempat yang sama, ia menyelesaikan tesis doktoralnya pada Agustus 1992. Tesis doktoralnya menyoroti bagaimana media digunakan sebagai

buku teks pembangunan, dalam kaitan dengan perdebatan dampak sosial pembangunan sebuah waduk di Indonesia.

Mulai 1989 hingga 1991, George terlibat dalam penelitian lapangan di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera tentang bagaimana media menampilkan tema pembangunan waduk-waduk besar. George pernah tinggal di Papua Barat selama lima tahun (1982-1987) sebagai konsultan riset dan informasi untuk organisasi pengembangan masyarakat (YPMD), Irian Jaya. Pada 1992, George mengajar pada Program Pascasarjana Studi Pembangunan di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Hasil riset mengenai kekayaan dinasti Soeharto membuat George mempertaruhkan kebebasannya. Bersama keluarganya, George pergi ke Australia untuk menghindari rezim represif tersebut. Sekembalinya dari Australia, Oktober 2002, George bergabung dengan Yayasan Tanah merdeka di Palu dan aktif meneliti konflik di wilayah Sulawesi Tengah.

Sampai sekarang, ia tetap setia menyelidiki dan membicarakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Seperti pepatahnya sendiri, bahwa perjuangan tidak boleh dalam satu helaan nafas. Setiap orang harus bernapas panjang untuk melakukan perjuangan yang berat. Dalam beberapa kesempatan, George selalu berkata bahwa korupsi yang terjadi adalah karena sistem oligarki yang sudah menancap kuat. Sama halnya seperti ke delapan tangan gurita yang akan menempel erat saat menangkap mangsanya. Konsistensinya melawan korupsi ditunjukkan dengan buku-buku yang ditulisnya setelah kembali dari Australia.

Berikut ini adalah wawancara mendalam dengan George Junus Aditjondro. Beberapa lampiran dari surat kabar di tahun 1990-an dan surat-surat George selama di pengasingan turut disertakan untuk memberikan gambaran nyata tentang George.

Kenapa Anda tertarik meneliti tentang korupsi?

Spesialisasi saya memang di bidang korupsi kepresidenan. Kalau ada istilah *corruption watch, policy watch*, dan *parliamentary watch*, saya mengistilahkan apa yang saya lakukan sebagai *presidential watch*. Jadi ke depan, kalau ada yang mau jadi presiden silakan berbaik-baik dengan saya (tertawa).

Dulu, waktu saya lari ke Australia, saya harus merancang tiga mata kuliah untuk mengajar di Newcastle University. Nah, yang menarik di Indonesia *kan* soal pemberantasan korupsi, maka menjadi jaminan mutu kalau saya, yang berasal dari Indonesia, mengajar tentang korupsi.

Cerita awalnya begini. Tahun 1994, saya mengisi seminar tentang Gerakan Pro Demokrasi di UII yang diikuti oleh mahasiswa se-Indonesia. Waktu itu sesi bicara saya sudah habis. Berhubung Rudini, (Menteri Dalam Negeri Kabinet Pembangunan V, 1988-1993) sebagai pembicara yang lain, terlambat hadir maka saya memperpanjang waktu bicara saya. Nah, di situlah saya mulai menggelontorkan *joke* mengenai 4H yang kemudian membuat saya terkenal dan sempat dicari-cari polisi. Saya bilang, gerakan pro demokrasi itu harus menghantam dari atas dan bergerak dari bawah. Namun menghantam yang di atas itu sangat berat karena mereka sudah menjadi oligarki.

Secara definitif, oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Nah itu yang terjadi di Indonesia. Pemerintahan di Indonesia dikuasai oleh *4H- Harto, Habibie, Harmoko, dan Bob Hasan*. Apa yang saya paparkan itu mulanya draf *paper* saya untuk Tamasa University, Thailand. Setelah berbicara di UII itu saya sempat ke Thailand untuk mewacanakan oligarki.

Apa yang saya katakan memang termasuk hal baru. Saat itu, orang-orang sibuk berdiskusi sebatas masalah korupsi saja. Mereka tidak berpikir bahwa nepotisme itu bagian dari korupsi. Maka dari itu saya mewacanakan oligarki karena itu lebih sistemik dan berbahaya.

Saya pikir, jika rezim Soeharto tidak represif terhadap saya, mungkin saat ini saya justru masih dikenal sebagai aktivis lingkungan hidup. Selama enam tahun (1980-1986), saya pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif WALHI.

Konsistensi saya ada pada penegakan HAM. Pada mulanya saya bergerak untuk mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan keserakahan penguasa dan menyengsarakan rakyat. Seperti kasus waduk Kedung Ombo dulu. Saya bersama Romo Mangun, Arief Budiman, dan Gus Dur ikut membela hak-hak warga desa yang digusur demi kepentingan pembangunan waduk tersebut. Saya mengenal Gus Dur dan sering bekerjasama dengan beliau sejak akhir 1970-an. Gus Dur adalah salah seorang tokoh Islam Indonesia yang menjadi mata rantai penting yang menghubungkan LSM dengan kelompok Islam.

Saya juga terus menyuarakan tentang dampak rutin dan akumulatif akibat pengoperasian PLTN di Semenanjung Muria yang kasusnya nyaris terlupakan. (**lihat lampiran 1 hal. 90**) Bagi saya, di balik pengumpulan kekayaan yang luar biasa pasti ada pelanggaran HAM yang luar biasa. Maka saya sangat bertekad untuk membayangi oligarki ini.



4 H sang penguasa negara yang dipopulerkan oleh George J. Aditjondro. Dari kiri ke kanan: Soeharto (Harto), Harmoko, Habibie, dan Bob Hasan (Hasan).

Dari pidato itu makanya Anda dicari polisi?

Begitulah. Waktu itu Polresta Yogyakarta sudah siap dan mengenai saya dengan pasal penghinaan terhadap kepala negara (Pasal 134). Dulu pasal itu ada di KUHP yang lama tapi sekarang sudah dihapuskan. Kalau tidak salah saya dituntut dengan hukuman penjara selama enam tahun. (**lihat lampiran 2 hal. 96**)

Saat itu saya merasa kans melawan Soeharto sangat kecil. Saya hanya punya dua pilihan; membuat pledoi atas pernyataan saya mengenai 4H atau lari ke Australia meneruskan riset mengenai korupsi kepresidenan.

Akhirnya saya memilih lari ke Australia pada Februari 1995 dengan berbekal dua koper, satu koper pakaian dan yang lainnya berisi data mengenai 4H dari PPBI (Pusat Perjuangan Buruh Indonesia). Ini yang membuktikan analisis saya mengenai oligarki itu benar.

Saya lari tidak dengan biaya besar, waktu itu memang ada yang membantu urusan tiket. Setelah saya mendapat tempat tinggal baru, istri dan anak saya menyusul. Hanya dari sebuah pernyataan mengenai oligarki itu akhirnya saya merelakan kebebasan saya. (**lihat lampiran 3 hal. 101**)

Bagaimana tanggapan teman-teman Anda sesama aktivis pro demokrasi?

Banyak pro dan kontra seputar kepergian saya. Adnan Buyung Nasution menganggap saya pengecut karena lari. Dia bilang saya tidak ksatria. Saya akui saya ini bukan ksatria tapi brahmana. Sementara Romo Mangun berbicara dengan lebih halus. Dia bilang, toh kalau saya dipenjara saya justru masih bisa menulis di dalam bui. Namun saya bukan penulis, saya adalah peneliti lapangan yang perlu mengumpulkan data dan tidak bisa diam di satu tempat.

Saya menolak untuk minta maaf terhadap Soeharto. Waktu itu Yahya Muhaimin terkena kasus yang sama karena menyinggung Probosutedjo, adik Soeharto satu ibu, dalam bukunya. Namun dia

memilih minta maaf dan akan merevisi bukunya. Begitu juga dengan Christianto Wibisono maupun Majalah Tempo.

Arief Budiman, teman dekat saya sesama aktivis dan dosen di UKSW Salatiga juga berkata kenapa saya harus menyebutkan nama. Kenapa tidak menyebutkan gejala oligarki yang timbul saja? Saya bilang, untuk apa menulis gejala jika pihak-pihak yang melakukan oligarki itu sudah jelas.



Arief Budiman, Adnan Buyung Nasution, dan Romo Mangun merupakan teman seperjuangan George dalam menegakkan demokrasi. Mereka dikenal sebagai aktivis pro demokrasi.

Mengapa Anda memilih Australia?

Australia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Yah, memang ada perjanjian yang terkait tindak pidana yang berlaku di kedua negara seperti narkoba. Di Australia, mengkritik presiden bukan merupakan tindak pidana, sehingga saya aman di sana. Selain itu negara ini paling dekat dengan Indonesia sehingga memungkinkan saya untuk melanjutkan riset korupsi kepresidenan. Saya masih bisa menjangkau para narasumber yang ingin memberikan data tambahan mengenai riset tersebut. Rencana saya waktu itu hanya pergi selama dua tahun, tapi kondisinya tidak memungkinkan. Saya pun tinggal

di Australia selama delapan tahun. Selama itu pemerintah Indonesia masih mencari-cari saya.



New Castle of University, tempat George melakukan penelitian lanjutan dan mengajar selama delapan tahun.

Apa saja yang Anda lakukan di Australia?

Sewaktu di Indonesia, saya memang cukup dekat dengan beberapa dosen di Australia dan mereka *concern* terhadap kasus saya ini. Mereka menyatakan apresiasi karena saya sangat independen dan berani melanggar tiga tabu yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia, *Timor Leste-Militer-Kekayaan Presiden*. Saya juga mendapat dukungan ratusan Indosianis di Australia. Sejak Januari 1996, Saya menjadi pengajar di jurusan Sosiologi dan Antropologi di Newcastle University

(NU). Di sini, saya mengembangkan mata kuliah Sosiologi Korupsi dan Sosiologi Gerakan-Gerakan Kemerdekaan Pascakolonial.

---George sempat menjadi *research fellow* dari dua institut ilmiah regional di Australia, yakni Asia Research Centre yang berbasis di Murdoch University, Perth, Australia Barat, serta Center for Asia Pacific Social Transformation Studies (CAPSTRANS) yang berbasis di Newcastle University dan Wollongong University, New South Wales.----

Mengapa saya memilih NU? Karena semua universitas besar di Australia seperti Monash University atau Melbourne memiliki kerjasama besar dengan Indonesia. Sementara kerjasama NU-Indonesia tidak terlalu politis hanya sebatas pemberian *training* kepada bupati-bupati di Indonesia.

Karena saya berencana untuk menetap selama dua tahun di Australia, saya harus mendapatkan status *permanent resident*. Murdoch University hanya memberikan waktu dua kali enam bulan, satu kali untuk riset dan satu kali untuk mengajar. Sementara NU bersedia menjalin kontrak mengajar selama minimal dua tahun. Di samping itu NU tidak punya alasan untuk takut ketika menerima saya. Waktu yang lebih lama ini membuat saya lebih leluasa bergerak dan membiayai sekolah Enrico (anak tunggal GJA).

Menariknya, di NU ada sistem yang menguntungkan kelangsungan riset saya. Setelah tiga tahun mengajar, ada satu semester yang digunakan untuk melakukan riset dan tidak dibatasi oleh tempat dan tema. Jika penelitiannya lebih dari tiga bulan, partner si peneliti bisa ikut riset. Penyebutan partner ini semata-mata karena Pemerintah Australia sangat terbuka terhadap kaum gay dan sebagainya, jadi mereka tidak menyebut suami atau istri. NU hanya membiayai tiket perjalanan partner tersebut namun biaya hidup dan tempat tinggal tidak ditanggung. Itu yang saya cari sendiri.

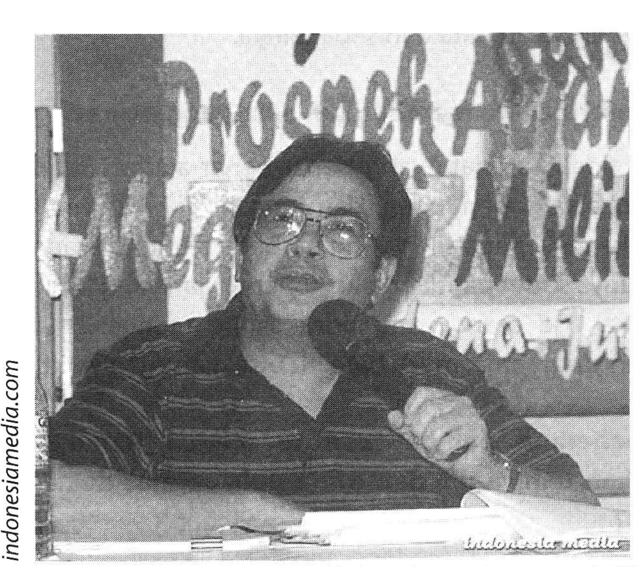
Setelah dua tahun di Australia, tahun 1997, saya mengembalikan kalpataru yang pernah saya peroleh di tahun 1987. Namun piala itu saya kembalikan lagi di tahun 1997 sebagai protes **(lihat lampiran**

4 hal. 108). Saya juga melampirkan surat yang ditujukan kepada Soeharto **(lihat lampiran 5 hal. 110).**

Saat di Australia itulah saya dipecat dari Satya Wacana karena tidak pernah datang mengajar. Pemecatan itu juga dialami oleh Arief Budiman, rekan sesama aktivis dan dosen.

--Reformasi yang diperjuangkan oleh para mahasiswa dan aktivis di tahun 1998 menimbulkan berbagai gejolak politik dan sosial. Salah satunya adalah tertembaknya para mahasiswa yang tengah melakukan demonstrasi. Kala itu, George, yang masih berada dalam pelarian politik turut mengikuti jalannya perjuangan reformasi di tanah air. George pernah mengirimkan surat yang menyatakan dukungan terhadap para aktivis 1998 (**lihat lampiran 6 hal 123**)

Tahun 2002 saya pulang ke Indonesia dan berturut-turut menulis buku dengan tema korupsi kepresidenan: *Kembar Siam Penguasa Politik dan Ekonomi Indonesia; Dari Soeharto Ke Habibie, Guru Kencing Berdiri Murid Kencing Berlari; Korupsi Kepresidenan*; Dan terakhir *Membongkar Gurita Cikeas* (**lihat Bab III Pergulatan Anak Bangsa Melawan Penguasa**).



indonesiamedia.com

George, 31 Juli 1999 di seminar 'Pengadilan Soeharto dan Prospek Aliansi 3M (Mega, Militer, Muslim)'

Buku Anda yang terakhir sering diserang mengenai metodologi yang tidak ilmiah. Bagaimana menurut Anda?

Perlu dipahami, seorang peneliti bisa mencari data empiris berupa data primer atau sekunder. Setelah data itu terkumpul peneliti bisa menganalisis dan mencari hubungannya. Apa yang saya lakukan itu ada metodologinya, yaitu *grounded research* **(lampiran 7 hal 127).** Saya mengumpulkan data dan memilah-milahnya berdasarkan kategori. Ilmiah adalah mengumpulkan data dan melakukan penafsiran. Apa salahnya mengumpulkan data dari berita-berita di internet? Kalau data yang saya kumpulkan itu data sampah, berarti situs-situs yang saya kutip itu sampah? Padahal situs-situs tersebut sama seperti koran atau majalah, mereka juga pasti memegang prinsip menampilkan data-data yang akurat. Tjipta Lesmana sangat berbicara teknis di media. Saya juga melakukan wawancara dengan para informan saya yang tentu namanya tidak bisa dipublikasikan.

Namun saya juga terbuka terhadap segala kritikan. Ke depannya, terlepas dari saran tersebut berasal dari Tjipta Lesmana, sebuah penelitian yang dibukukan perlu diberikan pengantar mengenai konsep penelusuran data dan sebagainya.

Apakah informan itu memberikan data yang akurat?

Saya pikir tidak ada data yang benar-benar akurat. Setiap informan pasti membawa kepentingan, dan itu sah. Jika kita melihat sebuah gambar, akan ada penafsiran yang berbeda dari tiap orang. Itu karena mereka punya sudut pandang dan kepentingan yang berbeda. Prinsip saya, ketika tiga orang yang tidak saling mengenal memberikan pernyataan yang sama, maka data itu bisa dianggap valid.

Dalam beberapa pemberitaan di media, Ramadhan Pohan mengatakan bahwa dia dan Anda dulu sangat dekat. Benarkah demikian?

Kalau Pohan bisa berbohong dan menuduh saya, bisa jadi juga dia berbohong mengenai kedekatan saya dengannya (**lihat lampiran 8 hal 129**). Saya bahkan tidak pernah tinggal di apartemennya.

Waktu itu dia memang pernah membantu saya mendapatkan data ketika dia masih di Washington DC sebagai wartawan Jawa Pos. Dari Ramadhan Pohan saya tahu kalau dia pernah bertugas di Balkan. Dia memberikan data bahwa uang yang dikumpulkan untuk Solidaritas Bosnia digunakan oleh Probosutedjo. Bank Jakarta menjadi "gemuk" karena dapat dana dari uang itu. Selain itu Ramadhan Pohan juga memberikan beberapa data korupsi di Balkan. Namun setelah itu tidak ada komunikasi sama sekali sampai buku MGC ini diperdebatkan.

Bagi saya, kalau ada orang menyerang saya sampai tiga kali tentang hal yang tidak saya tulis berarti justru ada sesuatu di balik itu.

Ramadhan Pohan juga pernah menuduh Anda tidak Indonesianis?

Ah biasa itu dia bilang seperti itu. Saya jadi ingat masa orde baru dulu. Siapapun yang mengkritik pemerintahan pasti akan mendapat sebutan tidak Indonesianis atau anti Pancasila. Sebutan itu digunakan untuk memojokkan saja. Saya tidak ambil pusing, biarkan saja.

Bicara tentang keluarga Anda, dari mana Anda mendapat semangat penegakan keadilan seperti ini?

Ayah saya, Haryono Aditjondro adalah seorang hakim yang sangat jujur. Sebelum itu dia bekerja sebagai pengacara dan membuka kantor pengacara. Namun itu tidak lama, dia menganggap bahwa menjadi pengacara justru akan berhadapan dengan orang-orang salah yang butuh pembelaan. Ia pun memutuskan untuk menjadi hakim.

Ayah saya sering mendapat suap agar terdakwa sebuah perkara yang dia tangani mendapat keringanan. Namun semuanya dia tolak. Saya bisa bilang, kalau Hoegeng menjadi ikon polisi yang jujur, Haryono Aditjondro merupakan ikon hakim yang jujur.

Sewaktu ayah saya akan meninggal, dia sempat meminta maaf kepada anak-anak karena tidak memiliki apa-apa untuk diwariskan ke anak-anaknya. Saya kemudian berkata, "Bapak tidak perlu minta maaf, kami semua sangat beruntung karena diwarisi sikap jujur."

Sementara ibu saya, dia mewariskan semangat peka terhadap berbagai kebudayaan. Ibu saya sangat menentang feodalisme. Keluarga dari ayah saya memang masih keturunan ningrat dari pantai utara, masih satu trah dengan RA Kartini. Tapi dari kecil, kami semua dididik untuk anti feodal sehingga ayah saya menghapuskan gelarnya. Ibu saya berasal dari Belanda, maka banyak yang mengira bahwa saya ini bukan orang Indonesia. Padahal saya lahir di Pekalongan dan besar di berbagai tempat di Indonesia. Sejak kecil, saya terbiasa hidup berpindah-pindah dari Pekalongan-Belanda-Banyuwangi-Pontianak-Makassar (sampai bapak pensiun)-Papua dan terakhir Semarang. dan sekarang berdomisili di Yogyakarta. Saya ke Belanda itu sewaktu masih kecil, usia tiga tahun. Saya dan kakak saya ikut ibu ke Belanda tiga tahun lamanya, lalu saya kembali lagi ke Indonesia. Tapi paling lama tinggal di Makassar. Jadi di rumah, keluarga kami menggunakan tiga bahasa Indonesia-Makassar-Belanda.

Selama ini Anda bekerja secara independen. Apa yang melandasi hal itu?

Penelitian saya ini kan memang independen, tidak perlu proposal dan sumber dana. Sekarang coba saya tanya, siapa yang mau mendanai penelitian mengenai korupsi kepresidenan? Tentang kekerasan di Papua misalnya? Penelitian saya dilakukan ketika semua konflik panas itu bergulir. Mana ada penyandang dana yang mau menanggu risiko melanggar tabu-tabu di Indonesia. Lagipula ini adalah hobi saya. Kalau ada orang yang hobi mengkoleksi perangko, hobi saya adalah mencari data-data korupsi.

Jika ada orang yang memilih memacu adrenalinnya dengan naik gunung, saya memilih memacu adrenalin lewat pemberantasan korupsi.

Saya memang bekerjasama dengan informan-informan yang memberikan data mengenai korupsi kepresidenan, namun sebatas itu. Dan saya tidak akan menyebutkan siapa informan saya kepada

publik sampai kapanpun. Tidak ada siapa-siapa di belakang saya. Dari pemerintahan Soeharto hingga SBY semua saya teliti.



www.undp.or.id

George dalam The 60th Anniversary of The Universal Declaration of Human Rights: Bappenas and UNDP Promote Poor Peoples Human Rights' yang diselenggarakan oleh Bappenas, UNDP, OHCHR, 10 Desember 2008.

Mengapa Anda sering memosisikan diri sebagai oposisi?

Karena saya rasa terlalu banyak hal yang dianggap tabu. Berbicara tentang negara, kita dilarang berbicara tentang federalisme. Bicara soal ekonomi tidak boleh bicara sosialisme yang identik dengan komunisme. Jadi saya ingin menelanjangi hal-hal yang selama ini ditutupi. Itu yang mendorong saya menjadi seperti ini. Oposisi itu anti kemapanan. Anti terhadap hal yang ditabukan. Misalnya, Indonesia sudah bebas bicara federalisme, saya tidak perlu lagi berbicara tentang itu. Misalnya, yang non muslim sudah tidak alergi terhadap orang yang bicara negara agama. Saya ini pendobrak kemapanan. Melawan *mainstream*. Di pihak lain saya memiliki fungsi sebagai penghubung di antara unsur, kultur, komunitas, dan bangsa yang berbeda.

Anda sepertinya tidak gusar dengan berbagai diskusi yang memojokkan Anda?

Sejak dulu saya terbiasa bertemu orang baru, berdiskusi, dan berdebat. Sejak saya menjadi wartawan Tempo di tahun 1979 pun saya sudah sering bergesekan dengan Kodim. Waktu masih mengajar di Universitas Kristen Satya Wacana, saya pernah berurusan dengan Dandim hanya gara-gara membaca puisi Taufik Ismail yang berjudul *Aku Ingin Menulis Puisi Yang* (**lihat lampiran 9 hal. 130**). Mereka mempermasalahkan bait "Aku ingin menulis syair yang mencegah kopral-kopral tak pernah bertempur agar berhenti menempelengi sopir-sopir oplet yang tarikannya payah" serta bait "Aku ingin menulis puisi yang mencegah kemungkinan pedagang-pedagang jepang merampoki kayu-kayu rimba di Kalimantan, melarang penggali-penggali minyak dan penanam modal mancanegara menyuapi penguasa-penguasa yang lemah iman, dan melarang sogokan uang pada pejabat bea-cukai serta pengadilan".

--George, yang menyebut dirinya sebagai generasi pasca proklamasi kemerdekaan, kerap bersinggungan dengan militer. Ia pernah merasa bangga pada kesatuan tersebut. Namun di sisi lain, sejak tahun 1960, ia mulai merasa terganggu dengan sikap militer yang cenderung represif dan penuh kekerasan. Pandangan George tentang militer disampaikannya secara lugas dalam makalah "DINAMIKA MILITER DALAM PERJALANAN HIDUP SAYA: SEBUAH KESAKSIAN PRIBADI" (**lihat lampiran 10 hal. 133**).----

Sebelum itu, sewaktu saya masih tinggal di Semarang dan masih tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), saya pernah berurusan dengan polisi gara-gara menulis surat terbuka kepada presiden tentang penggundulan hutan.

Setelah ini apa rencana Anda ke depan?

Saya akan terus membayangi Cikeas. Pekerjaan saya ke depan masih banyak. Banyak sumber data baru dan informan yang datang untuk melengkapi buku MGC. Seperti yang sudah saya katakan berkali-kali, korupsi yang terjadi karena oligarki itu sulit diberantas karena sudah menjadi sebuah sistem.

Curriculum Vitae

George Junus Aditjondro

1991: Master of Science (M.S.), Cornell University, Ithaca, N.Y., dengan tesis tentang proses belajar tentang pengembangan masyarakat di antara pimpinan dan staf Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa Irian Jaya (YPMD-Irja)

20 Januari 1993: Philosophical Doctor (Ph.D.), Cornell University, Ithaca, N.Y., dengan tesis tentang proses pendidikan publik tentang dampak pembangunan bendungan Kedungombo di Jawa Tengah.

Pekerjaan:

1971-1979: Jurnalis Majalah TEMPO.

1981-1989: Pekerja Pengembangan Masyarakat, a.l. Sekretariat Bina Desa (Jakarta), WALHI, dan Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa Irian Jaya (YPMD-Irja).

1989-2002: Dosen Program Pasca-sarjana Studi Pembangunan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Murdoch University (Perth, Western Australia), dan University of Newcastle (Newcastle, NSW, Australia).

Sejak 1994, meneliti penyebaran harta jarahan keluarga dan kroni Soeharto ke belasan negara di dunia.

Sejak November 2002: Konsultan Penelitian & Penerbitan Yayasan Tanah Merdeka, Palu.

Sejak September 2005: ikut mengampu mata-mata kuliah Marxisme, Metodologi Penelitian, dan Gerakan Sosial Baru di Program Studi Ilmu, Religi dan Budaya (IRB), Program Pasca Sarjana, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Lampiran 1

Dialog & Mubahatsah 'Alim Ulama se-Jawa Tengah mengenai PLTN Muria menurut perspektif Fiqih, diselenggarakan PCNU Jepara-Kudus dalam rangka Harlah NU Ke-81 di Jepara, hari Sabtu, 1 September 2007.

SELAMAT TINGGAL, BANDENG PRESTO,

SELAMAT DATANG, BAYI-BAYI RADIO-AKTIF!

Dampak rutin dan akumulatif akibat pengoperasian PLTN di Semenanjung Muria yang nyaris terlupakan

George Junus Aditjondro[1]

SYUKUR ALHAMDULLILAH, saya ucapkan atas undangan PC NU Jepara, untuk ikut meramaikan acara Dialog dan Mubahatsah Alim Ulama se Jawa Tengah di Jepara. Dengan demikian, saya bisa bersilaturahmi dengan para Nahdliyin se Jawa Tengah, khususnya dari kawasan Jepara, Kudus, Pati dan Rembang, lengkapnya dari seluruh Semenanjung Muria, yang mendapat kehormatan dari para penguasa di Jakarta untuk menjadi tapak PLTN pertama yang mau dibangun oleh orang-orang pintar dari Jakarta.

Saya bersyukur, karena dengan demikian dapat kembali memperkuat gerakan anti-PLTN yang dicetuskan oleh WALHI di tahun 1980, 27 tahun lalu. Saya bersyukur, karena dengan menghadiri acara di pantai barat Semenanjung Muria ini, saya dapat menggenapi pelebaran sayap gerakan ini di Muria, yang saya mulai bersama kawan saya, M. Nasihin Hasan, sekarang Ketua Lakpesdam NU Nasional, yang waktu itu selain menjadi Direktur LP3M, juga menjadi Ketua Presidium WALHI, di mana saya menjadi Wakilnya. Kami berdua memulai gerakan penyadaran masyarakat di kampung orangtua Mas Nasihin Hasan di Rembang, di pantai timur Semenanjung Muria.

Mari kita kembali ke orang-orang pintar dari Jakarta, yang mau membangun PLTN ini. Mereka memang pintar, karena tahu seluk beluk membangkitkan tenaga listrik dari turbin yang digerakkan oleh uap dari air yang direbus oleh panas yang timbul akibat terurainya proton dan elektron dari atom-atom uranium di isotop sekecil isi potlot di reaktor nuklir. Sayangnya, orang-orang pintar ini tidak memikirkan akibat perbuatan mereka, khususnya dampak rutin dan dampak akumulatif yang harus ditanggung oleh penduduk di sekitar Semenanjung Muria (lihat Aditjondro 2003). Karena dalam forum ini akan ada sepuluh orang pembicara yang pintar-pintar, termasuk Menteri Negara Riset dan Teknologi, yang menjadi pembicara kunci, maka

sebagai pembicara yang nyaris juru kunci, saya akan fokuskan pada salah satu dampak rutin dan salah satu dampak akumulatif pembangunan dan pengoperasian PLTN ini.

Saya memberanikan diri untuk bicara di forum alim ulama yang terhormat ini, bukan karena saya orang pintar di bidang nuklir, tapi juga bukan orang yang *keminter*. Saya cuma mau bicara di sini, sebagai orang yang pernah meninjau dampak pembangunan PLTN di Semenanjung Bataan, Filipina, dan di Teluk Veracruz di Mexico. Kita perlu belajar dari pengalaman tragis bangsa Filipina, yang harus membayar hutang pembelian reaktor nuklir sebanyak 2,3 miliar dollar kepada maskapai Westinghouse di AS, walaupun tidak sampai menghasilkan satu watt listrik buat rakyat Filipina, setelah pemerintah Corazon Aquino, menghentikan pembangunan reaktor nuklir itu, yang dibeli oleh Ferdinand Marcos, untuk keuntungan kroninya, Hermano Disini (Eurodad 2007).

DAMPAK RUTIN: POLUSI AIR PANAS

TENTU saja, yang pertama kali dan seterusnya paling menderita dampak pembangunan sebuah reaktor nuklir, adalah para nelayan di sekeliling Semenanjung Muria. Sebab pada saat tapak nuklir seluas belasan, mungkin puluhan hektar, diratakan untuk pembangunan reaktor nuklir, menara pendinginnya, dan semua bangunan pelengkapnya, termasuk gardu listriknya, ke mana larinya tanah hasil perataan perbukitan di Desa Balong? Tentu saja ke laut, sebab laut, bagi banyak orang, memang keranjang sampah terbesar ciptaan Tuhan buat orang-orang malas yang tidak menghargai kebersihan. Nah, lumpur ribuan ton itu akan menghancurkan karang-karang di tepi pantai, tempat bersembunyi ikan-ikan yang juga harus bobo di malam hari.

Ikan-ikan yang selamat dari perataan tanah buat kompleks PLTN itu, menghadapi ancaman berikutnya: polusi air panas. Setiap pembangkit listrik yang menggunakan tenaga uap untuk menggerakkan turbin yang satu sumbu dengan generator listrik, selalu memerlukan menara pendingin uap panas itu. Kalau tidak, pembangkit tenaga listrik itu bisa meledak saking panasnya. Untuk itu, selain melalui menara pendingin, yang prinsip kerjanya sama seperti reaktor dalam mobil, uap yang telah berubah bentuk menjadi air panas perlu dikembalikan ke alam. Makanya, PLTU dan PLTN, selalu dibangun dekat sungai atau di tepi laut, supaya berjuta-juta liter air panas itu bisa dibuang ke sungai atau laut. Dari situlah timbul apa yang disebut polusi air panas (Aditjondro 2003: 221-223).

Nah, air panas yang merupakan produk sampingan PLTU dan PLTN, yang terlalu banyak untuk mendirikan pemandian air panas di Balong, terlalu banyak juga buat nener-nener di perairan sekeliling Semenanjung Muria,

yang dicari oleh petani tambak di sekeliling Muria untuk menghasilkan ikan bandengnya. Bandeng yang selanjutnya dilego ke Juana untuk dijadikan bandeng presto.

Makanya, yang secara rutin akan menderita kerugian ekonomis dari pengoperasian PLTN Muria adalah para nelayan pengumpul nener bandeng, para petani tambak, para produsen bandeng presto, dan akhirnya, toko-toko bandeng presto di sepanjang Jalan Pandanaran, di kota Semarang. Itulah sebabnya, mengapa saya katakan: Selamat Tinggal, Bandeng Presto! di judul makalah saya.

DAMPAK AKUMULATIF: BAYI-BAYI RADIO-AKTIF

WAKTU reaktor nuklir di Chernobyl, waktu itu masih termasuk Uni Soviet, meledak, karena macetnya sistem pendinginan reaktor itu, bukan cuma orang di Uni Soviet yang terkena dampak radio-aktifnya, tapi juga orang-orang di Jerman (saya lupa, Timur atau Barat). Soalnya, debu radio-aktif yang dibawa angin di udara, akhirnya jatuh ke rumput-rumput hijau di Jerman. Rumput hijau dimakan oleh sapi perah, dan susu sapi itu diminum oleh manusia. Bagaimana akibatnya kalau manusia terlalu banyak minum susu yang radio-aktif, tanya saja pada pak Iwan Kurniawan dan pak Budi Widianarko, ahli fisika nuklir dan biologi lingkungan yang satu panel dengan saya.

Semenanjung Muria, sependek pengetahuan saya, tidak terkenal sebagai daerah sapi perah. Itu harus ke Boyolali, dekat Salatiga, di mana saya sering minum susu sapi segar sebelum saya terpaksa hijrah ke Australia. Tapi radio-aktivitas dari PLTN Muria, bisa juga mempengaruhi kesehatan penduduk di sini, walaupun tidak melalui susu sapi. Sebab bayi-bayi di sini, masih banyak yang minum air susu ibu (ASI), *kan*? Walaupun kadang-kadang harus berebutan dengan bapaknya.

Nah, kalau tanaman dan hewan di sekeliling PLTN Muria tercemar radio-aktivitas, maka secara akumulatif, lewat susu ibu, bayi-bayi di Semenanjung Muria akan mendapatkan dosis radio-aktivitas yang melewati ambang batas. Boleh jadi, bayi dan balita di Semenanjung Muria akan menjadi semakin hiper-aktif, sebab coklat saja sudah dapat membuat bayi dan balita hiper-aktif, apalagi radio-aktivitas bocoran dari reaktor nuklir. Mudah-mudahan saja, BATAN akan menciptakan lapangan kerja khusus bagi bayi-bayi radio-aktif dari Muria, sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial mereka.

TITIKRAMA ORDE BARU

Menyadari hal-hal di atas ini, serta berbagai pertimbangan lain yang sudah diungkapkan oleh pembicara-pembicara lain sebelum dan sesudah saya,

dapatlah kita fahami penolakan masyarakat Semenanjung Muria, khususnya lagi di Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, terhadap pembangunan PLTN ini. Makanya, mengherankan sikap Polres Jepara, yang memanggil Setyawan Sumedi, Koordinator Persatuan Masyarakat Balong (PMB), pasca demo besar-besaran menolak rencana PLTN Muria di desa itu (*Suara Merdeka*, 7 Agustus 2007).

Semestinya BATAN lah, atau Menteri Ristek sekalian, yang dipanggil ke Mabes Polri, untuk menjelaskan mengapa pemerintah tetap mau ngotot membangun PLTN itu, gagasan peninggalan Menteri Ristek BJ Habibie yang kini dihidup-hidupkan kembali. Ataukah ini menunjukkan, bahwa rezim Orde Baru tidak pernah mati, tapi hanya bermetamorfosa, bertitikrama, menjadi rezim baru yang tetap mau mewujudkan impian-impian lama?

Titikrama Orde Baru ini dapat dilihat dari siapa yang sudah menyatakan minat untuk membangun PLTN Muria ini, kapan pernyataan itu dibuat, dan pada kesempatan apa. Maskapai penghasil migas swasta terbesar di Indonesia, Medco, telah menyatakan minatnya untuk membangun PLTN Muria. Saat kunjungan tiga hari Presiden SBY ke Seoul, Korea Selatan, akhir Juli lalu, Medco Energi Internasional dan Korea Hydro and Nuclear Power Co Ltd menandatangani perjanjian awal untuk pembangunan reaktor tenaga nuklir, dengan kontrak senilai 8,5 miliar dollar AS (sekitar Rp 78,5 trilyun). Kontrak itu ditandatangani di hadapan Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro di Seoul, hari Rabu, 25 Juli lalu. Seolah-olah sudah diangkat menjadi jurubicara Medco, Purnomo Yusgiantoro menyatakan bahwa batas waktu pembangunannya sudah ditetapkan pada tahun 2016, dan reaktornya dijadualkan akan mulai beroperasi pada tahun 2017 (*Suara Merdeka*, 26 Juli 2007).

Model-model menandatangani kontrak dengan perusahaan asing, di saat-saat mendampingi Kepala Negara dalam muhibahnya ke luar negeri, memang merupakan salah satu modus operandi bisnis yang dekat dengan kalangan Istana. Memang, Medco dibangun oleh Arifin Panigoro di masa-masa jaya Soeharto, antara lain dengan merangkul besan Soeharto, Eddi Kowara Atmawinata, mertua Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut (Aditjondro 2006: 26, 288, 364-5, 405, 411-2, 443-4, 451).

Pasca Soeharto, Arifin mula-mula mendekat ke Amien Rais, lalu setelah kelihatan bahwa kans Amien Rais untuk menjadi Presiden pengganti Habibie sangat kecil, ia mendekat ke Megawati Soekarnoputri dengan masuk ke PDI-P, dan perhitungannya kali ini tepat. Setelah popularitas Megawati merosot, ia keluar dari PDI-P, dan bersama Laksamana Sukardi, mendirikan partai baru. Boleh jadi, ia sekarang sedang mendekat ke SBY, sambil melihat-lihat, apakah SBY akan berhasil merebut masa jabatan kepresidenan yang kedua, atau tidak.

Medco Energi Internasional yang sudah teken kontrak dengan maskapai Korea di atas untuk membangun PLTN di Muria, memang sedang melakukan diversifikasi dari pertambangan migas, ke proyek-proyek energi yang lain. Di Batam, Medco memiliki dua perusahaan pembangkit tenaga listrik, yakni PT Mitra Energi Batam yang mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Panaran I Batam yang sejak 2004 membangkitkan 2 x 27,75 MW, dengan nilai investasi US$ 30 juta; dan PT Dalle Energy Batam yang membangun PLTG Panaran II Batam dengan kapasitas 2 x 27,75 MW pula (*Warta Ekonomi*, 20 Agustus 2007: 31).

Itu belum semua. Medco juga pemilik 5% saham PT Energy Sengkang yang mengoperasikan pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) Sengkang di Sulawesi Selatan yang berkapasitas 135 MW. Baru-baru ini, Medco telah ditunjuk untuk mengoperasikan dan memelihara PLTU Tanjung Jati B dengan kapasitas 2 x 660 MW. Kemudian, bersama Ormat International Inc. dari AS dan Itochu Corp. dari Jepang, Medco juga telah menyatakan minatnya untuk membangun Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi di Sarulla, Sumatera Utara, dengan kapasitas 330 MW (*Warta Ekonomi*, 20 Agustus 2007, hal. 31-32).

Makanya, dari sudut logika bisnis, PT Medco Energi Internasional Tbk yang telah menjual 19,97 % sahamnya kepada Mitsubishi Corporation dari Jepang (Kompas, 27 Agustus 2007), masuk akal bahwa perusahaan yang dipimpin oleh Hilmi Panigoro, adik kandung Arifin Panigoro, kini berusaha masuk ke pembangkitan listrik tenaga nuklir. Iming-imingnya kepada calon konsumennya, adalah bahwa harga listriknya bisa US$ 3 sen per kWh, lebih rendah dari pada harga listrik yang dihasilkan oleh PLTU atau PLTGU. Namun diakui oleh Hilmi Panigoro, bahwa "mendapat dukungan dari masyarakat adalah tantangan utama yang harus kita hadapi" (*Warta Ekonomi*, 20 Agustus 2007: 32).

TOLAK PLTN!!!

Dari uraian di atas kita bisa menyimpulkan, bahwa rencana pembangunan PLTN, bukanlah karena krisis tenaga listrik yang sering didengung-dengungkan, sebab dengan berbagai pembangkit yang ada terutama PLTA, PLTU, dan PLTGU kebutuhan listrik untuk industri dan rumah tangga di Jawa sudah dapat terpenuhi. PLTU dan PLTGU, juga tidak akan menambah ketergantungan kita pada bahan baku dari luar negeri, sebab batubara dan gas kita berlimpah. Sedangkan untuk keperluan PLTN, kita harus mengimpor uranium dari Australia, untuk dijadikan isotop yang 'dibakar' di dalam reaktor PLTN, yang menimbulkan permasalahan baru lagi, yakni pengamanan limbah nuklirnya.

Jadi sebenarnya, pembangunan PLTN lebih merupakan ambisi kaum pengusaha yang dekat ke Istana, atau mendekat ke Istana, dengan menawarkan iming-iming dukungan buat Pemilu dan Pilpres 2009. Sementara dampaknya, begitu banyak, dan sangat sulit dikendalikan. Karena itu, mengutip kata penyair Wijih Tukul, menghadapi rencana pembangunan PLTN di Semenanjung Muria ini: Lawan!

Yogyakarta, 31 September 2007.

Kepustakaan:

Aditjondro, George Junus (2003). *Korban-Korban Pembangunan: Tilikan Terhadap Beberapa Kasus Perusakan Lingkungan di Tanah Sir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Bagian II: Dilema Seputar Pembangunan PLTN, hal. 105 s/d 272.

------------ --- (2006). Korupsi *Kepresidenan: Reproduksi oligarki berkaki tiga: Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa*. Yogyakarta: LkiS.

Eurodad (2007). *Skeletons in The Cupboard: Illegitimate Debt Claims of The G7*. Brusssels: Eurodad.

Sumber:bintangtenggara.multiply.com

Lampiran 2

Harian Suara Merdeka, 18 Oktober 1994

Pasal 134:

"Penghinaan dengan sengaja terhadap presiden dan wakil presiden dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500"

Haatzaai Artikelen

Oleh Otto Adi Yulianto

Beberapa hari belakangan ini, secara bertubi-tubi pers gencar memberitakan pemanggilan Dr. George Junus Aditjondro (GJA) oleh Polresta Yogyakarta. Dosen Pasca Sarjana UKSW ini telah dijadikan tersangka dalam perkara pidana "menghina suatu kekuasaan yang ada di negara Indonesia dengan kata-kata/ ucapan secara lisan". Pasal yang dikenakan adalah pasal 207 KUHP, salah satu dari sekumpulan pasal dalam kitab undang-undang pidana di Indonesia yang terkenal dengan julukan *haatzaai artikelen.* Yang menarik dan relevan untuk dilakukan bukanlah membahas berbagai rekaan yang muncul atau ikut-ikutan mereka-reka dan berspekulasi mengenai sebab-musabab mengapa Doktor lulusan Cornell University yang peneliti dan ahli dampak bendungan serta masalah Timor Timur ini hendak "dijaring" dengan salah satu pasal yang termasuk dalam *haatzaai artikelen* ini. Sebab, selain hal itu tidak akan memberikan banyak manfaat, juga akan merepotkan.

Seperti yang telah dikatakan oleh yang bersangkutan, GJA sendiri juga tidak tahu-menahu. Menurutnya, dalam surat panggilan hanya tertulis berdasarkan laporan polisi no. pol: LP/K/VIII/1994/OPS tanggal 31 Agustus 1994. Tidak jelas dan tidak disebutkan kapan, di mana, serta dalam kegiatan/ acara apa sangkaan ini dilakukan oleh GJA. Hal ini baru akan jelas bila sudah terjadi penyidikan oleh pihak kepolisian nantinya. Justru yang terasa penting dan perlu untuk digagas adalah keberadaan *haatzaai artikelen* dalam sejarah Indonesia mutakhir itu sendiri. Perdebatan, kritikan, serta gugatan --jika tidak dikatakan sebagai aksi protes-- terhadap keberadaan pasal-pasal warisan hukum kolonial Belanda ini sebenarnya sudah berlangsung lama dan seru, walau belum memuaskan dan masih jauh memberikan hasil seperti yang diharapkan oleh mereka yang mempermasalahkan. Bahkan selama perdebatan masih berlangsung, pasal-pasal tersebut telah menambah lagi jumlah daftar korbannya. Lewat adanya kasus yang menimpa GJA ini, membangkitkan kembali gugatan terhadap keberadaan *haatzaai artikelen* --yang sempat redup belakangan ini-- terasa sebagai sesuatu yang perlu untuk dilakukan.

Warisan Kolonial

Haatzai artikelen, sebutan populer untuk sekumpulan delik pidana yang mengancam mereka "yang menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian, atau pun penghinaan terhadap penguasa negara", mulai diterapkan oleh penguasa Hindia Belanda pada tanggal 15 Maret 1914. Delik-delik ini merupakan hasil reproduksi dari *British Indian Penal Code*, kitab undang-undang hukum pidana yang diberlakukan di India ketika masih dalam penjajahan kolonialisme Inggris. Keduanya dibikin dan digunakan untuk menindas gerakan aktivis nasionalis di masa itu. Untuk konteks Hindia Belanda, sejarah telah membuktikan dan mencatat para korbannya. Antara lain Soekarno, aktivis nasionalis yang kelak di kemudian hari menjadi proklamator kemerdekaan Indonesia dari kolonialisme Belanda.

Selanjutnya, lewat pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, sejumlah pasal yang termasuk dalam *haatzaai artikelen* mendapat legitimasi legal-formal untuk diterapkan di negara pasca-kolonial Indonesia. Pasal yang berbunyi "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini" telah memuluskan jalan pewarisan pasal-pasal bikinan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pasal-pasal warisan tersebut yang sampai kini masih digunakan dalam kitab undang-undang hukum pidana di Indonesia tidak hanya pasal 207 saja.

Masih banyak yang lainnya, misalnya pasal 134, 136, 137, 154, 155, 156, 157, 160, 161, dan 208. Yang menarik dan memprihatinkan, bila di dalam kitab undang-undang hukum pidana di negeri Belanda sendiri pasal-pasal *haatzaai artikelen* ini tidak dicantumkan, justru di negara pasca-kolonial Indonesia pasal-pasal ini dipertahankan secara gigih dan dirawat dengan baik. Di negeri Belanda memang pernah ada usaha untuk memasukkan pasal-pasal *haatzaai artikelen* dalam *Wetboek van Strafrecht* (KUHPidana negeri Belanda) ketika dilakukan pembaharuan terhadap KUHPidana tersebut sekitar tahun 1918. Namun pasal-pasal ini jarang digunakan dan kemudian dicabut, tetapi tetap digunakan di negara jajahannya, Hindia Belanda.

Memang, *haatzaai artikelen* bukanlah satu-satunya warisan kolonial yang telah dilestarikan terus-menerus hingga tata-sosial Orde Baru. Seluruh pranata hukum dan hukum acara pidana kolonial dengan sedikit revisi editorial, tidak substansial, juga dirawat dengan baik. Tak heran bila banyak analis sosial mutakhir menyatakan bahwa negara kolonial Hindia Belanda dan negara pasca kolonial Indonesia punya kemiripan dan kesinambungan garis keturunan yang kokoh. Bahkan keduanya semakin lama semakin sulit untuk dibedakan (Ariel Heryanto: 1993).

Algojo Demokrasi

Dr. Adnan Buyung Nasution, aktivis hak asasi manusia yang juga sangat gencar melancarkan kritik dan protes terhadap digunakannya pasal-pasal *haatzaai artikelen* dalam hukum di Indonesia mutakhir, menyebutkan bahwa pasal-pasal ini merupakan algojo demokrasi. Yang diancam oleh *haatzaai artikelen* ini adalah pikiran manusia. Delik tersebut secara substantif menghukum pikiran rakyat yang berbeda dengan penguasa negara.

Bila dalam *British Indian Penal Code* pasal-pasal *haatzaai artikelen* tergolong delik materiil yakni perlu adanya pembuktian apakah perbuatan yang dipersangkakan tersebut telah menimbulkan dampak riil atau tidak-- namun justru di dalam KUHPidana Hindia Belanda, yang kemudian diadopsi oleh negara pasca-kolonial Indonesia, lebih parah lagi. Ia telah menjadi delik formal, yakni jenis delik di mana suatu tindakan yang melanggar ketentuan undang-undang dianggap sudah selesai dengan dilakukannya perbuatan tersebut. Jadi tidak ada kewajiban negara untuk membuktikan apakah tindakan tersebut telah menimbulkan "rasa permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap penguasa negara" atau tidak.

Interpretasi terhadap pasal-pasal ini sangat didominasi oleh subyektifitas negara yang sifatnya dapat sangat elastis. Tak heran bila *haatzaai artikelen* juga terkenal dengan sebutan pasal-pasal karet.

Dalam tata-sosial Indonesia orde baru, *haatzaai artikelen* ternyata telah banyak makan korban pula. Di awal tahun 1970-an, pasal-pasal ini telah menimpa mereka yang bergiat dalam dunia pers. Dengan alasan surat kabar mingguan *Sendi* melanggar *haatzaai artikelen*, Ashadi Siregar --yang waktu itu (1973) bertindak sebagai pemimpinnya-- ditindak oleh aparat keamanan di Yogyakarta. Dua tahun sebelumnya, Tengku Dzulkafli Hafaz, pimpinan harian Nusantara, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dihukum pidana setahun penjara dengan dalih melanggar *haatzaai artikelen* juga.

Semenjak adanya SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers) yang mempunyai spesialisasi mengkontrol pers lewat ancaman pembredelan, tampaknya *haatzaai artikelen* masih dilanggengkan. Kali ini yang menjadi korbannya tidak lagi aktivis pers, tetapi para aktivis mahasiswa. Dalam catatan sejarah, daftar aktivis mahasiswa yang pernah terjegal dengan pasal-pasal tersebut cukup panjang. Sebut saja di antaranya 36 mahasiswa yang melakukan gerakan protes tahun 1978 yang diadili di Medan, Palembang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Ujung Pandang, dan Bandung. Sebelas tahun kemudian, *haatzaai artikelen* juga digunakan untuk mengadili Bambang Istinugroho di Yogyakarta. Selanjutnya, pada tahun yang sama, pasal-pasal ini telah mendera 6 orang aktivis mahasiswa ITB yang mengadakan aksi menolak kedatangan Mendagri --kala itu-- Rudini di kampus mereka.

Beathor Suryadi, alumnus Universitas Pancasila yang telah memimpin Komite Mahasiswa untuk Penurunan Tarif Listrik, diadili dengan pasal-pasal yang termasuk dalam *haatzaai artikelen* dengan tuduhan menyebarkan selebaran yang mengkritik penguasa negara.

Awal tahun 1990-an ini, *haatzaai artikelen* semakin marak diandalkan untuk menggertak dan mengancam para aktivis mahasiswa. Tahun 1991, pasal ini diandalkan untuk mengancam aktivis mahasiswa UKSW di Salatiga yang bergiat di Yayasan Geni dengan dalih peredaran kalender Tanah untuk Rakyat. Delik yang sama juga digunakan untuk mengadili dua orang aktivis mahasiswa di Semarang--Poltak Ike Wibowo (mahasiswa Unisula) dan Lukas Luwarso (mahasiswa Undip)-- antara tahun 1992-1993, karena secara berani mengadakan pentas seni dengan tema Golput di halaman kampus Undip. Akhir 1993, Nuku Soeleman diadili dan dihukum pidana dengan pasal-pasal yang termasuk dalam *haatzaai artikelen* karena kritikannya lewat stiker. Selang beberapa bulan berikutnya, masih dalam tahun yang sama, 21 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa diadili dengan *haatzaai artikelen* setelah ditangkap pada waktu mengadakan demonstrasi menentang "*security approach*" di gedung DPR, Jakarta.

Dalam tahun 1994 ini, tampaknya *haatzaai artikelen* masih saja menambah daftar korbannya. Tidak lagi hanya aktivis mahasiswa, kali ini aktivis LSM dan tokoh intelektual yang punya reputasi nasional maupun internasional. Dr. Mukhtar Pakpahan SH dan beberapa pimpinan LSM serta aktivis buruh di Sumatera Utara kini sedang diadili di Medan lewat dakwaan delik *haatzaai artikelen* juga. Yang terbaru adalah sangkaan yang menimpa Dr. George Junus Aditjondro, peraih penghargaan Kalpataru tahun 1986, seperti yang telah dikemukakan di awal tulisan.

Agenda Bagi Kedaulatan Rakyat

Korban *haatzaai artikelen* sudah sangat banyak. Namun ternyata yang menjadi bahaya terbesar bagi sejarah Indonesia mutakhir bukanlah obral tuduhan dan dakwaan pelanggaran terhadap pasal-pasal *haatzaai artikelen*. Yang perlu diperjuangkan oleh mereka yang mempermasalahkan penggunaan *haatzaai artikelen* dalam KUHPidana negara pasca-kolonial Indonesia tidaklah hanya sekedar penghapusan pasal-pasal tersebut, walau hal itu penting juga. Ini bukan akar permasalahan yang pokok. Ia bisa diganti atau pun berubah dengan baju yang lain dengan tugas yang tak jauh berbeda.

Ambil contoh penggunaan SIUPP, seperti yang telah disebutkan di atas. Yang perlu untuk dijadikan agenda bagi perjuangan sejarah Indonesia mutakhir adalah menghancurkan ketidaksederajatan kekuasaan antara penguasa negara dengan rakyatnya. Adalah suatu bahaya besar bila sampai terjadi,

penguasa negara hendak meneruskan struktur kolonial dan menggantikan kedudukan para penjajah dahulu. Padahal, seperti yang diakui dalam UUD 1945, Indonesia adalah negara republik yang berdasar atas kedaulatan rakyat.*****

--Otto Adi Yulianto, mahasiswa UKSW dan aktivis Yayasan GENI, Salatiga

Lampiran 3

SUARA INDEPENDEN No. 03/1 Agustus 1995

Pengadilan Politik: Hadiah di Tahun Emas

Pemberangusan oposisi terjadi ketika Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaan ke-50. Sri Bintang, Gus Dur, Permadi, aktivis AJI, PIJAR dan SMID, duduk berderet di bangku terdakwa. Seorang aktivis LSM diminta keterangan sebagai saksi di sebuah Polres. Tanpa sengaja, ia melihat papan tulis, di mana tergambar suatu skema. Dalam skema itu, tertulis berbagai nama organisasi dan tokoh-tokohnya. Misalnya, ada nama YLBHI dan di samping kanannya, tertulis Adnan Buyung Nasution. Lantas Forum Demokrasi, dan nama Abdurrahman Wahid. Ada juga nama AJI, *PIJAR*, SMID dan Walhi.

Tergerak oleh rasa ingin tahu, aktivis itu bertanya kepada polisi yang memeriksanya. "Apa makna skema itu ?" Dan, konon, kata si aktivis, si polisi menjawab, "itu daftar organisasi yang harus diawasi. Tokoh-tokohnya akan ditangkap." Aktivis, yang namanya juga ada di dalam skema itu, merasa sedikit grogi. Tapi, ia lanjutkan juga pertanyaannya, "orang-orangnya kan jelas, kenapa tidak ditangkap sekarang?" Dan, polisi itu menjawab, "mereka orang-orang pintar. Kami tidak bisa menangkapnya sekaligus. Tapi perintahnya sudah ada."

Apakah dialog itu benar-benar ada? Walahualam. Barangkali, hanya si aktivis dan pemeriksanya yang tahu. Namun, cukup jelas faktanya. Sejak awal 1995, yang juga ulang tahun emas kemerdekaan RI, banyak tokoh-tokoh oposisi dibuat sibuk oleh represi terhadap dirinya. Ada yang betul-betul ditangkap. Ada yang sekedar bolak-balik diperiksa. Ada yang diintimidasi, dan begitu takutnya sehingga mengungsi ke luar negeri. Bagaimana kisah-kisah "penjeratan" para oposan itu, tampaknya menarik untuk dicermati.

Berita akan adanya badai di kalangan LSM, sedikit terbocorkan ketika, mingguan *Gatra* yang dekat penguasa, membuat laporan utama berjudul "LSM Oposan", akhir Februari lalu. Para aktivis segera sadar. Bahwa corong penguasa itu, digunakan untuk melakukan pra-kondisi. Setidaknya, membuat opini, bahwa LSM-LSM itu "penjual bangsa" dan karenanya pantas untuk diberangus. Para aktivis telah mencium hawa panas: akan datangnya bahaya.

Dan, sasaran pertama, yang mendapat kehormatan untuk menjadi martir demokrasi adalah *PIJAR*. Pada awal Maret, sekretariat organisasi itu, diobrak-

abrik polisi. Sejumlah disket, komputer dan data diangkut ke Polres Jakarta Pusat. Tri Agus Siswowihardjo (TASS), pemimpin redaksi Kabar dari Pijar, ditangkap. Ia didakwa telah melakukan penghinaan terhadap presiden (134 KUHP). Karena artikelnya berjudul: Adnan Buyung Nasution, "Negeri Ini Dikacaukan oleh Orang yang Bernama Soeharto," dalam KDP Juni 1994, TASS diancam hukuman maksimum 7 tahun.

Tepat seminggu setelah TASS ditangkap, giliran AJI digrebek polisi. Ketika itu, AJI sedang menyelenggarakan halal bil halal di Hotel Wisata Internasional. Puluhan polisi, berseragam dan preman, menangkap Ahmad Taufik, Ketua Presidium AJI, Eko Maryadi, Wartawan *Independen*, dan Danang Kukuh Wardoyo, staf rumah tangga AJI. Mereka segera diangkut ke Polda. Ketiganya didakwa melakukan penghinaan terhadap presiden (134 KUHP), menyebarkan rasa permusuhan (154 KUHP) dan menyalahgunakan fungsi pers (pasal 19 UU Pokok Pers 1982). Sama seperti TASS, tiga orang AJI itu dapat dihukum maksimum 7 tahun. Alasan penangkapan aktivis AJI, adalah berita-berita dalam majalah *Independen*, nomor 9,10, 11, dan 12. Menurut kesaksian polisi di persi dangan, Polda mendapat pengaduan dari Menpen Harmoko karena berita dalam *Independen* nomor 10, yang memuat saham Harmoko di 32 media massa. Berita itu telah menyinggung perasaan Bung Moko, dan tak ayal menjadi lonceng kematian *Independen*. Buletin itu, kemudian dinyatakan terlarang oleh Kejaksaan Agung, 28 Maret 1995. "Sampai sekarang, di pengadilan tidak terbukti berita-berita itu telah menghina presiden atau menyebarkan permusuhan," kata Rita Serena Kalibonso, koordinator Tim Pembela Kebebasan Pers.

Yang ganjil juga, dalam dakwaan jaksa disebutkan berita Independen tentang Komnas HAM telah menghina pemerintah. Bunyi berita itu sebagai berikut," menurut banyak orang, Komnas dibuat untuk pemanis wajah pemerintah. Bagaimana bisa independen, kalau dananya dari pemerintah?" Ketika dikonfirmasi kepada Brigjen (Pol) Roekmini, salah seorang anggota Komnas HAM, "apakah Anda terhina dengan berita itu?" Ia dengan tegas menjawab," Saya tidak merasa terhina." Lho, kalau begitu yang terhina siapa?

Kebenaran hukum, tampaknya tidak begitu dipedulikan benar dalam gerakan pemberangusan oposisi itu. Yang penting, ada pasal dijerat. Kena atau tidak, urusan nanti. Kesan asal tangkap-dengan alasan berubah-ubah itu paling menyolok terlihat dalam kasus Sri Bintang Pamungkas. Gegap gempita soal bekas anggota DPR, memenuhi halaman muka semua surat-kabar, ketika aktivis AJI masih dalam pemeriksaan. AJI dan *PIJAR* langsung tenggelam, oleh dakwaan yang tak main-main terhadap Bintang: membahayakan keselamatan presiden.

Awalnya adalah demonstrasi di Jerman. Ketika Presiden Soeharto berada di negeri Helmut Koln itu, untuk menghadiri pameran Hannover, ia dihadang serangkaian demonstrasi. Yang paling seru terjadi di Dresden. Para demonstran sempat melempari Soeharto dengan serpihan kertas, dan menggoncang-goncangkan bis yang ditumpanginya. Dan, Sri Bintang yang kala itu sedang tour berceramah di berbagai kota di Jerman, dijadikan kambing hitam. Seolah-olah dialah bersama Goenawan Mohamad dan Yeni Rosa Damayanti- yang menggerakkan demonstrasi. Goenawan lolos dari terkaman, karena alibinya memang kuat. Dan, Yeni tak dapat dijangkau oleh aparat karena masih di Belanda.

Tinggallah Bintang yang jadi bulan-bulanan. Sejak mendarat di Cengkareng, April lalu, Bintang sudah diserbu intel. Ia dibuntuti kemana-mana. Dan hukuman - sebelum diputuskan pengadilan seolah telah dijatuhkan kepadanya. Pernah, Bintang dituding membahayakan keselamatan presiden (104 KUHP). Tuduhan itu tidak main-main, karena bila terbukti, bisa Bintang dijatuhi hukuman mati. Ia juga dihujat sebagai "menjelek-jelekkan nama bangsa di luar negeri."

Ketika proses penyidikan berlangsung, anggota DPR itu di-*recall* oleh partainya sendiri - PPP. Presiden pun menyetujui *recalling* itu. Dan, Bintang, seolah sudah dipastikan kesalahannya sebagai penggerak demonstrasi anti presiden.

Ketika pemeriksaan demi pemeriksaan dilakukan, terbukti semakin sulit mendapatkan bukti keterlibatan Bintang dalam demonstrasi. "Saya cuma menonton," kata Bintang. Hal itu, diperkuat oleh pengakuan LSM-LSM yang menyelenggarakan demonstrasi. Polisi, kemudian dengan mudahnya mengubah dakwaan kepada Bintang. Tuduhan demonstrasi gagal, sekarang, yang dimasalahkan isi ceramahnya di depan mahasiswa Berlin. Padahal, "isi ceramah itu tak beda dengan yang saya kemukakan dalam berbagai forum di tanah air," kata Bintang.

Merasa diperlakukan sewenang-wenang, Bintang tak tinggal diam. Ia menggugat Kejaksaan Agung ke PTUN karena lembaga itu melarang dirinya berpergian ke luar negeri. Padahal, sama sekali Bintang belum terbukti salah. Dan, dalam waktu dekat, Bintang juga akan menggugat Presiden Soeharto karena menyetujui *recalling* dirinya dari anggota DPR. "Saya sedang menyiapkan gugatan terhadap presiden," kata Bintang awal Agustus kepada *Suara Independen*. Bintang menjadi simbol oposisi Indonesia saat ini, antara lain, dengan perlawanannya yang gigih pengadilan politik yang direkayasakan kepadanya.

Pada waktu yang hampir bersamaan, rekayasa politik juga menimpa Permadi, seorang tokoh paranormal yang dikenal sebagai pengagum

Bung Karno. Permadi dituding telah menghina Nabi Muhammad, dalam ceramahnya di Yogya tahun lalu. Tetapi, anehnya, perkara itu baru diangkat sekarang. Awalnya, adalah Din Syamsuddin, seorang tokoh muda Golkar yang menyebarluaskan isi kaset rekaman ceramah Permadi yang telah dipotong-potong. Permadi didakwa melanggar pasal 106 KUHP dan diancam hukuman maksimal enam tahun.

Sidang Permadi saat ini sedang berlangsung di Yogya. Dan, banyak saksi yang mencabut keterangannya ketika dikonfrontir di pengadilan, termasuk saksi polisi. Dalam ceramah di UGM, Permadi sebetulnya hanya menanggapi pertanyaan peserta, Refli, dengan mengatakan "diktator bisa juga baik, kalau digunakan untuk kepentingan rakyat. Nabi adalah diktator yang baik." Oleh para perekayasanya, tambahan keterangan "diktator yang baik" itu dihilangkan, sehingga terkesan Permadi menghina Nabi. "Saya sungguh memuliakan Nabi," jawab Permadi di persidangan.

Tampaknya, tudingan menghina nabi, memang bukan masalah yang sesungguhnya. Pemerintah, hanya mencari-cari alasan untuk menyeret orang-orang vokal ke pengadilan. Permadi sendiri mendengar, ketika masih dalam tahanan polisi, seseorang mengatakan," carikan pasal apa saja. Pokoknya diproses." Menurut Arbi Sanit, pengamat politik UI, Golkar tampak bersemangat dalam mendorong proses Permadi. Analisa itu masuk akal, mengingat Permadi, yang selalu menyebut dirinya, "Penyambung Lidah Bung Karno" itu, dekat dengan Megawati Soekarno, Ketua PDI. Golkar ingin memanfaatkan setiap kesempatan untuk "membonsai" lawan politiknya.

Sebuah sumber menyebutkan, target utama dari pembersihan oposisi itu sebetulnya Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Ketua NU dan Megawati. Tetapi, bila sasaran utama belum tersentuh, orang-orang dekatnya lebih dulu "dikerjain". Gus Dur sendiri, tak lepas dari intrik politik, yang ingin menjatuhkannya. Ia kini sedang menghadapi tuduhan pencemaran nama baik, yang diajukan oleh Abu Hasan, rival politik yang dikalahkannya dalam Muktamar NU.

Konon, dalam sebuah rapat pembentukan pengurus NU, Gus Dur menolak memasukkan nama Abu Hasan karena tokoh itu menerima suap dalam pembangunan pelabuhan peti kemas Tanjung Priok. Abu, yang mendapat dukungan pemerintah ketika Muktamar NU itu, segera melaporkan Gus Dur ke polisi. Telah dua kali, pimpinan NU itu diperiksa polisi. Tetapi, hingga kini berkasnya masih terkatung-katung. Tak heran, bila orang memandang kasus Gus Dur, bukan sekedar kasus hukum, tetapi lebih banyak segi politisnya.

Meskipun tampak tenang-tenang menghadapi gugatan lawannya itu, Gus Dur menyadari adanya rekayasa besar di balik tuntutan yang menimpa tokoh-tokoh oposisi. "Mereka ingin membersihkan arena sebelum 1997,"

kata Gus Dur, yang juga Ketua Forum Demokrasi, kepada *Suara Independen*. (Lihat wawancara SI No 02/I, Juli). Maksudnya jelas, menjelang pemilihan umum 1997 dan suksesi 1998, pemerintah tak ingin diganggu oleh para oposan. Mereka ingin menjamin skenario politik yang direnancanakannya berlangsung mulus, yakni mayoritas tunggal untuk Golkar dan Presiden Soeharto menjabat untuk periode ke-tujuh. Kurang sukses menyeret Gus Dur, rezim ini tak surut bekerja.

Bondan Goenawan, anggota Pokja Forum Demokrasi, orang dekat Gus Dur, dijadikan sasaran. Jalan ke arah itu terbuka, ketika Yayasan Indonesia Baru (YIB), mengundang Robert W. Hefner, guru besar Boston University, berdiskusi Juni lalu. Diskusi itu digrebek polisi. Enam pengurus YIB diperiksa. Tetapi, tampaknya hanya Bondan, yang justru tidak terlibat dengan diskusi Hefner, yang akan diajukan ke pengadilan. Alasannya, tempat diskusi itu, rumah kontrakan atas nama Bondan. Pengagum Bung Karno itu, disangka telah mengadakan rapat gelap. Ia diancam dengan UU No 5/PNPS/1963, dan belakangan diubah dengan pasal 510 KUHP.

Kini, tujuh aktivis SMID (Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi) dan PPBI (Pusat Perjuangan Buruh Indonesia), menambah deretan oposisi di bangku terdakwa. Mereka ditangkap setelah demonstrasi besar-besaran buruh PT Great River Garment di Bogor, Juli lalu. Seperti biasa, pemerintah menuduh ada dalang yang menggerakkan 6.000 buruh itu mogok. Dan, aktivis SMID serta PPBI, mendapat kehormatan untuk menjadi tumbal itu. Berkas mereka sedang diproses di kepolisian Bogor, dan tak lama lagi segera dilimpahkan ke kejaksaan. Tujuh mahasiswa itu dituduh menghasut buruh dan melawan petugas. "Kami siap ke pengadilan," kata seorang aktivis SMID.

Demikianlah. Sasaran pemberangusan suara oposisi menyebar dari tokoh LSM, wartawan, mahasiswa, anggota DPR, paranormal dan entah apa lagi. Memang, ada juga oposan, yang sukses meloloskan diri dari rekayasa pemerintah. Misalnya, George Junus Aditjondro, dosen Satyawacana, yang kini bermukim di Perth, Australia. George menghadapi tuduhan "menghina presiden", karena leluconnya yang amat terkenal, "negeri ini diperintah oleh empat Ha". Dan, ia memilih "hijrah" untuk meneruskan perjuangannya. Ketua Yayasan PIJAR, Rachland Nasidik, dan tokoh mahasiswa, Yeni Damayanti, juga memilih terdampar di Eropa, ketimbang menghadapi pengadilan yang direkayasa. Sebuah pilihan yang cerdik.

Meskipun Menko Polkam, Soesilo Soedarman membantah adanya pengadilan politik itu, kenyataan yang ada sulit dipungkiri: Pengadilan politik, dapat menjerat siapa saja. Dan, bagi mayoritas aktivis pro demokrasi yang hanya memiliki Indonesia sebagai kampung halamannya, menghadapi pengadilan politik, dengan tabah adalah satu-satunya pilihan.

Barangkali, ada gunanya mengikuti humor, TASS seperti dituliskan dalam eksepsinya, "pengadilan ini hadiah istimewa buat saya di tahun emas." (*Suara Independen*)

Mereka yang Dijerat di Tahun 1995.

- -

- -

No Nama Tuduhan Ancaman Status Perkara

----

1. Tri Agus S (PIJAR). Menghina presiden lewat tulisan di KDP. Pasal 134, 137 KUHP. Sedang disidangkan di PN Jakarta Pusat. Maksimum 6 tahun.

2. Ahmad Taufik. Menyebarkan rasa permusuhan. Pasal 134, 154 KUHP. sedang disidangkan.

3. Eko Maryadi. Menghina Presiden. Pasal 19, UU Pokok Pers di PN Jakarta Pusat.

4. Danang K. Wardoyo (AJI). Menyalahgunakan fungsi pers lewat penerbitan INDEPENDEN. No 21/tahun 1982. Maksimum 7 tahun.

5. Permadi (Paranormal). Menghina agama Islam dalam ceramah di UGM 1994. Pasal 136 KUHP. Sedang disidangkan di PN Sleman, Yogya. Maksimum 6 tahun.

6. Sri Bintang P. (Bekas DPR). Berubah-ubah, dari makar Pasal 104, 134 KUHP. Berkas masih tertahan sampai menghina presiden. Ancaman hukuman belum jelas di Kejaksaan. Lewat ceramahnya di Berlin, Sri Bintang balik menggugat Kejaksaan Agung dan Presiden.

7. Abdurrahman Wahid (Ketua PB NU). Mencemarkan nama baik Abu Hasan, lawan politiknya. Belum jelas. Berkas masih tertahan di Kepolisian.

8. George Aditjondro (Dosen Satyawacana). Menghina Presiden lewat leluconnya tentang "4H". Pasal 134 KUHP. Berkas di Kejaksaan, maksimum 6 tahun. Tapi George tak bisa diadili karena sedang di Perth, Australia.

9. Bondan Goenawan (Forum Demokrasi). Menyelenggarakan rapat gelap. UU No. 5/PNPS/1963. Masih diperiksa polisi Jakpus. Pasal 510 KUHP.

10. Tujuh anggota SMID. Menghasut buruh supaya mogok. Pasal 160, 510, 286 KUHP. Masih diperiksa polisi Bogor dan PPBI. Melawan petugas. Maksimum 6 tahun.

Lampiran 4

Suara Independen, No 10/III/Agustus 1997 NASIONAL

TERIMAKASIH, KALPATARU INI DIKEMBALIKAN

George Junus Aditjondro, pengungsi politik asal Indonesia, memulangkan hadiah Kalpataru yang pernah diterimanya dari Presiden Soeharto. Protes karena Bob Hasan disanjung-sanjung sebagai pelestari lingkungan.

Dia seperti ditakdirkan untuk tak pernah berhenti melawan. Bahkan, setelah "mengungsi" ke Australia, karena terancam keselamatannya, George Aditjondro, bekas dosen Satyawacana itu, masih melancarkan serangannya pada Pemerintah Indonesia. Ia mengembalikan hadiah Kalpataru yang dianugerahkan Presiden Soeharto 10 tahun lalu.

"Terimalah dengan hormat piala ini. Terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menghiasi kamar tamu di rumah saya, dengan piala bersepuh emas itu," tulis Aditjondro dalam sebuah surat setebal 11 halaman. Ia mengaku sudah lama ingin mengembalikan Kalpataru itu, tapi baru Juli lalu bisa terlaksana. Saat ini, George lebih suka memajang Piala PRD yang diberikan oleh partai yang dinyatakan terlarang itu di kamar tamunya, ketimbang memajang piala dari presiden.

Kenapa George sampai hati memulangkan penghargaan dari presiden?

Banyak alasannya, ternyata. Pertama, dorongan untuk mengembalikan Kalpataru itu, muncul pada 1 Februari 1995, ketika George dan keluarganya terpaksa hijrah ke Australia. Adapun alasan hijrahnya itu, karena George diincar aparat keamanan Jawa Tengah untuk dijebloskan ke penjara dengan tuduhan "menghina pemerintah", dalam sebuah ceramah di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Ketika berceramah tanpa teks itu, George mengatakan, bahwa rakyat Indonesia saat ini berada di bawah rezim 4 H: Harto, Habibie, Harmoko, dan Bob Hasan.

Kemudian, niat bekas wartawan *Tempo* itu mengembalikan Kalpataru semakin kuat, ketika Pemerintah Indonesia dinilainya makin represif terhadap gerakan pro-demokrasi. Ia menyebut contoh-contoh, antara lain: penangkapan anggota AJI-Akhmad Taufik, Eko Maryadi-, penyerbuan kantor PDI 27 Juli, dan penggebukan aktivis PRD setelah kerusuhan, sebagai bukti makin menguatnya represi pemerintah. "Keinginan saya mengembalikan Kalpataru itu semakin mantap, saat anak buah Saudara menangkap dan

memenjarakan kawan-kawan saya dari Partai Rakyat Demokratik," tulis George dalam suratnya kepada Presiden Soeharto.

Dan, puncak kekesalan George, tampaknya terjadi ketika Pemerintah menominasikan Bob Hasan untuk menerima hadiah Kalpataru. Bagi bekas Wakil Ketua Presidium Walhi itu, pencalonan Bob Hasan, dirasakan sebagai pelecehan akal sehat.

Sebab, masyarakat umum tahu, Bob adalah perusak hutan di Kalimantan, dan menguasai HPH lebih dari 2 juta hektar. Kalau orang seperti itu diberi Kalpataru, tentu saja, George merasa tak perlu lagi menyandang hadiah yang katanya diberikan untuk perintis pelestari lingkungan itu.

Meskipun Bob akhirnya tak jadi diberi Kalpataru, tapi niat George tampak tak bisa dicegah lagi. Apalagi, ketika para pendukung Bob mengerahkan lobby-lobbynya untuk memberi penghargaan lingkungan kepada raja kayu itu. Bob, melalui Group Kalimanis yang dipimpinnya, mendapat *Certificate of Recognition* dari US Initiative of Joint Implementation -suatu penghargaan untuk "sistem penebangan kurang dampak" yang konon diberlakukan di konsesi hutan milik Bob Hasan.

Bukan itu saja, Bob pada April 1997 juga menerima penghargaan Harry A. Melo dari World Forestry Centre (WFC), di mana Bob sendiri menjadi anggota Dewan Pengurus WFC. Konon, hadiah itu diberikan karena komitmen Bob yang begitu tinggi dalam menjaga kelestarian hutan.

Alasan tak masuk akal seperti itulah, yang membuat George memutuskan untuk mengembalikan Piala Kalpataru. Ia tak ingin disejajarkan dengan Bob yang baginya tak lain dari perusak hutan. Yang belum jelas: bagaimana reaksi Presiden Soeharto terhadap pengembalian Kalpataru itu.

Ia belum pernah menerima penolakan yang begitu terang-terangan dari warga negaranya sendiri. Apakah ia akan digebuk sampai Australia?

(www.hamline.edu)

Lampiran 5

SURAT GEORGE J. ADITJONDRO UNTUK PRESIDEN

Newcastle, 24 Juli 1997

Kepada Yth.
Presiden Republik Indonesia,
H.M. Soeharto,
di tempat.

Saudara Presiden yang terhormat;

Melalui kawan-kawan aktivis gerakan pro-demokrasi di Indonesia, saya ingin mengembalikan piala Kalpataru, yang Saudara berikan kepada saya, 10 tahun yang lalu, konon karena jasa-jasa saya dalam merintis dan menggalakkan organisasi-organisasi lingkungan di Indonesia.

Maafkan, bahwa saya tidak dapat mengantarkannya sendiri kepada Saudara. Anak buah Saudara di KBRI di Canberra dan KJRI di Sydney, sungguh tidak berniat membantu memperpanjang paspor saya yang jatuh tempo 13 April lalu.

Dari sumber-sumber yang sangat terpercaya saya telah mendengar bahwa Dubes dan Konjen telah mendapat instruksi dari Jakarta, untuk hanya memberikan "surat jalan satu arah" kepada saya, hanya untuk ke Jakarta, guna "diadili" dalam pengadilan sandiwara seperti yang telah Saudara gunakan untuk (berusaha) merampas kebebasan keempat pendekar AJI, Eko Maryadi, Achmad Taufik, Tri Agus Susanto, dan Danang Wahyudi, begitu pula Permadi, Sri Bintang Pamungkas, Mochtar Pakpahan, Budiman Sudjatmiko dkk dari Partai Rakyat Demokratik (PRD), serta Aberson Sihaloho dari PDI Perjuangan. Dalam kasus saya sendiri, saya juga mendengar dari sumber-sumber saya di Jakarta, bahwa kebulatan hati anak buah Saudara untuk memberikan "surat jalan satu arah Sydney-Jakarta" kepada saya, berkaitan dengan kunjungan saya selama dua minggu ke AS, bulan Februari-Maret lalu, di mana saya ikut berkampanye mendukung hak penentuan nasib sendiri bangsa Maubere.

Terus terang, bukan baru sekarang saya ingin mengembalikan piala Kalpataru yang Saudara Presiden berikan kepada saya, ketika saya masih berkiprah bersama aktivis-aktivis lingkungan dan masyarakat-masyarakat adat di negeri yang Saudara baptis menjadi Irian Jaya, tapi yang para pejuang kemerdekaan di sana namakan Papua Barat.

Ada tiga momen dalam perjalanan hidup saya belakangan ini, yang juga merupakan bagian dari perjalanan hidup Republik ini, yang sudah membuat

tangan saya gatal untuk membungkus piala itu, serta mengirimkannya kembali ke alamat Saudara Presiden (walaupun saya masih tetap bingung, harus pakai alamat yang mana: rumah pribadi di Jalan Cendana, rumah dinas (Istana Negara) di mana piala Kalpataru itu saya terima, 10 tahun silam, Bina Graha, atau Sekretariat Negara).

Momen pertama adalah ketika saya terpaksa hijrah dari rezim jahiliah Saudara, tanggal 1 Februari 1995. Soalnya, aparat Saudara di Jawa Tengah dan Yogyakarta telah berusaha dengan segenap daya, tanpa menghormati hari-hari suci dalam agama saya, menjebloskan saya ke dalam penjara, dengan tuduhan "menghina suatu badan pemerintah". Tuduhan itu mereka dasarkan pada ceramah tanpa teks saya di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, pada hari Rabu, 10 Agustus 1994, yang baru kemudian saya transkrip dan sebarkan.

Dalam ceramah tanpa teks itu, saya berusaha memberikan contoh pentingnya "demokrasi langsung" sebagai pelengkap "demokrasi perwakilan", yakni perlunya referendum untuk menentukan apakah Indonesia akan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) atau tidak. Saya tolak kalau keputusan untuk membangun PLTN hanya diserahkan kepada Menteri kesayangan Saudara yang Saudara kenal sejak masa remajanya, yakni Dr Baharuddin Jusuf Habibie (Pada saat itulah saya katakan bahwa rakyat Indonesia berada di bawah rezim 4 Ha: Harto, Habibie, Harmoko, dan Bob Hasan, yang tidak terlalu meleset, bukan?)

Hal itu saya katakan, untuk menggarisbawahi pentingnya demokrasi langsung untuk mengimbangi keterbatasan demokrasi perwakilan. Ini ciri esensial semua negara demokratis di dunia.

Kalau Saudara tidak percaya bahwa demokrasi langsung itu perlu, mengapa masih ada Undang-Undang Gangguan di Indonesia, yang juga didasarkan pada prinsip demokrasi langsung?

Atau, kalau anak buah Saudara menganggap usaha saya mengampanyekan demokrasi langsung merupakan perbuatan subversif, mengapa mereka tidak menangkap Saudara Presiden sendiri, karena menandatangani Undang-Undang Referendum di tahun 1985, di mana ditegaskan bahwa perubahaan UUD 1945 tidak cukup dilakukan oleh MPR, sesuai dengan ketentuan UUD itu sendiri, melainkan harus merupakan hasil referendum seluruh rakyat Indonesia? Itu 'kan demokrasi langsung, bukan demokrasi perwakilan?

Pendek kata, saya merasa anak buah Saudara terlalu mencari-cari alasan untuk memberangus saya, lewat peradilan ludruk yang belakangan ini sangat Saudara gemari (*'sense of humor'* kita tampaknya sangat berbeda, ya?). Terus terang saya agak kasihan juga bahwa salah seorang pemuja

Saudara, Jendral Soeyono yang ikut mendalangi rencana pengadilan politik terhadap saya, akhirnya Saudara pecat juga, ketika dia tidak 100% sepakat dengan usaha penggulingan Megawati Soekarnoputri dan penggempuran kantor pusat PDI. Padahal Soeyono telah begitu setia mengabdi Saudara, dengan mencap kawan saya yang kini berada dalam tahanan Saudara, Mochtar Pakpahan, dan saya sendiri, menjadi anggota PKI Golongan B. Tuduhan, yang sangat menghina intelijen ABRI, yang bisa 'kecolongan' selama 30 tahun, seandainya tuduhan ini memang benar.

Momen kedua yang membuat saya gatal untuk mengembalikan piala ini muncul beberapa bulan kemudian. Sesudah saya berada di Australia, anak buah Saudara bernama Singgih yang Saudara percayai sebagai Jaksa Agung menuduh Sri Bintang Pamungkas, Abdurrachman Wahid dan saya telah menghina Kepala Negara. Padahal polisi Yogya saja, yang setelah 20 jam interogasi hendak menyerahkan saya ke Kejaksaan Negeri Yogya untuk "diadili", tidak sampai "menyangka" saya sejauh itu. Mereka hanya "menyangka" saya "menghina suatu kekuasaan di Negara Indonesia dengan kata-kata secara lisan", yakni melanggar Pasal 207 KUHP, dengan ancaman penjara 18 bulan. Bukan menghina Kepala Negara, yang diancam dengan hukuman penjara enam tahun.

Berarti, seorang Jaksa Agung dapat dengan begitu mudah mem-*bypass* seluruh aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dengan "menembak langsung" kami bertiga dengan tuduhan "menghina Kepala Negara". Betul-betul luar biasa loyalitas anak buah Saudara itu, hanya untuk mengurangi kemarahan Saudara sepulang dari Jerman, di mana Saudara didemonstrasi anak-anak muda Jerman, Timor Leste, Papua Barat, dan Indonesia, di bulan April 1995.

Toh saya masih menahan-nahan Kalpataru itu, walaupun hati saya semakin panas melihat bagaimana Saudara terus menaikkan suhu represi di tanah air, dengan menangkap dan mengadili ketiga pendekar AJI, Permadi, dan Sri Bintang Pamungkas. Soalnya, masih ada kawan saya di Indonesia yang menunjukkan munculnya sebersit sinar harapan di katulistiwa. Maksud saya bukan nama koran yang telah dibredel punakawan Saudara, Harmoko, yang sudah Saudara pecat pula, melainkan pencalonan Megawati Soekarnoputri oleh PDI untuk kandidat Presiden tahun depan.

Sebagai aktivis gerakan pro-demokrasi yang muncul dari kancah gerakan lingkungan, yang pernah Saudara hargai dengan piala Kalpataru, saya cukup senang terhadap sikap Megawati dan fraksinya di DPR-RI terhadap soal-soal lingkungan. Lihat saja betapa besarnya dukungan mereka bagi gerakan anti-nuklir di Indonesia (*Economic and Business Review Indonesia*, 1 Juli 1995: 32). Sikap kritis terhadap PLTN masih tetap mereka pertahankan, setelah Megawati digusur dari pimpinan PDI. Makanya, dalam berbagai

konferensi dan demonstrasi anti-nuklir di Australia, saya populerkan slogan baru: *Megawatt ?? No !! Megawati ?? Yes* !!

Tahu-tahu, para anak buah Saudara, dengan "restu" Saudara, menggulingkan Megawati lewat "kongres-kongresan" di Medan. Tidak cukup itu, para anak buah Saudara, atas "petunjuk" Saudara pula (buktinya mereka nggak pernah dihukum), menyerbu kantor pusat PDI bagaikan penyerbuan Timor Leste oleh bekas anak buah Saudara, Benny Murdani, 22 tahun lalu. Itulah momen ketiga, ketika saya berperang dengan batin saya, apakah harus mengembalikan piala Kalpataru ini atau tidak.

Keinginan mengembalikan Kalpataru itu semakin mantap, ketika anak buah Saudara menangkap dan memenjarakan kawan-kawan saya dari Partai Rakyat Demokratik, Budiman Sudjatmiko. Bagaimana tidak, baru saja, pada hari Senin, 23 Juli 1996, mereka telah menganugerahi saya suatu penghargaan yang lebih tinggi nilainya ketimbang Kalpataru, yakni PRD Award. Juga kawan lama saya, Mochtar Pakpahan, ditangkap dengan tuduhan yang sama dengan kawan-kawan PRD, yakni memicu dan mendalangi huruhara 27 Juli 1997. Padahal kita semua mafhum bahwa huruhara pembakaran toko dan kendaraan bermotor di akhir minggu itu justru terpicu oleh kelakuan anak buah Saudara yang menyerbu kantor pusat PDI secara begitu pengecut.

Penangkapan dan pemenjaraan para aktivis pro-demokrasi dari PRD, SBSI, PUDI, dan PDI Perjuangan, merupakan momen keempat bagi saya, untuk mengembalikan piala Kalpataru itu ke alamat Saudara Presiden. Kendati demikian, saat itupun saya masih berfikir, biarlah piala Kalpataru itu tetap bersanding di atas lemari buku di kamar tamu saya, bersebelahan dengan tempat yang saya cadangkan untuk PRD Award, yang belum tiba dari Indonesia (Barangkali anak buah Saudara tahu di mana PRD Award saya tersimpan?). Saya berfikir, biarlah kedua piala ini menjadi "monumen kecil" yang akan tetap kami boyong selama masa hijrah kami, perlambang metamorfosa gerakan lingkungan dan gerakan pro-demokrasi di mana saya pernah dan mudah-mudahan akan tetap terlibat.

Namun ketika terbetik berita lewat internet dari kawan-kawan aktivis lingkungan di Indonesia dan mancanegara, bahwa Bob Hasan, "Menteri Kehutanan bayangan" dalam '*kitchen cabinet*' Saudara, dinominasi untuk mendapat Kalpataru, mantaplah sudah hati saya untuk mengembalikan piala ini. Apalagi mengingat saat itu juga satu kelompok perusahaan milik Bob Hasan mendapatkan penghargaan lingkungan dari Gedung Putih.

Penghargaan Gedung Putih yang saya maksud adalah Certificate of Recognition dari U.S. Initiative on Joint Implementation (USIJI) kepada Kalimanis Group, untuk "sistem penebangan kurang dampak" (*reduced*

impact logging) yang mereka konon mereka jalankan di wilayah konsesinya yang total jendral lebih dari 2 juta hektar di Kalimantan Timur. Dengan sistem itu, menurut taksiran para ahli dari Climate Change Task Force, yang juga berada langsung di bawah Presiden Clinton, sejumlah 56.400 metric ton zat asam arang akan dihemat selama 40 tahun umur konsesi-konsesi hutan Bob Hasan itu. Untuk itulah Suharsono Kramadibrata, salah seorang top executive Kalimanis Group, menerima penghargaan USIJI dalam upacara di Gedung Putih, 28 April lalu.

Sebelum penghargaan dari Gedung Putih, di awal April 1997 Bob Hasan sendiri telah menerima Harry A. Merlo Award dari World Forestry Center (WFC) di AS, konon untuk komitmennya yang begitu tinggi dalam menjaga kelestarian hutan, karena ikut merintis kebijakan kehutanan di Indonesia yang memelihara keseimbangan antara konservasi dan pembangunan. Untuk diketahui, Bob Hasan sendiri salah seorang anggota Dewan Pengurus WFC (Down to Earth, Juni 1992: 11; E-wire <ens@envirolink.org> , 28 April 1997).

Kembali ke soal nominasi Kalpataru, Bob Hasan memang akhirnya tidak berhasil memperoleh hadiah itu. Pada hari Lingkungan Sedunia, 5 Juni lalu, salah satu anak perusahaan Kalimanis Group menerima penghargaan Proper Prokasih untuk pengendalian pencemaran air yang dianggap salah satu yang terbaik di Indonesia selama tiga tahun berturut-turut. Kali ini Bob Hasan sendiri yang menerima penghargaan itu atas nama PT Kalhold Utama Plywood (Manuntung, Jumat 6 Juni 1997).

Apakah dengan demikian kekecewaan saya sudah terobati? Tentu saja tidak. Soalnya, berbagai penghargaan lingkungan di AS dan Indonesia bagi usaha-usaha perkayuan Bob Hasan, merupakan pelecehan bagi gerakan lingkungan sedunia, khususnya gerakan pelestarian hutan. Ini harus saya sikapi dengan pengembalian Kalpataru yang Saudara Presiden hadiahkan kepada saya, 10 tahun lalu.

Bagaimana tidak? Apalah arti usaha pengurangan polusi air sungai, dan pengurangan pengurasan zat asam yang dilakukan oleh sebagian kecil anggota Kalimanis Group, dengan seluruh dampak lingkungan kerajaan Bob Hasan? Untuk obyektifnya neraca plus-minus dampak lingkungan bisnis Bob Hasan, saya ingin bertanya: pernahkah Saudara Presiden mewajibkan anak buah Saudara menganalisis dampak lingkungan terhadap semua usaha eksploitasi sumber daya alam yang kini dikuasai Bob Hasan (lihat daftar terlampir), baik atas namanya sendiri, atas nama para anggota keluarga besar Saudara, maupun atas nama yayasan-yayasan yang Saudara pimpin bersama anggota keluarga batih dan sahabat-sahabat dekat Saudara (Yayasan Dakab, Yayasan Dharmais, Yayasan Harapan Kita, Yayasan Supersemar, Yayasan Trikora)?

Maksud saya, betul-betul AMDAL yang sejati, yang meliputi analisis dampak sosial, di mana tidak tertutup kemungkinan membatalkan suatu proyek, apabila masyarakat calon korban serta pertimbangan para ahli dapat mengungkapkan dampak negatif yang luar biasa dari proyek itu, seperti yang pernah terjadi para rencana bendungan Segara Anakan, Jawa Tengah, rencana pembendungan Ci Tanduy di Ciamis, Jawa Barat, dan rencana bendungan Jipang (Aditjondro, 1994a: 28-30).

Kelalaian meneliti dampak lingkungan dan sosial secara serius terhadap segenap usaha partner bisnis Saudara Presiden itu, sulit dimaafkan. Soalnya, para pakar maupun para aktivis lingkungan telah mendokumentasi dampak negatif yang luar biasa dari berbagai usaha pengolahan sumber daya alam yang dikuasai Bob Hasan itu. Mulai dari pabrik kertas serta konsesi hutan pinus di Aceh, yang telah merusak sedikitnya 124 hektar kebun kopi dan sawah rakyat serta ratusan alat penangkap ikan nelayan tradisional di pinggiran Danau Air Tawar (*Fakta*, 1 Agustus 1991: 22-23; *Down to Earth*, 1991: 31-32), anak-anak perusahaan Kalimanis Group yang telah merusak ratusan hektar kebun rotan, pohon sarang lebah madu, ladang dan kuburan leluhur suku Dayak Bentian di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur (WALHI, 1993); sampai dengan dampak PT Freeport Indonesia di Papua Barat, yang 5% sahamnya kini juga dikuasai Bob Hasan atas nama PT Nusamba.

Saat ini, setelah menjadi Presiden Direktur PT Astra International, Bob Hasan secara langsung menguasai sekitar 3,5 juta hektar hutan di Indonesia: 2,5 juta hektar melalui anak-anak perusahaan Kalimanis Group di Kal-Tim, Aceh dan Maluku; dan hampir sejuta hektar lagi melalui anak-anak perusahaan PT Astra International di Kal-Tim, Riau, dan Papua Barat (*The Australian*, 8 April 1997; *Swasembada*, Januari 1994: 28).

Itu belum areal hutan yang dikuasainya secara tidak langsung dalam kedudukannya sebagai Ketua Masyarakat Perkayuan Indonesia (MPI), Ketua Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo), di mana kekuasaannya relatif mutlak, dan Ketua Asosiasi Mebel Indonesia (Asmindo). Di Sulawesi Tengah, anak perusahaan Apkindo, PT Fendi Indah, ikut dalam konsorsium 22 perusahaan yang mendapat konsesi hutan seluas 1,5 juta hektar, khusus untuk pengembangan ekspor kayu hitam alias ebony (*Prospek*, 22 Desember 1990: 89), sedangkan di Timor Leste, perusahaan yang sama ikut mengelola areal HTI seluas hampir 50 ribu hektar, yang meliputi tanah adat 11 desa di tiga kecamatan di Kabupaten Viqueque (*Gatra*, 5 Agustus 1995), walaupun ke(tidak)bijakan HTI telah menimbulkan keresahan yang luarbiasa dari rakyat yang ketiban pulung HTI di tanah mereka (*Suara Timor Timur*, 9-12 Maret 1994).

Dalam posisi sebagai Ketua Apkindo, Bob Hasan belum pernah menganjurkan anggota-anggotanya, secara sendiri-sendiri maupun secara

kolektif, untuk melakukan analisis dampak lingkungan -- termasuk analisis dampak sosial – terhadap kampanye penggalakan produksi kayu lapis (*plywood*), khususnya dampak terhadap kelestarian pohon damar (*Agathis*) serta kesejahteraan rakyat setempat, yang selama puluhan tahun hidup mengandalkan hasil getah damar (copal), tanpa merusak hutan damarnya sendiri.

Sepanjang pengamatan saya dan beberapa kawan aktivis lingkungan di Indonesia Timur, pembabatan pohon damar secara besar-besaran untuk bahan baku kayu lapis merusak hutan damar andalan rakyat di kaki Gunung Nokilalaki (Sul-Teng), di Pulau Seram (Maluku), dan di daerah Demta dan Biak Timur (Papua Barat). Rakyat yang protes terhadap ganti rugi yang tidak layak dengan cepat dicap "RMS" (dalam kasus Maluku) atau "OPM" (dalam kasus Papua Barat), di mana mereka seringkali harus berurusan dengan aparat bersenjata (*Fakta*, 15 Juli 1988: 44-45, 1 Desember 1988: 47). Belum lagi di daerah-daerah lain yang belum sempat saya teliti.

Dalam posisi sebagai Ketua Apkindo, Bob Hasan ikut bertanggung jawab atas ulah PT Fendi Indah, yang sahamnya ikut dimiliki oleh Yayasan Trikora (Warta Ekonomi, 29 Oktober 1990: 27), yang memelopori pembabatan kayu hitam (ebony) secara besar-besaran di Sulawesi Tengah. Padahal saya belum pernah mendengar Bob Hasan menganjurkan suatu AMDAL terlebih dahulu untuk menjaga kelestarian jenis kayu langka itu bagi anak cucu kita. Bukan sekedar bagi anak cucu Saudara Presiden.

Terakhir, dalam posisi sebagai Ketua Apkindo, Bob Hasan, sebagai teman golf dan partner bisnis Saudara Presiden, tentu saja tidak merasa sungkan-sungkan "memaksakan" konsep Hutan Tanaman Industri (HTI) di Timor Leste, yang dicaplok pasukan Benny Murdani atas perintah Saudara sebagai Panglima Tertinggi ABRI, di awal Desember 1975. Padahal status Timor Leste sampai detik ini masih menjadi bahan perdebatan di kancah Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Selanjutnya, dalam posisi sebagai Ketua Asmindo, yang ikut melahirkan larangan ekspor rotan setengah jadi dari Kalimantan, saya belum pernah mendengar pernyataan simpati Bob Hasan kepada para pengumpul rotan dan pengusaha kecil dan menengah di Kalimantan Tengah dan Selatan, yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan dan menderita kelaparan besar-besaran di awal 1980-an. Soalnya, berkat larangan itu, pabrik mebel Bob Hasan di Semarang kebanjiran bahan baku rotan dengan harga sangat murah.

Litani penderitaan rakyat di kawasan hutan Indonesia dan Timor Leste di bawah pengaruh Bob Hasan, masih dapat diperpanjang menjadi berpuluh-puluh halaman, kalau kita mau mengumpulkan semua laporan

aktivis lingkungan dan hak-hak bangsa-bangsa pribumi, mulai dari Aceh, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Papua Barat, dan Timor Leste. Litani ini dapat menggarisbawahi kata-kata bijaksana Mahatma Gandhi, yang kalau saya terjemahkan secara bebas berbunyi: "Bumi menyediakan cukup banyak untuk kebutuhan semua orang, tapi tidak cukup banyak untuk keserakahan semua orang" (*There is enough for everybody's need, but not enough for everybody's greed*). Apalagi untuk keserakahan segelintir orang.

Karena itu, berbagai penghargaan lingkungan yang diberikan kepada Bob Hasan oleh para penggemarnya di AS dan Indonesia, merupakan pelecehan bagi para aktivis lingkungan yang sering harus berurusan dengan militer dan polisi, hanya karena membela hak-hak lingkungan bangsa Indonesia yang notabene dilindungi undang-undang. Baik Undang-Undang Lingkungan, maupun Undang-Undang Pokok Agraria 1960 warisan Soekarno. Sebagai contoh, misalnya, penghargaan lingkungan bagi Bob Hasan merupakan pelecehan bagi Korps Kewang Haruku, penerima Kalpataru 1985, karena protes-protes mereka terhadap perusakan lingkungan oleh PT Aneka Tambang dan kongsi Kanada-nya, PT Ingold, sering dihadapi intimidasi aparat bersenjata.

Secara khusus, penghargaan lingkungan bagi anak-anak perusahaan Kalimanis Group merupakan pelecehan bagi masyarakat-masyarakat adat serta para aktivis lingkungan di Kalimantan Timur, yang bolak-balik terpaksa berurusan dengan aparat bersenjata hanya karena mereka begitu gigih membela hak-hak lingkungan serta hak-hak demokrasi rakyat Indonesia (YLBHI, 1997: 147-154; *Down to Earth*, February 1996: 11).

Secara khusus pula, Kalpataru bagi saya sementara seorang pendekar lingkungan yang lain, Cheppy Muhamad Hidayat Sudrajat, dihukum dua tahun penjara (1993-1994) hanya karena memimpin ratusan petani Rancamaya di Jawa Barat memprotes pembangunan lapangan golf milik Jenderal Yoga Sugama di tanah mereka (*Jakarta-Jakarta*, 14-20 Agustus 1993: 78; *Forum Keadilan,* 2 September 1993: 79, 26 Mei 1994: 52-53; *Tempo*, 19 Februari 1994: 40), merupakan pelecehan bagi akal sehat, kesadaran lingkungan, serta hak-hak demokrasi bangsa Indonesia.

Secara lebih khusus lagi, sebagai pendukung hak penentuan nasib bangsa Maubere, saya tidak dapat menyetujui melihat piala Kalpataru berkali-kali dipakai untuk melegitimasi pencaplokan Timor Leste oleh anak buah Saudara Presiden. Kalpataru-Kalpataru buat para aktivis lingkungan di Timor Leste itu, bagaikan garam yang ditaburkan di luka yang menganga akibat invasi serta pendudukan militer Saudara selama 22 tahun, yang telah menghabiskan sepertiga bangsa Maubere, dan menumpas lebih banyak pohon cendana ketimbang selama 450 tahun penjajahan Portugis.

Berdasarkan semua pertimbangan di atas, terimalah dengan hormat piala ini, yang Saudara Presiden hadiahkan kepada saya, sepuluh tahun lalu. Terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, untuk menghiasi kamar tamu di rumah saya dengan piala bersepuh emas itu, selama kurun waktu itu. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada suatu waktu dalam posisi yang berbeda. Saudara, bukan lagi sebagai presiden yang berkuasa laksanaraja, dan saya, bukan lagi sebagai "buronan" yang kehilangan hak memiliki paspor RI sebagaimana layaknya setiap warga negara Indonesia.

Wassalam,

George Junus Aditjondro

Mantan Wakil Ketua Presidium WALHI, 1980-1986
Mantan penerima Kalpataru 1987
Penerima PRD Award 1996

Referensi:

Aditjondro, G.J. (1994a). *"Suatu kritik terhadap teori dan praktik analisa dampak lingkungan (ADL) bendungan-bendungan besar,"* dalam Arianto Sangadji (ed). *Bendungan, rakyat dan lingkungan: catatan kritis rencana pembangunan PLTA Lore Lindu.* Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), hal. 25-58.

------------ (1994b). *Empat dimensi perjuangan demokratisasi di Indonesia.* Salatiga, 5 November.

CISI (1991). *A study on top 300 national private business groups in Indonesia,* 1991-1992. Jakarta: PT CISI Raya Utama.

Down to Earth (1991). *Pulping the rainforest: the rise of Indonesia's paper and pulp industry.* London: Down to Earth - International Campaign for Ecological Justice in Indonesia. Robison, Richard (1990). *Indonesia - the rise of capital.* Sydney: Allen & Unwin.

Shin, Yoon Hwan (1989). *Demystifying the capitalist state: political patronage, bureaucratic interests, and capitalist-in-formation in Soeharto's Indonesia.* Thesis Ph.D. pada Universitas Yale di AS. WALHI (1991). *HPH dan ekonomi regional: kasus Kalimantan Timur.* Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). WALHI dan YLBHI (1993). *Perjalanan secarik kertas: suatu tinjauan terhadap pengembangan industri pulp dan kertas di Indonesia.* Jakarta: WALHI dan YLBHI. YLBHI (1997). 1996: *Tahun Kekerasan - potret pelanggaran*

HAM di Indonesia. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Lampiran:

Daftar (tidak lengkap) dari perusahaan yang dimiliki atau dikuasai Bob Hasan di dalam & luar negeri, yang bergerak dalam penebangan, pengolahan, pengangkutan, pemasaran, dan pengasuransian hasil-hasil hutan.

I. Kalimanis Group (kebanyakan berkongsi dengan yayasan-yayasan/ pribadi anggota keluarga besar Soeharto): & (bidang kegiatan & lokasi operasinya)

01. PT Kiani Hutan Lestari (HPH di Kal-Tim)
02. PT Kiani Wana Lestari (HPH di Kal-Tim).
03. PT Kiani Kreasi (HPH di Kal-Tim)
04. PT Kiani Kertas (pabrik bubur kertas di Kal-Tim)
05. PT Timber Dana (HPH di Kal-Tim)
06. PT Tanjung Redeb Hutani (HPH di Kal-Tim)
07. PT Tanjung Redeb HTI (HTI di Kal-Tim)
08. PT Surya Hutani Jaya (HTI di Kal-Tim)
09. PT ITCI H. Manunggal (HTI di Kal-Tim)
10. PT Santi Murni Plywood (pabrik kayu lapis di Kal-Tim)
11. PT Santi Bakti (investment holding company)
12. PT Kalhold (HPH di Kal-Tim)
13. PT Kalhold Utama Plywood (pabrik kayu lapis di Kal-Tim)
14. PT Kalimanis Plywood Industries (pabrik kayu lapis di Kal-Tim)
15. PT Lakosta Indah (pabrik lem kayu di Kal-Tim)
16. PT Batu Penggal (pabrik lem kayu di Kal-Tim)
17. PT Hutan Nusantara (HPH di Kal-Tim)
18. PT Adindo Pulp & Paper (pabrik kertas & bubur kertas di Kal-Tim)
19. PT Gany Mulia Sejahtera Industry (pabrik kayu lapis di Kal-Tim)

20. PT Alas Helau (konsesi hutan & HTI di Kal-Tim & Aceh)
21. PT Takengon Tusam Lestari (HPH di Aceh)
22. PT Tusam Hutan Lestari (HPH di Aceh)
23. PT Kertas Kraft Aceh (pabrik kertas pembungkus semen di Aceh)
24. PT Metra Tujuhdua (pabrik pengolahan kayu di ??)
25. PT Sawwa Sumbaga (pabrik pengolahan kayu di ??)
26. PT Sumber Mari Timber (pabrik pengolahan kayu di Kal-Tim)
27. PT Sura Indah Wood Industries (pabrik pengolahan kayu di ??)
28. PT Mohtra Agung (HPH di Pulau Yamdena, Maluku)
29. PT Papan Partikel (pabrik papan partikel di ???)
30. PT Aspex Paper (pabrik kertas koran di Jakarta, yang bersama PT Inpers & PT Kertas Leces mengendalikan harga kertas koran di seluruh Indonesia)
31. PT Era Informasi Media (penerbit majalah Gatra = trompet Bob Hasan untuk mendiskreditkan gerakan pro-demokrasi di Indonesia & gerakan pelestarian hutan sedunia)

II. ASTRA Group (sebagian besar kongsi dengan Barito Pacific Group milik Prajogo Pangestu):

----

01. PT Sumalindo Hutani Jaya (HPH di Kal-Tim)
02. PT Sumalindo Lestari Jaya (HPH, pabrik kayu lapis & medium density fibreboard [MDF] di Kal-Tim)
03. PT Basuimex (HPH di Kal-Tim)
04. PT Dharma Satya Nusantara (HPH di Kal-Tim & pabrik papan laminasi dan kayu olahan di Surabaya)
05. PT Madyakara Pacific Raya (HPH di Kal-Tim)
06. PT Gonpu Indonesia (HPH di Kal-Tim)
07. PT Uni Rimba (HPH di ???)
08. PT Rimba Mafin (HPH di ??)
09. PT Inti Prona (HPH di ???)

10. PT Suryaraya Wahana (HTI & pabrik bubur kertas di ???)
11. PT Arjuna Pendawa Mahkota Plywood (pabrik kayu lapis di Kal-Tim dan Riau)
12. PT Nityasa Prima (pabrik kertas & bubur kertas di Kal-Tim)
13. PT Emporium Lumber (HPH & pabrik penggergajian kayu di ??)
14. PT Redwood Timber (HPH & pabrik penggergajian kayu di ??)
15. PT Kutai Timber (HPH & pabrik kayu lapis di Kal-Tim)
16. PT Rimba Lapis Permai (pabrik kayu lapis di ??)
17. PT Nityasa Prima (pabrik kertas & bubur kertas di Kal-Tim)
18. PT United Tractors (perusahaan alat-alat berat untuk penebangan hutan, berpusat di Jakarta)

III. APKINDO/ASMINDO Group

----

01. PT Fendi Indah (konsesi kayu hitam di Sul-Teng & pemasaran kayu lapis di Timur Tengah; ikut dimiliki Yayasan Supersemar).
02. PT Fendi Hutan Lestari (pengelola HTI di Timor Leste).
03. PT Fendi Wira Sejahtera (konsesi hutan di ???)
04. PT Fendi Mungil (pabrik pengolahan kayu di ??)
05. PT Fendi Murni (pabrik pengolahan kayu di ??)
06. PT Sandi Furni (pabrik perabot rotan di Semarang)
07. PT Fendy Wood (pemasaran kayu lapis di Singapura).
08. PT Nippindo (pemasaran kayu lapis di Jepang).
09. PT Plywood Indah (pemasaran kayu lapis di Cina).
10. PT Indocor (pemasaran kayu lapis di Korea Selatan).
11. PT Kiani USA (pemasaran mebel produksi anggota Asmindo di AS)
12. PT Karana Lines (pengangkutan kayu lapis ke mancanegara).
13. PT Asuransi Tugu Pratama (monopoli asuransi ekspor kayu lapis).

Sumber-sumber: Far Eastern Economic Review, 4 Oktober 1990: 62-64; Warta Ekonomi, 29 Oktober 1990: 26-29; Prospek, 22 Desember

1990: 76-77, 22 Februari 1992: 59-60; Swasembada, Januari 1994: 28-32, Desember 1994: 16-27, 30 Januari-19 Februari 1997: 12-43; Info-Bisnis, April 1994: 13; Gatra, 13 Januari 1996: 22-25; Down to Earth, Agustus 1996: 11, November 1996: 13, Februari 1996: 1, Februari 1977: 11, Mei 1997: 16; CISI, 1991: 378-380; Down to Earth, 1991: 31-32, 7; Robison, 1990: 291; Shin, 1989: 450-451; WALHI, 1991: 73-81.

sumber: www.hamline.edu

Lampiran 6

SURAT GEORGE J. ADITJONDRO

To: siarlist@minihub.org

Subject: SiaR-->SURAT GEORGE J, ADITJONDRO

From: SiaR News Service <siar@minihub.org>

Date: Sun, 15 Nov 1998 15:11:52 -0700

Delivered-To: siarlist@minihub.org

Sender: owner-siarlist@minihub.org

> From: George Aditjondro <aditjond@psychology.newcastle.edu.au>

> Subject: surat kedua buat para aktivis mahasiswa

Kawan-kawan aktivis mahasiswa 1998 yang tercinta;

Hati saya ikut sedih, dan menangis, bahkan ketika seorang adik kalian, Lukman Firdaus yang masih belajar di SMU III Tangerang gugur kemarin dulu.

Kesedihan itu sudah saya tuangkan dalam surat saya kemarin. Kami sekeluarga di sini, serta kawan-kawan mahasiswa Indonesia di Universitas Newcastle dan keluarga mereka, tidak dapat tidur nyenyak mengikuti berita-berita dari Jakarta, lewat radio, televisi, email, dan kabar-kabar telepon yang terus kami terima.

Kepada kawan-kawan mahasiswa Unika Atma Jaya, tolong sampaikan salam solidaritas kami. Terlebih-lebih pada keluarga Wawan, sampaikan belasungkawa kami yang setulus-tulusnya. Begitu pula kepada kawan-kawan mahasiswa Institut Teknologi Indonesia (ITI), tolong sampaikan juga salam solidaritas kami, serta belasungkawa kami kepada keluarga Teddy Mardani Kusuma yang ditinggalkan.

Menurut catatan yang kami terima lewat email, juga ada seorang anggota Satgas ITB, Adi yang gugur kemarin dulu, sedangkan kemarin telah gugur pula Saudara Sigit Prasetyo dari Fakultas Teknik Sipil Universitas YAI, serta Ina dari Fakultas Ekonomi UI.

Walaupun berbeda faham, karena mereka juga sama-sama manusia, dan mungkin hanya merupakan pion bloon dari rejim Suharto Babak Kedua ini, kami juga ikut bersedih atas kematian anggota-anggota PAM Rekayasa (bukan Swakarsa), yang terbunuh di Cawang, serta korban-korban jiwa lainnya di hari-hari kelabu ini.

Saya bukan sekedar omong kosong dan berbasa-basi, apabila saya mengatakan bahwa perjuangan para aktivis mahasiswa 1998 -baik yang gugur maupun yang selamat- tidaklah sia-sia. Majelis Permusyawaratan Rejim ini boleh bilang apa saja, tapi rakyat sekarang berfihak pada kalian. Sebab kalian adalah rakyat.

Perjuangan untuk mengakhiri dwifungsi ABRI serta menyeret Suharto ke depan meja hijau, baik untuk kejahatannya memperkaya diri, keluarga dan para konconya, dengan cara-cara melanggar hukum, melanggar kepantasan sosial (misalnya, memiliki peternakan seluas 720 hektar di tengah-tengah daerah di mana rata-rata pemilikan tanah petani hanya 0,10 hektar per keluarga), dan dengan merongrong perekonomian negara, maupun untuk kejahatannya membunuh dan memati-perdatakan jutaan rakyat Indonesia, Papua Barat, Timor Lorosae, dan Aceh, satu saat akan terwujud.

Rakyat, dan sejarah berfihak pada kalian, Christopher, serta kawan-kawan aktivis mahasiswa lainnya. Kebanyakan rezim otoriter di dunia ini satu per satu sudah ditumbangkan oleh gerakan-gerakan pro-demokrasi di negaranya masing-masing, baik di Asia, di Amerika Latin, di Eropa Timur, dan di Afrika. Selanjutnya, banyak diktator dan bekas diktator sudah mulai diadili, mulai dari Roh Dae Woo dan Choon Doo Hwan di Korea Selatan sampai dengan bekas diktator Mali di Afrika, yang saya lupa namanya. Dan bekas diktator Chile, Pinochet pun sedang jadi bola rebutan antara pemerintah Chile yang masih berlepotan dengan para pendukungnya, seperti pemerintah Habibie yang masih berlepotan dengan para pendukung Suharto, pemerintah Inggris yang mempertaruhkan citranya sebagai penandatangan banyak instrumen HAM internasional, serta Spanyol dan sejumlah negara lain yang menuntut Pinochet dideportasi dari Inggris untuk diadili.

Kawan-kawan aktivis mahasiswa yang tercinta;

Perjuangan kalian, perjuangan kita semua yang cinta demokrasi dan ingin memulihkan kedaulatan rakyat Indonesia, kini memasuki babak selanjutnya.

Babak penggembosan sisa-sisa kekuasaan para Suhartois, lewat kerangka kekuasaan yang dibangun secara terburu-buru oleh Habibie dan Wiranto, dengan menunggangi aksi-aksi mahasiswa pertengahan Mei lalu. Sebab sudah jelaslah sekarang bahwa berbeda dengan sikap mereka terhadap aksi-aksi mahasiswa sekarang ini, pada saat itu mereka dapat mentolerir

aksi-aksi mahasiswa untuk menggulingkan Suharto, supaya buah yang sudah matang di pohon, akan jatuh ke pangkuan mereka.

Namun gerakan mahasiswa juga perlu lebih waspada terhadap orang tua-tua, avonturir politik dari kalangan luar pemerintah, yang ingin merebut kursi-kursi pemerintahan lewat penunggangan terhadap gerakan mahasiswa, pada saat-saat yang menguntungkan.

Dalam hal ini, saya terang-terangan ingin menyerukan kewaspadaan kalian pada Amien Rais, setelah membaca wawancaranya dengan SCTV, sebagaimana yang disiarkan oleh kantor berita AFP, hari Sabtu, 14 November ini. Dalam wawancaranya itu, ia mengecam sikap mahasiswa yang merongrong kekuasaan yang berlaku saat ini. Katanya, seperti dikemukakan oleh AFP: *"Under no circumstance, I repeat, under no circumstance, could a power takeover be justified, be it by military force or by any other anti-reform force, because it is against the demands of reform and democracy."*

Bagaimana Amien Rais bisa mengatakan hal itu, apabila peralihan tongkat -- dan kursi -- kepresidenan dari Suharto ke Habibie telah berjalan melalui aksi-aksi mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR pertengahan Mei lalu, di mana Amien Rais tanpa malu-malu bergabung dengan mahasiswa, setelah sebelumnya mengatakan, seusai sidang MPR Maret lalu, supaya Suharto diberi waktu enam sampai delapan bulan?

Amien Rais bersama ketiga tokoh nasional yang kalian ajak berkumpul di Ciganjur, juga telah memberikan toleransi pada para serdadu, untuk mengakhiri supremasinya terhadap kaum sipil, dalam waktu enam tahun. Apakah ini yang dikehendaki oleh gerakan mahasiswa, yang pada hakekatnya merupakan penyambung lidah aspirasi rakyat lainnya?

Karena itu, sudah saatnya gerakan mahasiswa 1998 ini lebih mengkonsolidasi diri, dan memilih orang-orang yang tepat untuk kalian orbitkan sebagai pemerintahan transisi dalam bentuk presidium yang kalian sering bicarakan.

Tidak mungkin dari 200 juta rakyat Indonesia, hanya Megawati, Gus Dur, Amien Rais, dan Sultan Yogya yang kalian dapat harapkan dan percayakan kepemimpinan dalam masa-masa kritis ini. Bagaimana dengan Heri Akhmadi dan kawan-kawannya, yang di tahun 1978 sudah memelopori mosi tidak percaya pada kepemimpinan Suharto? Bagaimana dengan Hendardi dan kawan-kawannya dalam gerakan pembelaan hukum, yang tetap setia membela kawan-kawan yang diperkarakan dalam kasus-kasus politis yang cukup berat, baik lewat jalur litigasi maupun advokasi? Bagaimana dengan Budiman Sujatmiko dan kawan-kawan pimpinan PRD lainnya, yang sudah merintis pembentukan partai politik yang progresif, yang anggotanya kebanyakan orang muda di kampus maupun di pabrik?

Ketergantungan gerakan mahasiswa 1998 pada segelintir orang tua, yang selalu mengecewakan kita, karena selalu pada saat-saat yang genting tidak berani mengambil sikap yang tegas, barangkali terlalu didorong oleh agenda pers luar negeri. Pers, yang selalu menokohkan Megawati, Gus Dur, dan Amien Rais sebagai "pemimpin oposisi" di Indonesia. Padahal, para mahasiswalah pemimpin oposisi di Indonesia, sementara mereka-mereka itu, selalu memanfaatkan momentum politik yang tercipta karena keradikalan gerakan mahasiswa, dan berulangkali berusaha menginjak rem gerakan mahasiswa, sambil melakukan lobby-lobby politik dengan penguasa, termasuk dengan para serdadu, yang justru mau kita akhiri supremasi kekuasaannya terhadap kaum sipil, yang notabene merupakan mayoritas rakyat Indonesia.

Makanya, barangkali kita dapat belajar lagi dari sejarah, termasuk sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, di mana para pemuda menculik Bung Karno ke Rengasdengklok, dan hanya bersedia melepaskan Bung Karno setelah menyanggupi, bersama Bung Hatta, untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia dari corong radio di halaman rumahnya, yang kini anda kenal sebagai Tugu Proklamasi.

Barangkali, setelah Habibie, Wiranto, dan Akbar Tanjung berhasil mengkonsolidasi kekuasaan mereka, di atas darah puluhan kaum muda yang tumpah di Jakarta dalam tiga hari terakhir, sudah saatnya gerakan pro-demokrasi di Indonesia, dengan dimotori oleh gerakan mahasiswa, memproklamasikan suatu pemerintahan transisi, yang akan memperebutkan legitimasi rakyat dari sisa-sisa rezim Orde Baru, yang hanya berganti baju dari seorang sersan KNIL ke seorang ahli pesawat terbang didikan Jerman.

Sekianlah surat saya, dan marilah kita berdoa, agar dari asap mesiu dan genangan-genangan darah dan airmata, di seputar gedung DPR/MPR di Senayan, akan muncul burung phoenix demokrasi, yang sekali lagi dapat mengangkat martabat bangsa Indonesia di dunia internasional.

George Junus Aditjondro

Anggota gerakan pro-demokrasi Indonesia

di pengasingan

Lampiran 7

Membongkar Gurita Cikeas Menggunakan Metodologi *Grounded Research*

Banyak kalangan yang menilai MGC bukanlah penelitian ilmiah. Kutipan-kutipan di berbagai media internet-lah yang menjadi persoalan. Padahal, menurut George, penelitian yang dilakukan selama lima tahun ini tidak main-main. Potongan-potongan data di berbagai media dengan rapi diklipingnya. Ia pun dengan jeli mengkategorikan data-data tersebut sehingga terjalin suatu alur yang rapi. George lalu menganalisis data tersebut dengan mengkonfirmasi ke beberapa narasumber. Sementara data-data yang diperoleh dari media besar tidak semua di-*crosscheck* ulang karena George yakin akan profesionalisme wartawan tersebut. Bukankah sebuah berita yang dikeluarkan oleh sebuah media, terlebih media besar, pastilah sudah dikonfirmasi dengan narasumber utama sebelumnya?

Dalam penelitian buku MGC maupun buku-buku sebelumnya, George menyatakan bawa dia menggunakan metodologi *grounded research*.

Grounded Theory dikenalkan oleh dua orang peneliti, Barney G. Glaser dan Anselm L. Strauss dalam buku *The Discovery of Grounded Theory.* Para ahli ilmu sosial berupaya menemukan teori yang didasarkan pada temuan data empiris. Pendekatan *Grounded Theory*, yang model penelitiannya disebut *Grounded Research* memang berlawanan dengan pendekatan klasikal, yang beranjak dari teori lalu dijabarkan ke dalam hipotesis sesuai dengan masalah yang ingin dipecahkan. Pencarian data empiris dilakukan untuk verifikasi kebenaran hipotesis yang juga berarti menguji kebenaran teori.

Dalam *Grounded Research*, peneliti langsung terjun ke lapangan tanpa membawa rancangan konseptual, proposisi, dan teori tertentu. Bisa dikatakan, peneliti datang dengan kepala kosong tanpa membawa apapun, baik itu konsep ataupun teori. Dari keadaan kepala kosong inilah, seorang peneliti diharapkan dapat sepenuhnya terpancing pada kenyataan berdasarkan data lapangan itu sendiri. Jadi, apa yang ditemukan dalam penelitian benar-benar berdasarkan data yang dikembangkan secara induktif.

Terkait proses tersebut, terdapat tiga unsur dasar yang perlu dipahami dan tidak bisa saling dipisahkan, yaitu konsep, kategori, dan proposisi. Konsep diperoleh melalui konseptualisasi data. Peristiwa atau kejadian diperhatikan dan dianalisis sebagai indikator potensial dari fenomena yang kemudian diberikan nama/label secara konseptual. Berikutnya, dibandingkan dengan

kejadian yang lain. Apabila terdapat keserupaan, maka diberikan nama dengan istilah yang sama. Begitu pula berlaku dengan peristiwa yang berbeda.

Unsur kedua adalah kategori. Kategori adalah kumpulan yang lebih tinggi dan abstrak dari konsep. Kategori diperoleh melalui proses analisis yang sama dengan cara membuat perbandingan dengan melihat persamaan dan perbedaan. Kategori merupakan landasan dasar penyusunan teori. Unsur ketiga adalah proposisi. Proposisi menunjukkan adanya hubungan konseptual, yakni suatu pernyataan berdasarkan hubungan berbagai konsep yang mengandung deskripsi sistem pemahaman tertentu yang relevan dengan kondisi di lapangan. Pembentukan dan pengembangan konsep-konsep, kategori, dan proposisi merupakan suatu keharusan dalam proses penyusunan teori, atau melalui proses interaktif.

Ada lima tahap dalam menghasilkan teori pada *grounded research*, yakni (1) disain penelitian, (2) pengumpulan data, (3) display data, (4) analisis data, dan (5) membandingkan dengan literatur. Dari lima tahap ini, sembilan langkah perlu dilakukan, yakni (1) peninjauan ulang literatur teknis, (2) pemilihan kasus, (3) pembuatan panduan pengumpulan data yang akurat, (4) terjun ke lapangan, (5) penyusunan data, (6) analisis data yang berhubungan dengan kasus awal, (7) percontohan teoritik, (8) penyelesaian penelitian, dan (9) perbandingan teori yang muncul dengan literatur yang sudah ada.

Grounded research memang tidak terlalu mudah dilakukan terutama oleh peneliti pemula, sebab memiliki model analisis data yang terus-menerus, selama data di lapangan masih tetap dikumpulkan. Proses *open coding* merupakan bagian dari analisis data, dimana peneliti melakukan identifikasi, penamaan, kategorisasi, dan penguraian gejala yang ditemukan dalam teks hasil dari wawancara, observasi, dan catatan harian peneliti itu sendiri. Berikutnya adalah *axial coding*. Tahap ini, adalah menghubungkan berbagai kategori penelitian dalam bentuk susunan *property* (sifat-sifat) yang dilakukan dengan menghubungkan kode-kode, dan merupakan kombinasi cara berfikir induktif dan deduktif.

Lampiran 8

Okezone.com/ Senin, 28 Desember 2009 - 11:52 wib

Ramadhan Pohan: Saya Akan Beri Pelajaran George

Taufik Hidayat

JAKARTA - Munculnya buku "*Membongkar Gurita Cikeas; Di Balik Skandal Bank Century*", yang ditulis George Junus Aditjondro membuat geram sejumlah kalangan. Anggota DPR Ramadhan Pohan berang karena namanya disebut-sebut dalam buku tersebut. "Saya akan beri pelajaran kepada George, tetapi dengan cara-cara lain dan tidak akan menggunakan UU ITE," kata Ramadhan di sela-sela acara diskusi 'strategi menjaga kebebasan berekspresi di era multimedia' di Dewan Pers, Jakarta, Senin (28/12/2009). Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, dirinya dan sejumlah teman di DPR sudah melakukan persiapan tersebut. Namun sayangnya, Ramadhan tidak merinci "pelajaran" apa yang akan diberikan kepada George.

Meski demikian, George menolak agar buku tersebut ditarik dari peredaran. Sementara itu, dalam buku setebal 140 halaman tersebut, Ramadhan dikabarkan menikmati dana Bank Century dan mengetahui semua aliran dana tersebut. "Saya tidak menerima lima sen pun. Karena di dalam buku tersebut dikabarkan (Saya) menikmati dana Century dan mengetahui aliran dana Century, padahal saya dengan teman-teman di DPR meminta agar kasus Century dibuka," tegasnya. "Keterlaluan George. Saya tahu betul dia. Pada 1998-1999 di Amerika, saya satu apartemen dengan dia. Saya tau dia dari a-z, apa susahnya melakukan klarifikasi data ke saya," keluhnya.(kem)

Lampiran 9

Aku ingin menulis puisi, yang

Taufiq Ismail

Aku ingin menulis puisi, yang tidak semata-mata berurusan dengan cuaca, warna, cahaya, suara, dan mega.

Aku ingin menulis syair untuk kanak-kanak yang melompat-lompat di pekarangan sekolah, yang main gundu dan petak umpet di halaman rumah, yang menangis karena tidak naik kelas tahun ini.

Aku ingin menulis puisi yang membuat orang berumur 55 serasa 25, yang berumur 24 merasa 54 tahun, di manapun mereka membacanya, bagaimanapun mereka membacanya: duduk atau berbaring.

Aku ingin menulis puisi untuk penjual rokok kretek, tukang jahit kemeja, penanam lombok dan bawang perai, penambang sampan di sungai, penulis program komputer dan disertasi ilmiah bedah, sehingga mereka berhenti sekejap dari kerja mereka dan sempat berkata: hidup ini, lumayan indah.

Aku ingin menulis syair buat pensiunan-pensiunan guru SD, pelamar-pelamar lowongan kerja, para pelanggan rumah gadai, plonco-plonci negri dan swasta, pasien-pasien penyakit asma dan kencing gula serta penganggur-penganggur sarjana sehingga bila mereka baca beberapa baris sajakku, mereka bicara: hidup di Indonesia, mungkin harapan masih ada.

Aku ingin menulis sajak yang penuh proteina, sekedar zat kapur, belerang serta vitamina utama, sehingga puisi-puisiku ada sedikit berguna bagi kerja dokter-dokter umum, dokter hewan, insyinur pertanian dan peternakan.

Aku ingin menulis puisi bagi para pensiunan yang pensiunnya dipersulit otorisasinya, tahanan politik dan criminal, siapa juga yang tersiksa, sehingga mereka ingat bahwa keadilan tak putus diperjuangkan.

Aku ingin menulis sajak yang membuat orang ingat pada Tuhan di waktu senang, senang yang sedang-sedang atau berlebihan.

Barangkali aku tidak bisa menulis demikian.

Tapi aku kepingin menuliskannya.

Aku ingin.

Aku ingin menulis puisi yang bias dibidikkan tepat pada tubuh kehidupan, menembus selaput lender, jaringan lemak, susunan daging, pembuluh

darah arteri dan vena, mengetuk tulang dan membenam sumsum, sehingga perubahan fisika dan kimiawi, terjadi.

Aku ingin menulis puisi di buku catatan rapat-rapat Bappenas, pada agenda muktamar mahasiswa, surat-surat cinta muda-mudi Indonesia, pada kolom kiri lembaran wesel yang tiap bulan dikirimkan orangtua pada anaknya yang sekolah jauh di kota.

Aku ingin menulis syair pada cetak-biru biro-biro arsitek, pada payung penerjun terkembang di udara, pada iklan-iklan jamu bersalin, pada tajuk rencana koran ibukota dan pada lagu pop anak-anak muda.

Aku ingin menulis sekali lagi puisi mengenang Jendral Sudirman yang berparu-paru satu, serta tentang sersan dan prajurit yang terjun malam di Irian Barat kemudian tersangkut di pepohonan raksasa atau terbenam di rawa-rawa malaria.

Aku ingin menulis syair yang mencegah kopral-kopral yang tak pernah bertempur agar berhenti menempelengi sopir-sopir oplet yang tarikannya payah.

Aku ingin menulis sajak ambisius yang bias menghentikan perang-saudara dan perang-tidak saudara, puisi konsep gencatan senjata, puisi yang bisa membatalkan pemilihan umum, menambal birokrasi, menghibur para pengungsi dan menyembuhkan pasien-pasien psikiatri.

Aku ingin menulis seratus pantun buat kanak-kanak berumur lima dan sepuluh tahun hingga bila dibacakan buat mereka, maka mereka tertawa-tawa dan gigi mereka yang putih dan rata jelas kelihatan.

Aku ingin menulis puisi yang menyebabkan nasi campur dimakan serasa hidangan hotel-hotel mahal dan yang menyebabkan petani-petani membatalkan niat naik haji dengan menggadaikan sawah dan perhiasan emas sang istri.

Aku ingin menulis puisi tentang merosotnya pendidikan, tentang nabi Adam, keluarga berencana, sepur, Harakiri, lembah Anai, Amir Machmud, Piccadilly Circus, taman kanak-kanak, Opsus, Raja Idrus, nasi gudeg, kota Samarkand, Raymond Westerling, Laos, Emil Salim, Roxas Baulevard, Dja'afar Nur Aidit, modal asing, Checkpoint Charlie, Zaenal Zakse, utang $ 3 milyar, pelabuhan Rotterdam, Champ Elysses dan bayi ajaib, semuanya disusun kembali menurut urutan abjad.

Aku ingin menulis puisi yang mencegah kemungkinan pedagang-pedagang jepang merampoki kayu-kayu rimba di Kalimantan, melarang penggali-penggali minyak dan penanam modal mancanegara menyuapi penguasa-

penguasa yang lemah iman, dan melarang sogokan uang pada pejabat bea-cukai serta pengadilan.

Aku ingin menggubah syair yang menghapuskan dendam anak-anak yatim piatu yang orangtua dan paman-bibinya terbunuh pada waktu pemberontakan komunis yang telah silam.

Barangkali aku tidak sempat menuliskannya semua.

Tapi aku ingin menulis puisi-puisi demikian.

Aku ingin.

Lampiran 10

KESAKSIAN PRIBADI TENTANG MILITER

From: John MacDougall <apakabar@clark.net>

Subject: IN: GJA - Kesaksian Pribadi ttg Militer Indonesia #1

Date: Thu, 28 Sep 1995 17:34:22 +0800

To: apakabar@clark.net

From: george@sunarc.murdoch.edu.au (George Aditjondro)

Subject: Kesaksian pribadi ttg militer Indonesia

DINAMIKA MILITER DALAM PERJALANAN HIDUP SAYA: SEBUAH KESAKSIAN PRIBADI

(Makalah untuk Panel Forum Nasional VI bertema "Dinamika militer dalam perjalanan Republik [Indonesia] dari berbagai perspektif", yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP-UGM di Yogyakarta, 23 Mei 1994) -- (Bagian I)

Oleh George Junus Aditjondro

SEBAGAI warga Republik ini, di mana saya dilahirkan tanggal 27 Mei 1946, saya termasuk "generasi pasca proklamasi kemerdekaan". Mau tak mau, sebagai warga republik ini, hampir 1/2 abad lamanya kehidupan pribadi saya ikut berinteraksi dengan topik seminar ini, yakni "dinamika militer dalam perjalanan republik". Masa yang hampir 1/2 abad itu. telah saya lewatkan di berbagai daerah di Indonesia -- atau yang berada di bawah kekuasaan

Indonesia --, dan saya lewatkan dalam berbagai posisi sosial maupun profes. Makanya, izinkan saya menyampaikan kesaksian pribadi tentang "dinamika militer dalam perjalanan hidup saya", yang barangkali dapat digeneralisasi di antara lebih banyak warganegara republik ini.

****

SELAMA saya tinggal di Makassar selama sepuluh tahun (1955-1965), saya tidak punya rasa takut atau antipati kepada militer. Bahkan, pada tahun 1965 saya ikut masuk Resimen Mahasiswa Wolter Monginsidi di kampus Unhas. Lambang kesatuan itu, adalah rancangan saya, atas permintaan PR II Unhas, dr Syamsi Lili waktu itu. Selain itu, saya ikut bangga terhadap tentara kita yang ikut merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda, dan saya pun ikut Misa Dukacita untuk mengenang gugurnya Laksamana Yos Sudarso di Laut Aru. Selama tinggal di Makassar, saya juga menjadi fan AURI, dan sering menontong dan menaiki pesawat-pesawat terbang baru yang ada di lapangan terbang Mandai alias PAU Hasanuddin, di samping ikut perkumpulan aero-modelling yang ditunjang oleh AURI di sana.

Ada berbagai faktor keluarga yang menunjang sikap saya sebagai remaja, yang membuat saya ikut bangga terhadap peranan militer Indonesia dalam waktu itu. Pertama, seorang paman saya [Suryadarma], termasuk pendiri AURI yang sekarang disebut TNI/AU. Kedua, kedua orangtua saya ikut membantu Operasi Mandala lewat siaran-siaran perang urat syarat yang mereka susun dan siarkan lewat stasiun RRI Makassar, guna melemahkan mental para tentara Belanda di Irian Barat menghadapi tentara dan sukarelawan kita. Di samping faktor-faktor sosio-psikologis itu, Bung Karno juga memang seorang orator yang hebat, yang mampu membuat anak-anak muda Indonesia sebaya saya ikut terangsang untuk mendukung Trikora dan kemudian, Dwikora.

****

Kemudian, ketika mengikuti orangtua saya kembali ke Jawa, tepatnya ke Semarang, saya juga belum punya rasa takut terhadap atau antipati kepada militer, walaupun saya mulai juga mendengar cerita-cerita serem dari seorang paman saya di kawasan Muria, tentang mayat-mayat tanpa kepala yang hanyut hampir tiap hari di kali di belakang rumah paman itu, sesudah peristiwa yang disebut orang "Gerakan 30 September 1965". Soalnya, saya mendengar bahwa pembantaian orang-orang yang dicurigai atau dicap "komunis" itu, kebanyakan tidak dilakukan oleh anggota-anggota kesatuan TNI sendiri, melainkan oleh anggota organisasi-organisasi massa Islam, khususnya Bansernya Ansor.

Saya mulai berdebat dengan teman-teman saya dari Makassar, yang sebagian besar pindah untuk kuliah di Bandung, dan aktif dalam HMI, yang bersama organisasi mahasiswa saya, PMKRI, tergabung dalam KAMI. Saya pertanyakan kepada mereka, apakah Islam membenarkan pembantaian sekian ribu petani, buruh, dan pemuda yang tergabung dalam organisasi-organisasi onderbouw PKI.

Kendati demikian, terhadap militer, simpati saya masih tetap besar. Apalagi figur Ibrahim Adjie dan HR Dharsono di Bandung, serta Ali Murtopo dan Soeharto di Jakarta, cukup populer di kalangan anak-anak muda dalam barisan KAMI, di mana saya ikut tergabung. Bahkan setelah saya *drop out* dari Fakultas Teknik UKSW tahun 1971, tanpa secara fisik maupun psikologis *drop out* dari gerakan mahasiswa, saya masih tetap punya simpati terhadap militer. Termasuk ketika sebagai koresponden majalah Tempo di Jawa Tengah, saya meliput usaha Kodam Diponegoro menggulung jaringan PKI bawah tanah pimpinan Iramani di Purwodadi-Grobogan. Hubungan saya yang cukup erat dengan seorang Asisten Intelligence Kodam Diponegoro yang juga beragama Katolik, ikut membuat saya dapat keluar masuk ke kompleks Kodam yang waktu itu masih berpusat di bunderan Tugu Muda, Semarang, dengan cukup leluasa.

****

Namun di akhir 1960-an dan awal 1970-an itu, sebelum saya hijrah ke Jakarta, saya mulai ikut mengalami berbagai friksi antara generasi muda yang menyebut diri Angkatan 1966 dengan kalangan militer. Sebagai anggota Presidium KAMI Semarang mewakili PMKRI, saya merasa terombang-ambing antara sikap penguasa keamanan di Semarang dan Jawa Tengah untuk mendukung lokalisasi perjudian di kota Semarang, dengan teman-teman saya dari organisasi-organisasi mahasiswa Islam yang secara tegas ingin menolak segala bentuk perjudian.

Kemudian, perasaan saya mulai terganggu ketika Kodim Semarang mulai melakukan pencukuran rambut gondrong secara paksa dan di depan umum. Seorang diri saya menulis surat protes ke Dandim, yang saya sebarluaskan ke anggota-anggota KAMI yang lain. Dan seorang diri pun saya pertanggungjawabkan isi surat itu ke sang Dandim, yang mengirim anak buahnya dengan jip untuk "menjemput" saya di rumah saya di Semarang waktu itu.

Setelah pindah ke Salatiga untuk mencari tempat belajar yang tenang di UKSW, saya mulai berurusan dengan militer juga. Satu ketika, saya membaca puisi Taufiq Ismail berjudul: "Aku ingin menulis puisi, yang ....", di mana ada kalimat yang kurang lebih berbunyi: "Aku ingin menulis puisi yang dapat mencegah kopral-kopral menempeleng supir angkot sembarangan."

Malam itu juga, ketika saya masih ngobrol dengan teman-teman di depan Balairung UKSW, ada tentara suruhan Dandim Salatiga, yang mengatakan bahwa Dandim ingin bertemu saya malam itu juga untuk mempertanggungjawabkan pembacaan puisi itu. Saya tolak permintaan Dandim itu, dan berjanji akan datang ke rumahnya keesokan paginya.

Memang, ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota "keluarga besar ABRI" yang menyentak hati nurani saya, seperti pembunuhan Rene Louis Conraad di kampus ITB oleh para taruna AKABRI Kepolisian, tapi pandangan saya secara menyeluruh terhadap militer masih cukup positif.

****

PANDANGAN itu pelan-pelan mulai berubah setelah saya hijrah ke Jakarta, dan menjadi wartawan TEMPO di saat maraknya aksi-aksi mahasiswa dan pemuda luar-kampus selama dasawarsa 1970an. Kekerasan (atau ketegasan?) militer mulai saya saksikan atau amati dari cukup dekat, pada saat dua pergolakan mahasiswa selama dasawarsa itu, yakni peristiwa 15 Januari 1974 dan penyerbuan kampus ITB tahun 1978.

Malam hari, setelah aksi huru-hara tanggal 15 Januari 1974, saya ikut mengangkat mayat-mayat di depan RS St. Carolus ke sebuah mobil jip pengangkut mayat ke kamar mati RSUP dr Tjipto Mangungkusumo (kebetulan, rumah pondokan saya di belakang kantor Departemen P & K, di seberang RS St. Carolus). Saya ikut mengecek identitasnya.

Ternyata, laki-laki itu adalah seorang pembantu rumah tangga dari daerah Cempaka Putih, yang mati karena tembakan di daerah dadanya (memang saya dengar, bahwa pembubaran massa yang berdemonstrasi, dilakukan dengan tembakan rata-rata air). Pada saat itu saya mulai bertanya-tanya dalam hati saya, apakah tak ada cara membubarkan massa tanpa membunuh mereka, misalnya dengan gas air mata.

Aksi penyerbuan kampus ITB tahun 1978, sebagai reaksi terhadap mosi tidak percaya Keluarga Mahasiswa ITB terhadap Soeharto, yang menolak pemilihannya kembali sebagai Presiden RI, juga menimbulkan kesan yang cukup mendalam bagi saya. Sebagai wartawan TEMPO, saya ditugaskan meliput keadaan kampus ITB pasca penyerbuan kampus itu, di mana Ketua DM-nya, Heri Achmadi, ditangkap bersama sejumlah aktivis kampus lainnya.

Rektor ITB yang dicopot waktu itu, Iskandar Alisyahbana, yang sudah saya kenal karena liputan saya soal teknologi komunikasi satelit, menunjukkan pada saya bekas tembakan di tembok rumahnya. Waktu itu, sejumlah aktivis mahasiswa ITB melampiaskan kejengkelan mereka kepada saya, mengapa TEMPO tidak meliput peristiwa penyerbuan kampus mereka secara seketika dan secara apa adanya.

Saya kesal juga dipersalahkan terus, untuk sesuatu yang bukan tanggungjawab saya (maklumlah, saya hanya seorang reporter biasa waktu itu). Makanya saya ingatkan mereka untuk tidak hanya mendramatisasi penderitaan para mahasiswa itu sendiri. Saya katakan kurang lebih begini:

"Berdasarkan pengalaman anda sendiri, cobalah sekarang bayangkan, kira-kira yang terjadi di daerah-daerah yang jauh dari ibukota republik ini, di mana tidak banyak anak pejabat teras Indonesia di antara rakyat yang diserbu itu, seperti misalnya di Timor Timur."

Soalnya, sementara saya "dimarahi" oleh para aktivis ITB itu, hati saya juga jengkel terhadap kepincangan pemberitaan yang begitu menonjol, antara peristiwa penyerbuan kampus ITB, yang masih dapat diliput oleh pers Indonesia, walaupun dengan sedikit diperlambat dan dengan sangat hati-hati, dibandingkan dengan penyerbuan bekas koloni Portugis itu, yang harus didistorsi sama sekali. Seolah-olah yang terjadi hampir tiga tahun sebelum penyerbuan kampus ITB itu hanyalah "pembebasan" Timor Timur dari "pasukan komunis peninggalan Portugis" oleh para aktivis Timor Timur sendiri dengan dukungan "sukarelawan" Indonesia. Disodori perbandingan itu, para aktivis mahasiswa ITB yang harus saya wawancarai itu berhenti meratapi nasib mereka sendiri, dan juga berhenti menyerang-nyerang beleid majalah *TEMPO* yang tentu saja juga ingin *survive*. (bersambung kapan sempat)

****

BAB III
PERGULATAN ANAK BANGSA MELAWAN PENGUASA

"Perjuangan tidak boleh dalam satu helaan nafas. Setiap orang harus bernafas panjang untuk melakukan perjuangan yang berat." Sepenggal kalimat yang dituturkan George Junus Aditjondro, cukup memperlihatkan komitmen kuatnya untuk memerangi korupsi, khususnya korupsi yang dilakukan oleh Presiden. Konsistensi George untuk mengawasi, mengkritik, dan menawarkan solusi pada rezim pemerintah pantang diintervensi oleh siapapun. Ia bergerak secara mandiri menginvestigasi perkara-perkara korupsi yang tersembunyi dari balik tahta kekuasaan.

Sepak terjang George dalam menyentil penguasa jelas menemui banyak rintangan plus ancaman. Mungkin taruhannya adalah nyawa. Wajar saja, apabila dia punya banyak musuh yang notabene pro penguasa. Meski lawan-lawannya bisa diibaratkan raksasa, namun George tetap bergeming. Semakin ditekan, ia justru makin berani mencakar pemerintah dengan pena investigasinya. Tak pandang bulu, George menyoroti indikasi korupsi dari rezim Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Di antara rentetan rezim itu, barangkali rezim Soeharto-lah yang benar-benar menghakimi George. Peneliti sekaligus dosen ini sempat kena cekal hingga diburu aparat karena dituding menghina almarhum Soeharto.

Semua fakta-fakta indikasi korupsi itu, didapatnya melalui investigasi kewartawanan hingga mengumpulkan data-data yang berserakan di buku dan media massa. Selanjutnya, ia susun dan analisis dalam bentuk artikel atau buku. Sejumlah buku yang cukup membuat gerah pemerintah seperti *Korupsi Kepresidenan, Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga: Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa, Membedah Kembar Siam Penguasa Politik dan Ekonomi Indonesia; Investigasi Korupsi Sistemik Bagi Aktivis dan Wartawan Dari Soeharto ke Habibie; Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari; Kedua Puncak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Rezim Orde Baru,* Artikel *"Soeharto Has Gone, but The Regime Has Not Changed: Presidential Corruption In The Orde Baru"* dalam buku *Stealing From The People, dan Membongkar Gurita Cikeas.* Semua tulisan kritis George itu akan kami ulas di bagian ini.

Buku dari Soeharto ke Habibie; Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari: Kedua Puncak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Rezim Orde Baru (1998)

"Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998," ujar mendiang Soeharto. Pidato singkat Soeharto yang diucapkan di Istana Negara Jakarta itu sekaligus menjadi babak penutup kepemimpinannya selama 32 tahun berkuasa. Setelah bersedia lengser, Soeharto menyerahkan tongkat estafet kepemimpinannya kepada Prof Dr Ing Burhanuddin Jusuf Habibie.

Tumbangnya rezim Orde Baru dan bangkitnya dengan rezim reformasi, ternyata tak serta merta membawa perubahan menyeluruh. Memang, kebebasan berekspresi dan berpendapat sudah jauh lebih dinamis ketimbang era Soeharto. Namun sayangnya, angin kencang reformasi yang berhembus dari Senayan hingga ke pelosok negeri ini tetap tak mengusik geliat tikus-tikus koruptor. Perubahan politik dan kepemimpinan itu nada-nadanya tak membuat praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) ikut berhenti. George Junus Aditjontro melihat pemerintah Habibie hanyalah kelanjutan dari pemerintahan

Soeharto. Ia menilai kedua pemimpin bangsa itu memikul tanggung jawab besar terhadap krisis moneter yang berakar pada krisis kedaulatan rakyat. Mereka adalah orang pertama yang secara moral harus mengencangkan ikat pinggang dan mengembalikan sebagian besar kekayaannya, agar rakyat bisa makan dan menghirup udara kebebasan kembali.

Seperti umumnya karya-karya George Junus Aditjondro, karya investigasi yang dibukukan ini pun disertai dengan data-data yang membuat banyak orang tercengang. Terdapat beberapa rujukan literatur baik dalam maupun luar negeri dalam buku setebal 160 halaman ukuran 14 x 21 cm yang diterbitkan MIK-Pijar Indonesia tahun 1998 ini. George melakukan investigasi terhadap harta kekayaan kedua pejabat baik yang dikelola yayasan maupun perusahaan-perusahaan berikut milik kroni-kroninya. Ia mengakui kesulitan melacak kekayaan semua yayasan itu karena tumpang-tindihnya kekayaan keluarga Soeharto dengan kekayaan sejumlah keluarga bisnis yang lain, misalnya tiga keluarga Liem Sioe Liong, keluarga Eka Tjipta Widjaya, dan keluarga Bob Hasan.Ternyata keluarga Soeharto tak hanya senang menggunakan pengusaha-pengusaha keturunan Cina sebagai operator bisnisnya. Setelah ditelisik, bisnis keluarga Soeharto rupanya sangat tumpang tindih dengan bisnis dua keluarga keturunan Arab, yakni Bakrie dan Habibie. Selidik punya selidik, harta kekayaan keluarga Soeharto juga bertumpang-tindih dengan kekayaan keluarga Habibie, yang berkongsi dengan Tommy dan Bambang Tri dalam berbagai bisnis mereka di Pulau Batam. Salah satunya, ekspor babi hidup ke Singapura. Sementara dengan Mbak Tutut, Habibie membangun bisnis telekomunikasi dan pemetaan udara.

Bukan rahasia lagi, yayasan adalah salah satu mesin uang bagi Soeharto dan konco-konconya. George sendiri mengelompokkannya menjadi enam. Pertama berupa yayasan-yayasan yang diketuai Soeharto sendiri. Kedua, yayasan-yayasan yang diketuai Nyonya Tien Soeharto di masa hidupnya. Ketiga, yayasan-yayasan yang diketuai Soeharto secara tidak langsung lewat Habibie dan Bob Hasan.

Keempat, yayasan-yayasan yang diketuai para anak dan menantu Soeharto. Kelima, yayasan-yayasan yang diketuai atau dikelola para besan Soeharto beserta anak serta sanak-saudara mereka. Dan keenam, yayasan-yayasan yang diketuai atau dikelola sanak-saudara Soeharto dan Nyonya Tien Soeharto dari kampung halaman mereka di Yogyakarta dan Surakarta. Sepintas, dari luar, aktivitas karya-karya sosial yang direalisasikan seolah tak ada cela. Namun dari bukti-bukti yang dijabarkan dalam buku ini, di balik misi sosial itu tersembunyi kepentingan perkoncoan yang bermuara pada penimbunan kekayaan pribadi.

Membedah Kembar Siam Penguasa Politik dan Ekonomi Indonesia: Investigasi Korupsi Sistemik Bagi Aktivis dan Wartawan (2002)

Setiap kali orang yang berada dalam lingkaran penguasa terjerat kasus korupsi, tak sedikit orang yang skeptis, apakah orang tersebut akan diganjar hukuman ataukah dibiarkan melenggang bebas? Wajar apabila publik memandang sebelah mata penegakan hukum di Indonesia. Karena toh, banyak kasus, para konglomerat hitam yang sudah mengemplang uang negara miliaran bahkan triliunan rupiah justru dengan jumawa membangun kerajaan bisnis. Baginya, ancaman hukuman hanyalah gertak sambal. Faktanya, ia bisa menghirup udara bebas seolah steril dari hukum.

Korupsi merupakan sebuah kata yang sudah sangat familiar di telinga kita, tetapi tidaklah demikian dengan pemberantasannya. Malahan, pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu merupakan sesuatu yang asing di Indonesia. Sudah bukan rahasia lagi, para aparat penegak hukum seringkali tidak objektif dan bertindak tegas dalam melakukan pemberantasan korupsi. Kendala mereka sangat variatif, mulai dari kurangnya jerat hukum, tidak adanya sarana, kurangnya partisipasi non aparatus, hingga kurangnya cara untuk mengetahui serta mengungkap apakah perbuatan tersebut merupakan korupsi atau bukan, dan masih banyak lagi. Kira-kira seperti itulah potret korupsi versi Indonesia yang ingin diperlihatkan oleh George Junus

Aditjondro. Rumitnya permasalahan tentang pemberantasan korupsi di negeri ini diibaratkan George lewat sebuah metafora: "seperti Sisifus mendorong batu ke puncak Olympus". Sisifus adalah tokoh dalam mitologi Yunani yang dikutuk selama-lamanya mendorong batu karang ke puncak Gunung Olympus. Buku ini sendiri merupakan buku panduan untuk mencoba memecahkan permasalahan terakhir tersebut, yakni metodologi mengungkap jejaring korupsi sistemik khususnya bagi wartawan/aktivis.

Buku setebal 118 halaman dengan ukuran 10,5 x 17 cm yang diterbitkan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan pada Juli 2002 ini dibagi menjadi dua bab. Bab pertama yang bernama sama dengan judul buku ini membahas tentang falsafah korupsi, perspektif atau jenis-jenisnya, hingga teknik/investigasi mengungkapnya. Bab kedua, yang berjudul "Korupsi Multi-Partai Pasca Soeharto di Indonesia: Absennya Mekanisme Kontrol", khusus membahas modus korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh elit papan atas yang terjadi sekitar periode 1999 sampai 2002.

Ada hal menarik yang diungkapkan oleh George sebagai kerangka teoritis untuk memahami korupsi di negara kita. Dia memberikan tiga lapis kerangka teoritis korupsi yang dirujuk dari Syed Hussein Alatas yang dianggap sebagai refleksi langsung dari berbagai contoh korupsi di Indonesia; William J. Chambliss yang pendekatannya mengacu pada hal-hal *inherent* dalam birokrasi pemerintahan kita dengan di AS yang menganut sistem demokrasi liberal; dan Milovan Djilas, walaupun teorinya berasal dari sistem sosialisme negara yang melihat sebuah gejala sosial dari timbulnya 'kelas baru' di negara penganut sistem partai tunggal, kondisi ini mirip dengan di Indonesia pada era orba.

Biasanya, korupsi yang ditinjau oleh organisasi non pemerintah internasional, seperti Transparency Internasional, hanyalah kerangka korupsi lapis pertama dari Syed Hussein Alatas dengan gambaran umumnya yakni tingkat korupsi berbanding lurus dengan tingkat kemajuan ekonomi negara tersebut (makin miskin, makin korup; makin kaya, makin bersih dari korupsi) yang menempatkan Indonesia pada

urutan keenam paling banyak melakukan korupsi berdasarkan index persepsi korupsi (sesuai data pada tahun buku ini disusun). Namun jikalau menggunakan jejaring korupsi lapis kedua dan ketiga sekaligus, ternyata index persepsi korupsi tersebut hasilnya cenderung bias dan belum tentu akurat. Buktinya, negara-negara yang relatif bersih, seperti Singapura, Swiss, dan negara Skandinavia serta maskapai-maskapai perusahaan mancanegara, ternyata tidak sebersih yang diperlihatkan oleh ranking dari Transparency Internasional.

Selain menjabarkan tiga kerangka teori tersebut, George juga memaparkan konsep "oligarki korupsi" yang melibatkan kelompok-kelompok kepentingan penguasa politik dan ekonomi negara-negara kapitalis. Kelompok-kelompok itu menguasai pusat-pusat kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan kebijakan-kebijakan yang berkiblat pada kepentingan kelas atas. Untuk di Indonesia, konsep oligarki dianalisis pada periode transisi, perubahan antara oligarki Soeharto yang diberi simbol "rezim 4 H" (Soeharto, Habibie, Harmoko, dan Bob Hasan) menuju oligarki Megawati yang diberi simbol "rezim 4 T"(Taufiq Kiemas, Tjahjo Kumala, Theo Syafei mereka bertiga dianggap sebagai lingkaran dalam kekuasaan, dan lingkaran luar adalah Tommy Winata). Tiap rezim oleh George Junus dianggap memiliki satu kesatuan atau kesamaan baik itu berasal dari keluarga, rekanan, ataupun kawan dekat. Khusus untuk rezim 4T, Tomy Winata misalnya, pengusaha kaya raya itu digambarkan sering kali melakukkan manuver politik dengan mensponsori pemilihan kepala-kepala daerah di Indonesia Timur.

Selain landasan sosiologis, George juga memberikan gambaran hukum tentang korupsi serta korupsi politik, lalu menyarankan perlunya pengadaan sistem hukum yang mengatur pemeriksaan kekayaan yang sangat ketat setiap saat selama masa dinas para pejabat negara. Menurutnya, pemeriksaan yang ada sekarang masih banyak kekurangannya, di antaranya adalah ketidakjelasan sanksi terhadap para pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaannya. Menariknya, George sekaligus memberikan solusi terhadap landasan politis *clean government*. Menurutnya, pemisahan jabatan publik

dan jabatan bisnis harus jelas. Dengan demikian, penguasa politik tidak merupakan 'kembar siam' dari penguasa ekonomi, seperti yang terjadi pada rezim orba di Indonesia. Lebih lanjut, ia menawarkan lima perangkat kebijaksanaan guna menutup celah korupsi, seperti: pembatasan sumbangan parpol, pencegahan pembelian suara, transparansi kekayaan, pelepasan semua jabatan publik dengan dunia usaha, dan jabatan parpol.

Selain kebijaksanaan preventif, George juga tidak lupa memberikan cara bagaimana cara mengungkap korupsi melalui proses investigasi. Ada sepuluh tahapan yang dapat dilakukan bagi aktivis atau wartawan untuk menyelidiki tindakan korupsi. Di antaranya dapat dilakukan, melalui internet, buku telepon, koran, mengecek akta notaris dan tambahan berita negara (TBN). Selanjutnya pada bab kedua, George lebih berfokus kepada para elit politik atau pejabat negara yang ia sinyalir telah melakukan korupsi.

Buku ini memang menghadirkan perspektif alternatif dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia. Sepertinya, penyelidikan terhadap kasus-kasus korupsi dengan menggunakan penelitian investigatif setidaknya bisa mengurai benang kusut jejaring korupsi. Bagaimanapun juga korupsi termasuk *extra ordinary crime* maka penanganannya pun sudah sewajarnya menggunakan berbagai macam metode. Salah satu metodenya seperti yang diuraikan oleh George.

Artikel "Soeharto Has Gone, but The Regime Has Not Changed: Presidential Corruption In The Orde Baru" dalam buku *Stealing From The People* (2002)

Selama 32 tahun, alm. Soeharto dan kolega-koleganya sukses besar membangun jejaring dinasti politik dan bisnis. Sekalipun Orde Baru telah tumbang, namun para Soehartois masih memainkan peranan di zaman reformasi ini. Soehartois di sini artinya, lingkaran keluarga Cendana, kerabat, kolega, termasuk orang-orang yang sepaham dengan pemikiran-pemikiran Soeharto. Pengaruh mereka masih

sangat kuat. Buktinya, meski Soeharto terjerat kasus dugaan korupsi menyangkut penggunaan uang negara oleh tujuh yayasan yang diketuainya, namun proses hukum mantan presidan kedua RI itu tak kunjung mengerucut pada vonis hakim. Bahkan pada 12 Mei 2006, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menerbitkan SKP3 (Surat Keputusan Penghentian Penuntutan Perkara).

Dalam artikelnya yang dimuat di buku *Stealing From The People; 16 Studies on Corruption in Indonesia* hal 1-66 dan diterbitkan oleh Aksara Foundation tahun 2002, George menguraikan panjang lebar kuatnya indikasi gurita korporasi yang dibangun oleh oligarki Soeharto bersama kolega-koleganya. Sebut saja nama-nama seperti Liem Sioe Liong, Probosutedjo, dan Sudwikatmono. Di antara mereka, representasi dari keluarga besar Soeharto yakni Probosutedjo, adik tiri Soeharto dan Sudwikatmono, sepupu Soeharto. Selama Soeharto menjabat sebagai Presiden, hubungan bisnis antara Liem Sioe Liong atau Sudono Salim dengan keluarga besar Soeharto sendiri terus menghangat. Bahkan mereka memainkan praktik monopoli bisnis yang berpotensi menggelembungkan harta kekayaan masing-masing.

George mencuplik potongan fakta yang menyebutkan, Probosutedjo, pemilik PT Mercu Buana dan Liem Sioe Liong, pemilik Salim Grup, mendapat hak istimewa untuk melakukan impor cengkeh dari Zanzibar (Tanzania) dan Malagasy (Madagascar). Setelah diimpor, mereka menjual cengkeh tersebut ke pabrik rokok kretek. Pada saat itu, monopoli cengkeh ini menjadi isu perdebatan antara Soeharto versus para pengkritiknya. Probosutedjo bahkan mengancam para pengkritik dengan memperkarakan mereka ke pengadilan. Ia menolak dituduh memperkaya diri atas dukungan Soeharto. Probosutedjo berdalih bahwa bukan Soeharto yang menunjuk perusahaannya dan Liem Sioe Liong untuk mengimpor cengkeh. Ia mengaku Menteri Perdagangan Sumitro Djojohadikusumo-lah yang memberikan rekomendasi. Sementara itu, dalam biografinya, Soeharto menyatakan tidak pernah menerima satu sen pun dari monopoli cengkeh itu karena keuntungan

dari impor cengkeh itu masuk ke rekening khusus presiden untuk kepentingan khusus yang dikelola Ali Afandi di sekretariat negara. Meski demikian, indikasi penyalahgunaan uang hasil impor cengkeh itu tercium manakala diketahui bahwa pengaturan impor cengkeh dikontrol ketat oleh fungsionaris-fungsionaris yayasan-yayasan yang dikendalikan Soeharto. Ali Affandi sendiri tercatat sebagai bendahara di Yayasan Beasiswa Supersemar.

Keluarga Soeharto yang lain tampaknya tak mau ketinggalan. Terbukti, lima dari enam keturunan Soeharto mulai membangun perusahaan-perusahaan yang dimanjakan dengan sodoran kontrak-kontrak pemerintah, disokong oleh berbagai badan pemerintah atau sekadar menggunakan fasilitas umum. George mengungkapkan kasus yang paling mencolok atas fasilitas-fasilitas istimewa yang dimiliki keluarga Soeharto selama mengembangkan kerajaan bisnis. Kasus tersebut adalah penggunaan kapal pendarat Angkatan Laut-setelah menurunkan pasukan di Timor Leste pada 1975-untuk mengapalkan ternak dari Queensland, Australia. Pembelian ternak itu ditujukan untuk memajukan pertanian Tapos milik putra tertua Soeharto, Sigit Hardjojudanto di Jawa Barat. Terkadang, ternak dibawa ke Tapos menggunakan pesawat Hercules Angkatan Udara yang diatasnamakan PT Bayu Air, perusahaan penerbangan milik Sigit.

Dalam tulisannya, George juga memetakan cara keluarga Soeharto mengumpulkan kekayaan dari dalam dan luar negeri. Metode-metodenya sebagai berikut: 1. Membuat yayasan; 2. Mendayagunakan aset yang menjadi milik kawan-kawan mantan Presiden Soekarno; 3. Mengeluarkan dan menyalahgunakan Keputusan Presiden; 4. Membentuk monopoli komoditi; 5. Menyalahgunakan fasilitas publik; 6. Bentuk-bentuk lain dari *Gate Keeping* dan *Rate Keeping*; 7. Menggunakan pesawat pribadi untuk jemaah haji; 8. Menggunakan pesawat pribadi untuk menyelundupkan emas ke luar negeri; 9. Mengimpor senjata dan berdagang bahan peledak; 10. Mencetak dan mengedarkan uang palsu; 11. Menyelundupkan obat terlarang.

Sementara metode untuk menghimpun harta dari luar negeri ditempuh dengan cara: 1. Menghadiahi para kroni dengan kekuasaan; 2. Memanfaatkan kantor pengacara dan konsultan keuangan internasional yang bagus; 3. Memanfaatkan pengusaha lokal, konsultan, politisi luar negeri, dan kroni; 4. Memanfaatkan jaringan bank internasional; 5. Menyembunyikan aset-aset di perusahaan-perusahaan global multi lapis; 6. Meng-ASEAN-kan oligarki Soeharto; 7. Menanam investasi pada perusahaan-perusahaan luar negeri; 8. Mengeksploitasi posisi internasional Soeharto; 9. Menyimpan uang di pusat-pusat pencucian uang dunia.

Para aktivis pro demokrasi sudah paham betul pola-pola keluarga Soeharto dan kroni-kroninya melancarkan praktik cari untung dengan memanfaatkan fasilitas negara. Demi memerangi penguasa yang sewenang-wenang, mereka seringkali menghujamkan kritik pedas pada pemerintah. Hanya saja, Soeharto memiliki kekuatan tangan besi untuk membungkam mulut dan mata pena para aktivis. George sudah mengamati metode kediktaktoran Soeharto untuk memasung ruang gerak lawan-lawannya. Dalam pengamatannya, George menuliskan sebelas cara Soeharto mematikan langkah para aktivis. Kesebelas cara itu adalah 1. Membangun rezim berdasarkan teror negara; 2. Melibatkan militer dalam berbagai bisnis; 3. Menyalahgunakan kekuasaan militer dan badan-badan penegak hukum; 4. Menyensor dan mengintimidasi media; 5. Membunuh para pengkritik vokal; 6. Membentuk korupsi bangsa dengan oligarki luas; 7. Menciptakan front muslim pro-Soeharto; 8. Memprovokasi sentimen anti Tionghoa, 9. Mendanai para politis pro-Soeharto; 10. Membangun berbagai kelompok preman.

Sudah menjadi hukum alam, sepintar-pintarnya menyembunyikan barang busuk, pada akhirnya tercium juga. Pekik reformasi yang berkumandang di tahun 1998 menjadi titik balik dinasti bisnis Soeharto dan kawan-kawan. Persengkongkolan tingkat tinggi dinasti Soeharto dan kroni-kroninya yang jelas-jelas menggerogoti keuangan negara terbongkar sudah. Aset yang seharusnya untuk memakmurkan rakyat

semata-mata dipergunakan untuk kepentingan golongan. Praktis, mereka juga menghisap uang rakyat karena sebagian besar sumber keuangan negara diperoleh dari pajak.

Dampak dari praktik KKN berjamaah itu baru terasa setelah Indonesia dihantam badai krisis moneter. Tahun 2000, utang luar negeri Indonesia, yang mencakup utang pemerintah dan swasta, ternyata membengkak menjadi US$ 144.2 miliar. Namun dampak ekonomi dari pelanggaran rezim Soeharto tak hanya terbatas pada kapasitas pembayaran utang Indonesia, melainkan melingkupi wilayah yang lebih luas.

Dalam artikelnya, George membeberkan bahwa berulangnya kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan dapat dilacak penyebabnya ialah pada oligarki bisnis minyak sawit keluarga Soeharto yang telah memekarkan bisnis-bisnis patungan mereka dengan perusahaan-perusahaan negara dan swasta Singapura dan Malaysia. Dalam hal ini, sindikat Camerlin, yang meliputi grup Salim, Sembawang Corporation, Haw Par Brothers, raksasa bisnis Hong Leong.

Adapun dampaknya terhadap negara yakni masih kuatnya pengaruh para politisi, mantan kroni serta jajaran militer yang jelas-jelas pro-Soeharto. Maklumlah, selama tiga dekade lebih Soeharto menjadikan Golkar sebagai kendaraan politiknya. Di atas kertas, kekuatan pro Soeharto yang meliputi jaringan bisnis, militer, dan Golkar masih tetap utuh meski kediktatoran Soeharto telah tumbang. Kekuatan-kekuatan itu masih terasa di badan legislatif. Terlebih lagi, suara Partai Golkar di parlemen masih sangat diperhitungkan. George mencatat, di Maluku sejumlah kelompok militan muslim dan militer berusaha melenyapkan kebijakan-kebijakan liberal dan non sektarian pemerintahan Gus Dur dan Megawati. Sebagaimana sudah banyak orang yang tahu, pada konflik di Maluku, para jenderal pro-Soeharto memanfaatkan kekerasaan kejam itu dengan mengubah konflik etnis menjadi konflik antar agama.

Selanjutnya, kalau bicara dampaknya terhadap masyarakat, George menggarisbawahi bahwa pada intinya korupsi kepresidenan Soeharto telah merusak jaringan masyarakat. Korupsi merangsang pengembangan korupsi yang lebih besar. Dan boleh dibilang, korupsi sudah membudaya. Tak hanya sebatas korupsi saja, masyarakat juga sudah terlanjur terbiasa dengan pengekangan hak-hak asasi manusia. Sebagai contoh, merebaknya sentimen anti Tionghoa dan aksi premanisme. Meski tidak secara gamblang ditulis, pembaca akan menangkap pesan-pesan implisit yang disampaikan George dalam artikelnya ini. Kita seolah diingatkan bahwa gerakan laten rezim Orde Baru sampai sekarang masih bergentayangan. Celakanya, kini mereka bersalin rupa menjadi seorang malaikat reformis. Pura-puranya pro-*wong cilik* dan pro-demokrasi, tapi sejatinya mereka berambisi menghidupkan dan mereproduksi lagi pola-pola Orde Baru.

Korupsi Kepresidenan, Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga: Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa (2006)

Angin surga reformasi sudah berhembus semenjak Mei 1998. Pasca kejatuhan rezim Soeharto, publik yang awalnya gagap dalam menyuarakan pendapatnya seolah mendapat kemerdekaan dalam bersuara. Tak tanggung-tanggung, orang-orang bahkan berani menyalurkan aspirasi dengan cara yang ditabukan Orde Baru yakni unjuk rasa turun ke jalan. Sayangnya, setelah era reformasi berumur satu dasawarsa lebih, impian untuk mewujudkan bangsa yang sejahtera dan bermartabat masih sebatas *obrolan ngalor-ngidul* yang tak berkesudahan.

Apa penyebab kegagalan reformasi? Buku ini menjawab bahwa kesalahan terbesar para reformis dan aktivis pro-demokrasi bangsa Indonesia adalah "menyerahkan" wilayah publik pada sekumpulan orang-orang yang ikut menikmati kejayaan Order Baru. George berhasil mengumpulkan sejumlah besar material yang menunjukkan betapa mengguritanya dan mendalamnya budaya korupsi yang dikembangkan selama masa Orde Baru. Ia juga menyoroti praktik-praktik korupsi terutama pada zaman kepresidenan Soeharto

hingga kejatuhannya di tahun 1998. Investigasi berlanjut ke masa kepresidenan Habibie, Gus Dur, dan Megawati. Menurut Aditjondro, Habibie itu sama korupnya seperti Soeharto. Gus Dur tidak korup tapi menjalankan praktik-praktik KKN tertentu yang menguntungkan konco-konco separtainya. Sementara mengenai Megawati, George membongkar sumbu praktik-praktik bisnis Taufiq Kiemas, suami Megawati yang tidak selalu bersih.

Menurut penelitian George Junus Aditjondro, semenjak era Soeharto, praktik korupsi di Indonesia telah menggurita dan bereproduksi menjadi sebuah oligarki yang sulit diputus mata rantainya. Kekuasaan presiden-presiden pasca Soeharto juga mempertahankan bahkan memperbarui wajah oligarki melalui persekutuan-persekutuan terselubung di berbagai sektor ekonomi dan politik. Dengan data lengkap, George Junus Aditjondro menginvestigasi sepak terjang Soeharto yang gemar menimbun kekayaan. Sorotan George juga diarahkan pada presiden RI berikutnya. Dari fakta-fakta yang dipaparkan George, tak heran apabila publik mempersepsikan para pemimpin pasca Soeharto sebagai Soeharto kecil dalam bidang korupsi. Dari situ, tercium adanya jaringan luar biasa ketat dan tersistemisasi yang dibangun oleh trio penguasa, pengusaha, dan militer. Persekongkolan mesra itu menyulitkan proses demokratisasi serta pencapaian keadilan dalam masyarakat.

Dalam buku setebal 492 halaman dengan ukuran 14,5 x 21 cm yang diterbitkan LKIS Yogyakarta tahun 2006 ini, George Junus Aditjondro menganalisis bagaimana sistem oligarki Soeharto terpelihara hingga berhasil beranak pinak oleh sistem-sistem politik pasca-Soeharto. Dengan data hasil penelusuran selama delapan tahun di Indonesia dan tujuh tahun di luar negeri, George Junus Aditjondro menilai bahwa oligarki di Indonesia terbagi menjadi tiga kaki. Kaki pertama adalah Istana. Yang dimaksud George Junus Aditjondro dengan "istana" yakni bukanlah gedung yang merupakan kediaman resmi keluarga presiden, melainkan lingkaran keluarga besar presiden. Selanjutnya, kaki kedua adalah "tangsi" yang sekaligus merupakan lingkaran pelindung

pertama dari "istana". Istilah "tangsi" pada buku ini bukanlah tempat tinggal kesatuan angkatan bersenjata, melainkan komunitas militer dan polisi yang terdiri dari purnawirawan, perwira tinggi, sampai para prajurit, yang bertugas memelihara kepentingan modal besar. Sementara kaki yang ketiga adalah "partai penguasa" yang di era kepresidenan Soeharto dimainkan oleh Golongan Karya (Golkar). Kaki ketiga ini adalah benteng perlindungan kedua bagi berbagai bisnis Istana yang sekaligus berfungsi menyamarkan keberpihakan para serdadu dalam melindungi kepentingan bisnis keluarga Istana.

Akibat praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam ketiga kaki oligarki itu Soeharto beserta kroni-kroninya, terutama anak-anaknya serta anggota-anggota keluarganya yang lain, berhasil membangun suatu imperium ekonomi yang luar biasa. Kekuasaan ekonomi yang secara geografis menjangkau Afrika, Asia, Amerika Latin (Suriname), dan Eropa. Sayangnya, kepentingan dan hasil dari ekspansi ekonomi yang dijalankan oleh lingkaran keluarga Soeharto itu bukanlah semata-mata untuk menyejahterakan rakyat melainkan muaranya lebih menguntungkan keluarga Cendana. Beberapa metode terselubung yang dipakai untuk memperkaya diri antara lain pemberian hak monopoli tertentu kepada anak-anak Soeharto, umpamanya monopoli *import* cengkeh dari Afrika. Pendirian "yayasan-yayasan" berkedok "bantuan kepada rakyat kecil", padahal sebenarnya di belakangnya adalah bisnis besar tanpa dikenakan pungutan pajak. Menariknya, banyak "yayasan" ini diketuai oleh Soeharto sendiri. Dan celakanya, sistem pembukuannya selalu tidak pernah transparan. Maka tak heran, ada satu grup yayasan Indonesia yang kekayaannya disinyalir lebih besar dari grup yayasan terkaya di USA.

Pembangunan ekonomi yang didasarkan pada semangat KKN ini menumbuhkan kapitalis-kapitalis kaya raya luar biasa yang telah mencapai posisi top. Para konglomerat ini lahir bukan karena kegigihan dalam bekerja melainkan karena kedekatan dengan pusat kekuasaan. Suapan-suapan para investor asing mengakibatkan tender proyek yang tidak adil. Ujung-ujungnya, siapa saja pemenang tender

bukanlah mereka yang punya solusi paling baik dan paling murah, melainkan mereka yang menyuap paling banyak. Akibat dari sistem tender semacam ini, Indonesia diikat dengan perjanjian jangka panjang (30-40 tahun) dengan para investor tersebut yang sangat merugikan Indonesia (contoh: tambang emas Freeport di Papua Barat).

Meski Soeharto sudah lengser, tapi sepertinya ia tak bisa hidup tenang. Ia seolah dihakimi oleh banyak orang yang mengecamnya dan ingin menjebloskannya ke dalam bui. Kemarahan massa itu dipicu oleh gaya kepemimpinan Soeharto yang terindikasi korup. Kendati demikian, kita tidak bisa serta merta menghakimi Pak Harto dari sebelah mata saja. Paling tidak, di era kepemimpinan Pak Harto, harga bahan pangan dan biaya pendidikan murah. Walaupun pada periode pemerintahan Soeharto, Indonesia dianggap sebagai salah satu "macan ekonomi Asia", tapi sesungguhnya, kalau dibanding dengan negeri-negeri seperti Korea Selatan, Taiwan, Singapura atau Malaysia, perkembangan ekonomi Indonesia di zaman Orde Baru adalah perkembangan ekonomi semu. Artinya, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya menguntungkan kalangan yang dekat dengan penguasa. Akibatnya, ketika badai krisis moneter (krismon) menghantam, Indonesia menjadi negeri yang terkena dampak krisis ekonomi paling parah dan paling sulit untuk bangun kembali. Bahkan sampai sekarang efek perkembangan ekonomi semu itu masih dirasakan oleh rakyat berpenghasilan minim. Sungguh sebuah pemandangan yang tidak adil, di saat rakyat miskin kesulitan untuk bertahan hidup, para taipan bermasalah beserta kroni-kroninya justru mengendalikan kerajaan bisnisnya dari luar negeri.

Buku Membongkar Gurita Cikeas; Di Balik Skandal Bank Century (2010)

Fakta demi fakta terkumpul, SBY dan Ny. Ani Yudhoyono terindikasi menggemukkan keluarga besar Cikeas dengan melibatkan kolega-koleganya. Aroma kurang sedap itu semakin lama tercium baunya manakala sanak kerabat SBY-Ny. Ani Yudhoyono diketahui kecipratan

proyek-proyek bernilai milyaran rupiah dari "pemerintah". Sebut saja, Hartono Edhie Wibowo, adik Ny. Ani Yudhoyono punya ikatan bisnis dengan adik dari M. Hatta Rajasa, Pembina Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam, melalui PT Power Telecom (Powertel). Hartanto adalah Komisaris Utama perusahaan itu, sementara salah seorang direkturnya dijabat oleh adik Hatta Rajasa, Achmad Hafisz Tohir. Sementara pakar telematika Roy Suryo Notodiprojo kebagian jatah menjadi komisaris independen, sedangkan Dicky Tjokrosaputro, salah seorang pewaris *Batik Keris* adalah direktur utama PT Powertel. Maka tak heran sewaktu Hatta Rajasa jadi Menteri Perhubungan, Powertel mendapat proyek telekom serat optik dari PT KAI.

Dalam buku setebal 183 halaman berukuran 15x23 cm terbitan Galangpress 2010 ini, George Junus Aditjondro memaparkan indikasi-indikasi praktik-praktik oligarki atau gurita persekongkolan antara keluarga SBY dengan kolega-koleganya. Semisal Edhie Baskoro yang digandeng seorang pengusaha terkenal kopi bubuk untuk mendirikan perusahaan kue kering dan Gatot Suwondo yang notabene kerabat dekat Ny. Ani Yudhoyono diangkat menjadi Dirut BNI. Fakta-fakta yang dijabarkan George diperoleh dari data sekunder dari media dan investigasi melalui informan yang berhasil ia korek keterangannya. Selain menyoroti sepak terjang keluarga Cikeas dan kroni-kroninya, George juga menyelidiki dugaan aliran dana siluman yang mengalir untuk Partai Demokrat. Kecurigaan itu muncul manakala George menemukan pelanggaran yang terjadi di dalam tim sukses Partai Demokrat dan Pemenangan SBY-Boediono.

George mengkritik kemenangan Partai Demokrat dan duet SBY-Boediono dalam Pemilu 2009. Tentu saja, ia berbekal temuan Bawaslu yang mendapati sejumlah kecurangan yang dilakukan Partai Demokrat. Hal ini timbul, di mana ada perangkapan jabatan antara kader Partai Demokrat, khususnya yang duduk di dalam berbagai tim sukses, dengan jabatan komisaris atau fungsionaris badan-badan usaha milik negara (BUMN) tertentu. Menariknya lagi, para tim-tim sukses itu juga menduduki jabatan di sejumlah yayasan yang berafiliasi pada SBY dan

Ny. Ani Yudhoyono. Barangkali, tak banyak dari kita yang menyadari bahwa SBY dan Ny. Ani Yudhoyono rupanya memiliki yayasan yang berpotensi memunculkan penyalahgunaan anggaran seperti yang terjadi di masa Orde Baru. Beberapa yayasan tersebut antara lain Yayasan Puri Cikeas, Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian (YKDK), Yayasan Majelis Dzikir Nurussalam, Yayasan Mutu Manikam Nusantara, dan Yayasan Batik Indonesia.

Luar biasa, begitulah respon SBY dan keluarga Cikeas terhadap terbitnya buku ini. Sampai-sampai, kemunculan buku ini menjadi polemik nasional yang membuat heboh seluruh elemen masyarakat termasuk Pansus Century. Terlebih lagi, George menyebutkan nama Boedi Sampoerna sebagai salah satu nasabah kakap Bank Century yang disinyalir ikut menyokong dana kampanye Partai Demokrat. Di luar kasus Century, Boedi diduga kuat menyuntikkan dana untuk Jurnal Nasional, koran yang jadi corong politik Partai Demokrat.

Sebetulnya, data-data yang dirujuk George sudah lama dimuat di media massa. Hanya saja, George dengan jeli mengumpulkan, menyusun serta kemudian menganalisisnya sehingga antara yang satu dengan yang lain terdapat satu benang merah. Begitu membaca buku Membongkar Gurita Cikeas, cakrawala berpikir kita terhadap pemerintahan SBY seakan terbuka. Setidaknya, kita baru tahu bahwa ada kemiripan SBY-Ny. Ani Yudhoyono dengan alm. Soeharto-almarhumah Ny. Tien Soeharto. Kemiripan itu terletak pada pendirian yayasan-yayasan yang sangat rentan akan praktik KKN.

Masyarakat terlanjur sudah trauma dengan gaya kepemimpinan Orde Baru yang dikenal korup. Untuk itulah, sangatlah wajar apabila pada bagian kesimpulan dalam buku ini, George memberikan usulan kepada SBY supaya bertindak tegas terhadap keluarganya sendiri untuk memberantas gurita KKN yang dikhawatirkan mulai menjalar. Bukankah sangat kontradiktif, di satu sisi SBY lantang meneriakkan *"Katakan Tidak Untuk Korupsi"*, tapi di sisi lain, ia justru terkesan membiarkan keluarga besarnya menghidupkan virus KKN.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aditjondro, George Junus. 2002. *Kembar Siam Penguasa Politik dan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.

---------------- 2002. *Suharto Has Gone but The Regime Has Not Changed: Presidential Corruption in The Orde Baru dalam Stealing From The People 16 Studies on Corruption in Indonesia*, Book 1 Corruption-From Top to Bottom (hal 1-66). Jakarta: Aksara Foundation.

----------------- 2003. *Dari Soeharto ke Habibie: Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari: Kedua Puncak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Rezim Orde Baru*. Jakarta: MIK (Masyarakat Indonesia untuk Kemanusiaan) & Pijar Indonesia.

------------------2006. *Korupsi Kepresidenan; Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga: Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa*. Yogyakarta: LKiS.

------------------2010. *Membongkar Gurita Cikeas; di Balik Skandal Bank Century*. Yogyakarta: Galangpress.

Surat Kabar

Melyani, Vennie. "Aditjondro Belum Jadi Tersangka." [Berita]. *Koran Tempo*, 4 Januari 2010.

Rakhmawati, Lufti. "Buku Membongkar Gurita Cikeas Banyak Dicari." [Berita]. *Radar Jogja*, 3 Januari 2010.

Syafei, Heru Lesmana. "Membongkar Gurita Cikeas Menghilang. [Berita]. *Harian Jogja*, 27 Desember 2009, h. 1 dan 2

Triwikromo, Triyanto. "Julius Felicianus: Salahkah George Ikut Berantas Korupsi?" [Artikel]. *Suara Merdeka*, 3 Januari 2010.

"Ada yang Kebakaran Jenggot." [Berita]. *Harian Jogja*, 27 Desember 2009.

"Buku Gurita Cikeas Ditarik." [Berita]. *Radar Jogja*, 27 Desember 2009.

"Buku Gurita Cikeas Terus Dipasarkan di 28 Kota." [Berita]. *Media Indonesia*, 6 Januari 2010.

"George Tantang SBY Debat Gurita Cikeas." [Berita]. *Jawa Pos*, 29 Desember 2009.

"Jika Dilarang, Tak Sesuai Konstitusi." [Berita]. *Jawa Pos*, 29 Desember 2009.

"Kejaksaan Bantah Ada Arahan Cikeas." [Berita]. *Jawa Pos*, 29 Desember 2009.

"Kontroversi Buku George, George Aditjondro Siap Lakukan Debat Publik." [Berita]. *Kompas*, 29 Desember 2009.

"Kurang Data, Gurita Cikeas Direvisi." [Berita]. *Jawa Pos*, 29 Desember 2009.

"SBY Takkan Panggil Aditjondro, Disiapkan Buku Tandingan." [Berita]. *Kedaulatan Rakyat*, 29 Desember 2009.

"Tak Ada Instruksi Menarik Buku." [Berita]. *Harian Jogja*, 27 Desember 2009.

"Tak Gentar Hadapi Ancaman." [Artikel]. *Radar Jogja*, 3 Januari 2010.

"Urip Sejatine Gawe Urup." [Berita]. *Media Indonesia*, 4 Januari 2010.

Internet

http://pakuwibowo.multiply.com/reviews/item/1

http://pakuwibowo.blogspot.com/2008/04/aditjondro.html

http://stefanusakim.blogspot.com/2007/11/menguak-pola-kkn-soeharto-dan-habibie.html

Berbagai pemberitaan seputar buku *Membongkar Gurita Cikeas* dan George Junus Aditjondro dalam:

www.apindonesia.com

www.detiknews.com

www.ekstra.kompasiana.com

www.hariansib.com

www.hariansumutpos.com

www.harian-global.com

www.jakartapress.com

www.nasional.kompas.com

www.okezone.com

www.politikana.com

www.rakyatmerdeka.co.id

www.republika.co.id

www.rri.co.id

www.rusdimathari.wordpress.com

www.sripoku.com

www.tvone.co.id

www.vivanews.com

Tentang Penulis

"*Salahkah George Berantas Korupsi?*" Secara eksplisit, judul tersebut menggunakan kalimat tanya karena tim penulis mempertanyakan nasib buku Membongkar Gurita Cikeas yang "dizalimi". Dalam hal ini makna "dizalimi" adalah ada salah satu jaringan toko buku ternama di Indonesia tidak mengizinkan buku yang mengupas indikasi KKN di lingkaran penguasa itu dijual di jaringan toko buku tersebut. Belum lagi ditambah rumor miring berbaru SARA dan politis yang menyerang George Junus Aditjondro (GJA). Kontan saja tim penulis bertanya-tanya, apakah ada yang salah terhadap niat mulia GJA untuk memerangi indikasi KKN? Toh pemerintah sendiri berkomitmen membasmi korupsi sampai ke akar-akarnya. Guna meluruskan isu tak sedap yang menimpa GJA, dalam buku ini tim penulis mewawancari secara eksklusif GJA. Hal ini mendesak dilakukan karena sebagai rakyat biasa GJA juga punya hak untuk ikut andil dalam menyoroti dugaan-dugaan KKN serta memberikan informasi yang jujur tentang dirinya.

Buku *"Salahkah George Berantas Korupsi?"* ini ditulis oleh tim penulis yakni *Nurjannah Intan (lulusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM), Sigit Suryanto (lulusan Sastra Prancis Fakultas Ilmu Budaya UGM), dan Yuni Dasusiwi (lulusan Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik UGM).* Ketiga penulis tersebut juga dilibatkan dalam penyusunan buku *Membongkar Gurita Cikeas* yang ditulis George Junus Aditjondro.

Salahkah George Berantas Korupsi?

Dilengkapi dengan **surat George untuk Presiden Soeharto** (1997), **surat George untuk aktivis '98**, **pidato George saat menolak PLTN Muria**, serta **bookografi karya George** tentang *Presidential Watch*.

"Tidak harus ilmiah untuk mendapatkan kebenaran. Korupsi itu *extra ordinary crime*, sistem operasinya pasti tertutup. Tidak mungkin menggunakan cara-cara ilmiah untuk membongkarnya."

— **Prof. Dr. Paulus Wirutomo**, *Sosiolog, Guru Besar FISIP Universitas Indonesia*

Presiden SBY prihatin atas terbitnya buku *Membongkar Gurita Cikeas*. Respon SBY itu dinyatakan selang hitungan hari setelah buku tersebut terbit. Tapi entah mengapa buku yang isinya sarat akan informasi sekaligus solusi terhadap pemerintah itu menghilang dari peredaran. Akibatnya, hak-hak rakyat untuk mendapatkan wawasan pun terputus secara sepihak.

Pada intinya, dalam buku *Membongkar Gurita Cikeas*, George Junus Aditjondro (GJA) mencoba bicara jujur perihal indikasi sekaligus potensi munculnya wabah KKN yang terjadi dalam rezim SBY. Sejak tahun 2004, GJA melakukan investigasi terkait dugaan praktik-praktik kesewenang-wenangan yang terjadi dalam ruang lingkup penguasa. Meski mendapat tudingan miring hingga cercaan yang menafikkan metodologi penelitiannya, GJA tetap pantang mundur. Ia akan terus menelisik dugaan korupsi yang berseliweran di kalangan elit pemerintah.

Buku ini secara eksklusif memaparkan komitmen GJA sekaligus konsistensinya dalam memerangi korupsi kepresidenan. Ia juga banyak bercerita tentang riwayat hidup, keluarga, hingga sepak terjangnya sebagai aktivis pro demokrasi di masa pemerintahan Soeharto. *"Konsistensi saya ada pada penegakan HAM. Pada mulanya saya bergerak untuk mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan keserakahan penguasa dan menyengsarakan rakyat. Seperti kasus waduk Kedung Ombo dulu. Saya bersama Romo Mangun, Arief Budiman, dan Gus Dur ikut membela hak-hak warga desa yang digusur demi kepentingan pembangunan waduk tersebut,"* ungkap GJA. Sudah bukan rahasia lagi, korupsi menjadi simbol keserakahan yang terbukti menzalimi rakyat. Untuk itulah, George akan terus membongkar kasus korupsi meski harus menanggung berbagai risiko dalam hidupnya.



JOGJA BANGKIT PUBLISHER (Galangpress Group)
Jln. Mawar Tengah No.72 Baciro Yogyakarta 55225
Tlp: (0274) 554985, 554986 Faks: (0274) 556086
email: jogjabangkit@gmail.com

aku membaca, maka aku ada

